

**SEJARAH PERLAWANAN
TERHADAP KOLONIALISME DAN
IMPERIALISME
DI SUMATERA UTARA**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1991**

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

SEJARAH PERLAWANAN TERHADAP KOLONIALISME DAN IMPERIALISME DI SUMATERA UTARA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1991

Koreksi Naskah
Soejanto

Cetakan Pertama : Tahun 1982
Cetakan Kedua : Tahun 1991
Penerbit : Proyek IDSNI
Pencetak : CV. Tumaritis

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku-buku hasil kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah budaya luhur bangsa.

Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, namun dapat dipakai sebagai bahan bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian akan dapat memperluas cakrawala budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa.

Akhirnya saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan proyek ini.

Jakarta, Nopember 1991

Direktur Jenderal Kebudayaan



Drs. GBPH. Poeger
NIP. 130 204 562

PENGANTAR CETAKAN KEDUA

Buku Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sumatera Utara ini merupakan salah satu hasil pelaksanaan kegiatan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984. Proyek tersebut menerbitkannya pada tahun 1983 sebagai cetakan pertama.

Buku ini memuat uraian mengenai perjuangan rakyat Sumatera Utara dalam usahanya untuk menentang sistem imperialisme dan kolonialisme bangsa asing, baik berupa perlawanan fisik maupun non-fisik yang mereka lakukan pada masa pergerakan nasional. Pengalaman-pengalaman mereka itu merupakan modal yang sangat berharga dalam usahanya untuk mengujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

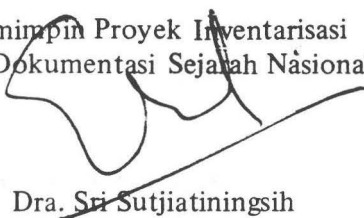
Berkaitan dengan kandungan isi buku ini, masyarakat luas terutama kalangan masyarakat "butuh baca" sangat berminat untuk memilikinya. Sementara itu persediaan buku cetakan pertama telah habis disebarluaskan secara instansional.

Untuk memenuhi permintaan tersebut, pimpinan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional memberikan kepercayaan pada Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional untuk melakukan penyempurnaan, perbanyakan, dan penyebarluasan buku ini kepada masyarakat dengan jangkauan lebih luas.

Terbitan ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kesejarahan dan memberikan informasi memadai bagi masyarakat peminatnya serta memberi petunjuk bagi kajian selanjutnya.

Jakarta, Nopember 1991

Pemimpin Proyek Inventarisasi
dan Dokumentasi Sejarah Nasional

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dra. Sri Sutjiatiningsih', written over the printed name.

Dra. Sri Sutjiatiningsih

DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan	iii
Pengantar Cetakan Kedua	v
Daftar Isi	vii
Pendahuluan	1
 Bab I Daerah Sumatera Utara	 4
1.1 Keadaan Geografi	4
1.2 Sosial Budaya	7
1.3 Sosial Ekonomi	12
1.4 Penduduk	16
1.5 Migrasi Bangsa Cina ke Sumatera Utara	19
 Bab II Penjajahan Asing di Sumatera Utara	 23
2.1 Keadaan Sosial Ekonomi Sebelum Abad Ke- 18 . .	23
2.1.1 Keadaan Masyarakat	24
2.1.2 Jalur Perdagangan	25
2.1.3 Penguasa-penguasa di Sumatera Utara	27
2.2 Perebutan Negara-Negara Eropa di Sumatera Utara	29

2.2.1	Penanaman Kekuasaan Inggris di Asia	30
2.2.2	Penanaman Kekuasaan Belanda di Asia	32
2.2.3	Persaingan Inggris dan Belanda untuk menguasai Sumatera Utara	33
2.3	Penjajahan Belanda di Sumatera Utara	40
2.3.1	Penguasaan Pantai Barat Sumatera Utara	40
2.3.2	Penguasaan Belanda atas Daerah Tapanuli	45
2.3.3	Penguasaan Belanda atas Wilayah Sumatera Timur	50
2.4	Masa Pendudukan Jepang	55
 Bab III Perlawanan Terhadap Penjajahan Asing di Sumatera Utara		 58
3.1	Latar Belakang Perlawanan	58
3.2	Ujud Perlawanan	63
3.3	Jalannya Perlawanan	65
3.3.1	Periode 1900 -- 1907	65
3.3.1.1	Perlawanan terhadap Belanda di Nias	65
3.3.1.2	Perlawanan terhadap Belanda di Daerah Pesisir Pantai Barat	67
3.3.1.3	Perang Sisingamangaraja (1872 -- 1907)	71
3.3.1.4	Perlawanan Rakyat Sumatera Timur Menentang Kolonialisme Belanda	75
3.3.2	Periode 1907 -- 1945	86
3.3.2.1	Hatopan Kristen Batak	87
3.3.2.2	Perlawanan terhadap Kolonialisme Belanda melalui saluran Pendidikan	90
3.3.2.3	Pergerakan Nasional Sumatera Utara	93
3.3.2.4	Perlawanan terhadap Jepang	00
 Bab IV Kesimpulan		 108
Daftar Pustaka		115
Daftar Informan		118

PENDAHULUAN

Tujuan Penelitian

Naskah "Sejarah Perlawanan terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Daerah Sumatera Utara" disusun dalam rangka pelaksanaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional tahun kerja 1981/1982.

Inventarisasi dan dokumentasi sejarah nasional ini merupakan tindak lanjut dari kebijaksanaan pemerintah dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya. Inventarisasi dan dokumentasi sejarah perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme sejak masuknya orang "Barat" di Indonesia perlu dilaksanakan agar semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia semakin tumbuh dan berkembang serta berkesinambungan sampai masa yang akan datang.

Secara khusus Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Perlawanan terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di daerah Sumatera Utara bertujuan:

1. menginventarisasi dan mendokumentasi peristiwa sejarah di Indonesia, khususnya di daerah Sumatera Utara,
2. memperoleh serta mengumpulkan bahan penulisan Sejarah Nasional yang akan dilakukan pada masa yang akan datang,
3. menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya kesinambungan sejarah dalam rangka pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Masalah

Sejarah Nasional khususnya mengenai perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme di daerah Sumatera Utara, belum pernah diungkapkan atau disusun secara lengkap dan sistematis. Jadi masih terasa sekali kekurangan bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijaksanaan kebudayaan.

Sejarah Perlawanan terhadap Kolonialisme dan Imperialisme hingga sekarang masih kurang, baik kuantitas maupun kualitas di samping masih tertumpuk di daerah-daerah tertentu. Inventarisasi yang ada, selama ini ada hanya dilakukan Belanda sehingga jalannya sejarah terkadang sangat berbeda sekali dengan keadaan sebenarnya. Hal ini terjadi karena Belanda menullis untuk kepentingan penjajahan. Karena itu, pengalaman daerah-daerah yang berbeda-beda perlu segera diungkapkan dan disusun secara sistematis sehingga gambaran Sejarah Nasional dapat dibuat secara utuh dan terpadu. Dengan demikian warna dan gerak perlawanan di Sumatera sejak masuknya orang asing dapat diketahui, dimengerti, dan dihayati masyarakat Indonesia sebagai peristiwa yang tak terpisahkan dari Tanah Air Indonesia.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Perlawanan terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di daerah Sumatera Utara meliputi waktu perlawanan dan lokasi perlawanan. Dalam hal ini, yang menjadi fokus penulisan adalah masa sejak perlawanan terhadap orang asing khususnya Belanda dan Jepang. Perlu dijelaskan bahwa perlawanan dalam penulisan ini mencakup perlawanan fisik maupun non-fisik. Dalam hal ini Sumatera Utara juga melakukan hubungan kerjasama dengan daerah-daerah yang berdekatan untuk mengusir imperialisme dan kolonialisme, misalnya dengan Aceh maupun Sumatera Barat.

Pertanggungjawaban Ilmiah Prosedur Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan hasil inventarisasi dan dokumentasi Sejarah Perlawanan terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di daerah Sumatera Utara, tim penyusun berpegang teguh pada metodologi sejarah. Pertama, dilakukan penelitian

kepuustakaan baik perpustakaan umum maupun perpustakaan pribadi. Kemudian bahan penelitian yang berupa buku-buku, majalah majalah, brosur-brosur, arsip-arsip daerah, dan lain-lain dicatat dan bila mungkin dikumpulkan. Kedua, dilakukan penelitian lapangan di daerah Sumatera Utara, sedangkan sejarah lisan diperoleh dari orang-orang tua yang sudah berusia lanjut yang pernah mendapatkan sejarah tersebut dari tokoh atau orang yang terlibat langsung dengan peristiwa perlawanan terhadap kaum penjajah.

Secara singkat, metode yang dipergunakan tim antara lain meliputi metode kepuustakaan, metode lapangan (kancah), dan metode wawancara (*oral history*). Untuk mendapatkan kebenaran dan kejernihan data dan informasi yang telah terkumpul, digunakan juga kritik sumber. Kritik sumber ini berguna antara lain untuk:

1. menguji data yang berasal dari dokumen tertulis dengan hasil wawancara atau penelitian lapangan,
2. menguji sumber lisan dengan sumber lain yang diduga lebih dapat menguatkan kebenaran data, dan
3. menguji kualitas sumber.

Dalam mengelola data maupun informasi yang telah terkumpul, seleksi terus berlangsung untuk menghindari dimasukkannya hal-hal yang tidak relevan dengan ruang lingkup maupun tujuan penelitian/penulisan. Dengan demikian penulisan naskah ini diharapkan dapat memuat keterangan dan sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

BAB I DAERAH SUMATERA UTARA

1.1 Keadaan Geografi

Daerah Sumatera Utara sekarang meliputi Sumatera Timur, (Langkat, Deli Serdang, Asahan, Labuhan Batu), Tanah Karo, Simalungun, Tapanuli (Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan dan Nias).

Pada mulanya Propinsi Aceh sekarang termasuk Daerah Sumatera Utara. Sejak tahun 1961 Aceh menjadi satu propinsi dengan nama Daerah Istimewa Aceh.

Daerah ini terletak di daerah tropis antara 1° -- 4° Lintang Utara dan 98° -- 100° Bujur Timur. Di sebelah utara berbatasan dengan Daerah Istimewa Aceh, di sebelah selatan berbatasan dengan Sumatera Barat/Riau, di sebelah timur berbatasan dengan Selat Sumatera, dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Indonesia.

Luas wilayahnya 70.787 kilometer persegi atau sama dengan 3,72% dari luas seluruh Indonesia. Secara geologis Sumatera Utara termasuk gugusan pulau-pulau Sunda Besar dalam rangkaian Pegunungan Mediterrance. Daerah pantai timur adalah dataran rendah yang luas dan banyak mengandung minyak bumi. Daerah pedalaman (atau bagian tengah) terdiri atas dataran tinggi dan tanah berkit-bukit dengan hutan lebat dalam rangkaian Pegunungan Bukit Barisan yang bersifat vulkanis. Beberapa puncak gunungnya berketinggian antara 2000 -- 2400 meter diatas permukaan laut.

Beberapa di antaranya dapat disebutkan: Gunung Sibayak 2170 m, Sinabung 2400 m, Sibuatén 2375 m, Pusuk Bubit 2003 m, Simanuk-manuk 2330 m, Surungan 2100 m, Martimbang 1680 m, Saut 1804 m, Sibual-buali 1819 m, Lubuk Raya 1990 m, Malea 2014 m, Sorik Marapai 2172 m. Beberapa diantaranya masih berapi dan sebagian besar telah padam. Di antara gunung-gunung tersebut antara lain: Tanah Tinggi Karo, Lembah, Toba Holbung, Dataran Tinggi Humbang, Lembah Silindung, Lembah Pahae, Sipirok, Angkola, Padang Lawas dan Mandailing. Di bagian barat terdapat dataran rendah yang sempit. Pembentukan dataran rendah yang luas dibagian timur itu didukung oleh beberapa faktor antara lain, sungai-sungai yang bermuara di pantai timur banyak membawa lumpur dari pergunungan, Selat Sumatera dangkal, dan lautnya tenang.

Karena pegunungan Bukit Barisan bersifat vulkanis maka Dataran Tinggi Toba, Tanah Karo, dan Mandailing dapat ditanami buah-buahan, kopi, sayur-sayuran, dan padi.

Daerah Sumatera Utara kaya dengan bahan tambang, seperti: minyak tanah, batubara, timah/seng, emas, tembaga, belerang, batu kapur dan lain-lain. Di kawasan Sumatera Utara terdapat kurang-lebih 71 buah sungai (besar dan kecil), di antaranya 23 buah yang bermuara di pantai timur, sebagian bermuara ke pantai barat, kurang lebih 14 buah sungai. Selebihnya terdapat di Pulau Nias. Beberapa di antaranya dapat dilayari sampai ke pedalaman antara 25 sampai 255 kilometer dari pantai, misalnya Sungai Barumon di Labuhan Batu, tetapi belakangan ini, akibat penebangan hutan yang sembarangan, sebagian besar dasar sungai semakin dangkal sehingga tak dapat dilayari lagi.

Satu anugerah atau pemberian alam kepada masyarakat Sumatera Utara ialah adanya sebuah danau yang besar di punggung Bukit Barisan. Danau ini terkenal dengan nama Tao (Danau Toba) yang sekaligus berfungsi sebagai jalur lalu-lintas antarkota di sekitarnya, perikanan, tempat rekreasi baik domestik maupun dari luar negeri, dan tempat menyimpan air untuk sungai serta air terjun. Daerah sekitar danau ini rata-rata berhawa sejuk yang baik sekali untuk tempat istirahat. Hal ini akan jelas nampak pada letak be-

berapa kota antara lain: Kabanjahe (1208 m) di atas permukaan laut, Parapat (920 m), Sidamanik (1000 m), Seribudolok 1418 m, Tarutung 1976 m, Siborong-borong 1320 m, dan Sidikalang 1066 m.

Kota-kota lainnya kebanyakan berada di bawah 500 m, antara lain: Medan (14 m) P. Siantar (400 m), Tanjung Balai (0 m), Binjai (28 m), P. Berandan (4 m), dan P. Sidempuan (283 m). Kenyataannya temperatur di daerah Sumatera Utara rata-rata tinggi, yakni $32,6^{\circ}$ per bulan. Curah hujan cukup banyak antara 2000 hingga 3000 milimeter per tahun. Karena kawasannya berada di daerah tropis, maka sinar matahari terus nampak terang, rata-rata antara 30% hingga 67% per bulan. Kabut hanya terdapat di beberapa tempat yang tingginya berada lebih dari 1000 m di atas permukaan laut.

Kecepatan angin minimum rata-rata 7 -- 11 m, perjam/maksimum 20 -- 30 kilometer per jam. Salah satu angin bertiup panas terdapat di Kabupaten Langkat, yaitu angin bohorok yang sering merusak tanaman tembakau di Deli.

Sebagai akibat banyaknya sungai, di dataran rendah terdapat endapan laut dan sungai, sedangkan pada bagian bukit dan gunung terdapat tanah batuan beku yang berasal dari gunung berapi di sekitarnya. Karena curah hujan yang banyak sepanjang tahun, maka flora di daerah ini lebat antara lain berupa hutan, padang rumput, dan rawa-rawa. Hasil hutan yang terpenting meliputi meranti, damar laut, merbau, kapur-sampinur, dan lain-lain. Berbagai jenis kayu terdapat di hutan primer, hutan sekunder, hutan rawa, padang rumput, hutan cadangan, hutan produksi, dan hutan lindung. Di dalam hutan itu terdapat berbagai jenis binatang liar yang makin lama semakin langka jumlahnya sehingga perlu dilindungi dari kemusnahan. Dunia fauna meliputi gajah, badak, mawas, gibbon, kambing hutan, tenggiling, siamang, burung enggang, rusa, kijang, monyet, kancil, harimau, beruang, tapir dan lain-lain. Jumlah fauna tersebut semakin langka karena adanya perburuan secara liar untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

1.2. Sosial Budaya

Di daerah Sumatera Utara berlaku hukum adat baik di kalangan suku bangsa Batak maupun suku bangsa Melayu. Masyarakat Batak menuruti garis bapak (partilineal). Setiap orang Batak memiliki marga. Turunannya memakai marga ayahnya. Sesuai dengan sistem adat turun-temurun, perkawinan antar-marga dilarang. Setiap marga tertentu menjadi inti pada kampung tertentu yang disebut marga tanah. Golongan pendatang di kampung itu mendapat tanah karena menjadi menantu di tempat. Seorang perempuan yang kawin, praktis masuk marga suaminya. Antara laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan hak warisan. Umumnya laki-laki yang hendak mewarisi tanah, rumah dan pusaka sedang perempuan tidak, tetapi kepada perempuan juga diberikan berupa benda tidak bergerak atau benda bergerak yang disebut *pauseang*. Jika *pauseang* itu berupa tanah, maka tanah itu akan kembali kepada pihak saudara laki-lakinya kalau hubungan kekeluargaan mereka tidak terus berlanjut; dengan kata lain, jika tak satu pun di antara cucu (laki-laki) yang kawin dengan cucu (perempuan) dari saudara laki-lakinya maka benda *pauseang* tadi akan ditarik kembali oleh pemilik semula. Masyarakat Batak (Toba, Karo, Simalungun, Pakpak/Dairi dan Angkola Mandailing) dibagi atas golongan fungsional yaitu: *dongan sabutuha*, *boru* dan *hula-hula*. Ketiga golongan fungsional ini disebut *Dalihan Na Tolu*. Golongan *hula-hula* adalah kelompok pemberi anak gadis, sedangkan golongan *sabutuha* adalah kelompok satu marga. Jika masyarakat terlibat dalam acara adat, maka golongan *boru* lah yang berfungsi untuk bertugas merampungkan acara itu sampai selesai. Golongan *hula-hula* tinggal mengatur, **sedangkan golongan sabutuha** dapat memberi bantuan berupa tenaga atau uang.

Kedudukan *hula-hula* dalam kehidupan masyarakat Batak tinggi dan terhormat. Jika tugas *boru* dilaksanakan dengan baik, mereka akan mendapatkan keberuntungan, tetapi sebaliknya jika mereka melalaikan tugas-tugasnya akan mendapatkan malapetaka.

Di kalangan masyarakat Melayu Langkat, hal serupa juga ada tetapi tata pelaksanaannya sudah lebih renggang. Golongan fungsional di sini disebut *puang*, *anak beru*, dan *ahli famili*, tetapi bu-

kan berarti mereka tidak mengenal adat. Orang Melayu sangat bangga dengan kebudayaannya. Bagi mereka, hidup tanpa budaya berarti hidup tanpa arti. Mereka mengajar anak-anaknya dengan budi bahasa melalui pepatah-pepitihi antara lain, "Budi bahasa tak diperjualbelikan" dan "orang berbudi, kita berbahasa". Kebudayaan Melayu mengajarkan agar setiap orang memiliki perasaan belas kasihan dan bersimpati terhadap orang-orang yang lebih rendah status sosialnya, saling bahu-membahu dan bekerjasama dengan orang-orang yang sederajat, serta bersikap saling menghormati terhadap orang-orang yang status sosialnya lebih tinggi. Sesungguhnya suku bangsa Melayu itu rajin. Di saat-saat perniagaan diadakan, mereka dapat kembali bersikap tegar. Mereka tidak dapat menerima penghinaan, mudah tersinggung, dan tidak senang untuk waktu yang lama. Jika dihina, bisa balas dendam, jika diperlakukan baik dan keyakinannya kokoh, mereka jadi tulus ikhlas setia dan dapat dipercaya. Pada hakekatnya kebudayaan Melayu terikat benar dengan kebudayaannya. Jika mereka sedang berada di rumah mereka selalu pakai kain sarung (terutama kain pelekat). Bila masuk rumah, sepatu dan sandal (terumpah) dibuka lalu diletakkannya di depan pintu. Orang Melayu umumnya (termasuk suku bangsa Batak dan Nias) makan dengan tangan dan berjalan-jalan di sekitar rumahnya suka sekali memakai terumpah.

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan, menyusul adat kebiasaan. Jadi, bagi orang luar (asing) tidak akan mengenal orang Melayu kalau tidak mengenal adatnya. Orang Melayu berpegang teguh kepada adatnya. Hal itu tercermin dari pepatah-pepatah berikut. "Biar mati anak, jangan mati adat" dan "Mati di kandang tanah, hidup di kandung adat". Hal ini nampak pada upacara lenggang perut di mana kandungan wanita baru mulai pada minggu-minggu pertama, terutama pada kandungan pertama kali. Ketika anak lahir (setelah berumur 7 hari), diadakan adat cukur rambut. Pada waktu anak mulai berjalan, diadakan adat turun tanah, yaitu saat pertama kali anak itu memijakkan kaki ke bumi atau tanah.

Kenyataannya, mulai dari lahir hingga dewasa, sampai tua, orang Melayu diawasi oleh adat. Hukum adat yang terpenting ada-

lah adat *perpatih* dan adat *temenggung*. Adat *perpatih* serupa dengan adat Minangkabau yang matrilineal, sedang adat *temenggung* serupa dengan adat Jawa yang parental.

Sebagai akibat perubahan waktu dan zaman, adat Melayu seperti adat Batak dan suku bangsa lainnya, semakin lama semakin berkurang dilaksanakan terutama disebabkan pengaruh kehidupan kota.

Masyarakat Nias terikat kepada keluarga besar yang berasal dari satu leluhurnya yang disebut *mado-mado* (bersifat patrilineal) yang sama artinya dengan "marga" di kalangan suku bangsa Batak. Dahulu perkawinan antarmarga terlarang, tetapi belakangan ini dapat berlangsung setelah melalui lima sampai sepuluh generasi berikutnya. Dengan kata lain laki-laki *marga Zega* dapat kawin dengan perempuan *beru Zega* setelah lima generasi berselang. Seperti umumnya yang berlaku di kalangan orang Batak, setelah seseorang mempunyai anak, maka nama kecilnya tak boleh dipanggil lagi; cukup dengan menyebut nama *anu* (nama anaknya) atau *ina anu* (nama anaknya). Beberapa hal dalam adat Nias yang masih mengikat sampai saat ini ialah uang mahar yang terlalu tinggi. Selain itu ikatan adat masih melarang seorang gadis berbicara dengan seorang pemuda. Kehidupan masyarakat Nias benar-benar masih didominasi oleh adat.

Suku Melayu mendiami desa pantai atau tepi sungai, sedangkan suku bangsa Batak mendiami desa pedalaman. Tempat tinggal suku bangsa Melayu disebut kampung atau dusun, sedangkan suku bangsa Batak mendiami *huta* atau *kuta*. Tempat itu di Nias disebut *banua*.

Di Sumatera Timur khususnya di kalangan masyarakat Melayu, beberapa kampung atau dusun (desa) tergabung menjadi satu *kejeruan*. Beberapa *kejeruan* bergabung dalam satu kerajaan yang dipimpin oleh *orang besar berempat* atau dikenal dengan istilah *datuk empat suku*. Orang-orang besar ini disebut Dewan Kerajaan atau Dewan Menteri yang diketuai oleh bendahara (menteri utama).

Masing-masing orang besar berempat atau datuk empat suku ini mempunyai bawahan yang jumlahnya bergantung kepada luas

daerah yang diwakilinya sehingga ada *menteri delapan, menteri enambelas dan menteri tigapuluh dua*. Setiap orang besar berempat ini (mewakili raja atau sultan di daerahnya) masing-masing mempunyai gelar yang sesuai dengan kedudukannya dalam kerajaan/kesultanan. Gelar itu secara berturut-turut mulai dari kedudukan teratas hingga terendah adalah: paduka, seri, maha, dan raja. Dengan demikian maka ada sebutan: Bendahara Paduka Seri Maharaja, Seri Maharaja, Paduka Mahamenteri dan Paduka Raja atau Datuk Paduka Setia Maharja, Tengku Seri Maharaja Datuk Mahamenteri, dan Datuk Paduka Raja.¹⁾

Keadaan di kalangan masyarakat Batak lain lagi. Beberapa huta atau kuta tergabung dalam satu *horja*, beberapa horja tergabung dalam satu *bius*. Beberapa bius kecil tergabung dalam satu bius induk.²⁾ Setiap bius induk dipimpin oleh *raja berempat*. Berbeda dengan *datuk berempat suku*, kedudukan raja berempat ini sama tingginya. Dalam setiap kegiatan *asean taon* (kerja tahun) yang dilakukan hampir setiap tahun maka Raja Berempat bertugas mengarahkan seluruh anggota masyarakat demi kepentingan dan keselamatan bersama. Sesungguhnya upacara aseau taon (kerja tahun = pesta panen) tak lain dari pemujaan atau permohonan kepada *debata (malajadi nabolon)*, sebagai ucapan terima kasih atau permintaan agar tanam-tanaman berubah, ternak berkembang biak dan manusia selamat sejahtera. Setiap bius kecil dipimpin oleh raja-raja bius yang mempunyai staf antara empat hingga 32 orang, sehingga ada sebutan: Raja Naopat, Raja Naualu, Raja Masampulu Dua, Raja Nasampulu Onom dan Raja Natolupulu Dua. Hal ini tidak jauh berbeda dengan keadaan di kalangan masyarakat Melayu. Angka dasarnya adalah empat yang bervariasi menjadi delapan, duabelas, enambelas, dan tigapuluh dua. Sebagai contoh, Raja Berempat di Bius *godang* (induk) Balige terdiri atas Pande Na Bolon, Pande Raja, Pande Mulia, Pande Namora.

Mereka ini yang menjadi pimpinan bius pada upacara kegiatan agama. Kemudian ada juga fungsi *saniangnaga, parsinabul, parsirambe, dan namburbulang*. Mereka ini adalah *paidua* (adik) dari Raja Berempat di atas yang digelar Raja Naualu sebagai pimpinan horja dan kawasannya. Di samping itu masih ada fungsi

pengerah massa dan keamanan yang terdiri atas *undotsolu*, *panguluraja*, *pande aek* dan *panguluHUDALU* yang digelar Raja Nasam-puludua, tetapi di luar raja-raja bius tersebut di atas masih ada lagi fungsionaris : Raja Parbaringin, Datu Bolon dan Sibaso Bolon.³)

Sampai masuknya imperialisme di Sumatera Utara, pendidikan berlangsung secara informal dalam kehidupan sehari-hari baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat desa. Pengetahuan sopan-santun, adat-istiadat, dan kepercayaan diwariskan kepada generasi penerus melalui pergaulan dan pertemuan mengenai kepercayaan. Mulai dari cara bertani, berladang, berternak, meramu, berbicara, bercerita, dan *mandon* dalam berbagai upacara kepercayaan, membangun rumah, dan keterampilan lainnya dalam kehidupan sehari-hari, diwariskan secara tidak langsung kepada generasi penerus. Bila keadaan terpaksa, seorang laki-laki harus berumah tangga meskipun umurnya masih muda. Untuk mematangkan dirinya, yang bersangkutan harus pergi merantau untuk mencari pengalaman. Kepergiannya merantau dianggapnya sebagai suatu sekolah untuk mendapatkan bekal tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.

Seorang datuk atau pawang sangat berperan dalam kehidupan suku bangsa Melayu. Datuk atau pawanglah yang menjadi tempat bertanya untuk menetapkan hari-hari baik atau buruk. Datuk atau pawanglah yang menetapkan pelaksanaan acara turun ke tanah, memasuki rumah baru, dan pelaksanaan acara menjamu laut agar masyarakat selamat dan hasil ikan lebih banyak. Datuk atau pawanglah yang menentukan pantangan-pantangan dan *tabu* yang sekali-kali tak boleh dilanggar anggota masyarakat. Segala tindakan atau perbuatan yang mengikuti petunjuk datuk atau pawang akan membawa keselamatan dan berkat bagi masyarakat. Sebaliknya jika pantangan atau *tabu* dilanggar seseorang, maka malapetaka atau *bala*, akan menimpa masyarakat banyak.

Di daerah pedalaman (di kalangan suku bangsa Batak) terdapat juga hal yang demikian itu. Baik turun ke sawah maupun turun ke air, dilaksanakan menurut petunjuknya. Waktu meramu bahan rumah, mendirikan rumah, memasuki rumah baru, upacara kelahiran hingga mengubur orang mati dan lain-lain tetap berkaitan dengan kepercayaan dan adat istiadat yang dilaksanakan secara

turun-temurun. Jika seseorang telah berumahtangga, yang bersangkutan telah dianggap dewasa walaupun psikologis masih remaja. Tingkat kehidupan seseorang dalam masyarakat ditentukan pula oleh umur, jumlah turunan, harta kekayaan, dan kharisma.

Masuknya Agama Islam membuat kedudukan datuk atau pawang semakin merosot di hati anggota masyarakat. Sedikit demi sedikit kedudukan mereka digantikan oleh para ulama karena agama dan ilmu pengetahuan diajarkan melalui pengajian. Demikian juga setelah masuknya Agama Kristen di pedalaman Sumatera Utara, kedudukan datuk semakin berkurang, karena para pendeta berusaha selain mendirikan gereja untuk tempat beribadah, juga membangun rumah sekolah dan rumah sakit atau balai pengobatan. Sebaliknya, baik Agama Islam maupun Agama Kristen mengikatkan nilai-nilai tradisional satu demi satu semakin hilang dari tata kehidupan sehari-hari, karena setiap acara yang bertalian dengan kebiasaan dan adat tradisional ataupun alat musik tradisional dicap sebagai perbuatan animis (*pelbegu*) dan dilarang oleh agama. Pendidikan secara "Barat" di Sumatera (abad ke- 19) dimulai dari Tapanuli Selatan, kemudian barulah ke Tapanuli Utara dan akhirnya di perkebunan-perkebunan Sumatera Timur. Akhirnya baik keluarga raja maupun keluarga sultan, pimpinan kejeruan, dan bius (desa) satu demi satu jatuh ke dalam pengaruh imperialisme. Beberapa orang pribumi yang telah berpendidikan dan dekat hubungannya dengan Belanda, diangkat menjadi pegawai pemerintah pada waktu itu. Mereka ikut melaksanakan pemerintahan kolonial di daerah masing-masing. Hal itu berlaku untuk seluruh daerah Sumatera Utara.

Tetapi ada juga satu atau dua orang yang berusaha mendirikan sekolah sendiri yang bersifat nasional. Malah terbit pula buku-buku yang menentang imperialisme secara tak langsung.

1.3. Sosial Ekonomi

Secara sepintas dalam uraian terdahulu telah disinggung sedikit tentang keadaan perekonomian Daerah Sumatera Utara. Ditinjau dari letaknya, Daerah Sumatera Utara sangat menguntungkan karena:

- 1) Berfungsi sebagai penghubung antara Daerah Istimewa Aceh dengan Sumatera Barat/Riau baik hubungan udara, darat maupun laut,
- 2) Berfungsi sebagai penghubung pantai timur (Belawan) dengan pantai barat (Sibolga).
- 3) Kedua pelabuhan tersebut dapat disinggahi kapal-kapal besar (dari dalam dan luar negeri), dan
- 4) Sumatera Utara kaya akan hasil hutan, tambang dan perkebunan dengan Kota Medan sebagai pusat perdagangan.

Semua itu didukung oleh berbagai faktor, antara lain pantai timur Sumatera Utara yang kaya dengan tambang minyak bumi. Dataran rendahnya luas dan dapat dijadikan perkebunan besar, sedangkan bagian bukit dan dataran tinggi dapat ditanami sayur-sayuran, buah-buahan, padi, kopi, dan lain-lain.

Setelah Anderson (Orang Inggris) mengunjungi pantai timur Sumatera tahun 1822, ia melaporkan pada atasannya, bahwa Deli adalah daerah subur. Waktu itu lada dan tembakau diekspor ke Penang, sedangkan padi, tebu, kapas, jagung, dan lain-lain ditanam sekedar untuk kebutuhan sendiri. Di samping itu ada juga tanaman enau dan pinang. Pada masa itu binatang gajah dan badak sering mengganggu pertanian, tetapi sebaliknya gading gajah menjadi bahan ekspor yang bernilai tinggi.

Karena masyarakatnya makmur, maka kampung-kampung mempunyai rumah-rumah besar dan bagus. Kampung-kampung itu dibuat berpagar bambu dan dikelilingi tanaman buah-buahan. Di sana-sini terlihat ternak ayam dan kambing. Rata-rata kehidupan rakyat Melayu Deli lebih maju dari pelabuhan-pelabuhan lainnya di pantai timur. Sebagai contoh ekspor Deli ke Penang tahun 1822 berjumlah 26.000 pikul lada sehingga sultan berpendapatan 4500 ringgit burung (rial) Spanyol.⁴⁾

Sementara itu hubungan dengan Sunggal jadi retak karena barang ekspornya menjadi sumber cukai bagi Deli. Sebaliknya kehidupan masyarakat di Serdang lebih segar dibandingkan dengan Deli, bahkan di pelabuhan banyak tongkang penuh berisi lada yang siap untuk diekspor. Kehidupan di Langkat tidak jauh berbe-

da dengan kehidupan di Deli. Mereka mengekspor hasil hutan, hasil bumi, dan emas dengan tongkang atau perahu ke Penang, Malaka dan antarpantai. Barang ekspor terdiri atas lada, rotan, lilin, buah-buahan hutan, gambir, emas, gading, tembakau, dan beras. Baik lada maupun kayu dari Langkat terkenal baik mutunya. Hasil kayu dari Langkat antara lain: merbau-medang, cempedak, bingai, dan lain-lain dapat dijadikan bahan pembuat tongkang atau perahu dalam ukuran dua sampai tigapuluh ton. Barang-barang yang diimpor terdiri atas: garam, bahan/cita, sarung bugis, songket, batu-bara, sutera Aceh dan pakaian jadi. Menurut laporan Anderson, pada masa itu ekspor lada dari Langkat mencapai 20.000 pikul setahun dengan mutu baik. Raja Langkat berpenghasilan minimal 3.000 dollar setahun.⁵⁾

Sementara orang-orang Batubara hidup dari bertanam kelapa, menjadi nelayan atau pelaut. Banyak dari mereka menjadi nahkoda di pantai dari Deli hingga Asahan. Di sana pun terdapat banyak perahu dan tongkang yang siap melayani barang-barang ekspor.

Menurut Netscher, hingga Agustus 1862 kehidupan ekonomi Deli dalam hubungan dengan Semenanjung menunjukkan angka-angka ekspor selama 12 bulan yaitu ekspor lada (8300 pikul), rotan (2000 ikat) dari 100 biji, 200 ekor kuda, 500 pikul pinang, 300 pikul pala, 500 pikul tembakau, 500 pikul lilin, 250 pikul wajan dan 400 pasang gading gajah⁶⁾ Waktu itu harga pasaran tembakau dua ringgit burung sepikul. Jelasnya, daerah Deli yang tanahnya subur memberi kemakmuran bagi rakyat maupun pengusaha perkebunan waktu itu.

Umumnya, 40 tahun sebelum laporan Anderson, rakyat Sumatera Timur hidup makmur dari hasil pertanian. Hal itu dimungkinkan oleh keadaan tanah yang memiliki tanah endapan laut dan sungai yang dapat diolah menjadi pertanian dan perkebunan. Batuan beku misalnya, dapat diolah meenjadi tanah tegallan, wawah, dan perkebunan. Tanah endapan kapur dapat diolah menjadi peerkebunan kelapa dan karet. Ini semua terdapat di dataran rendah, khususnya di pantai timur Sumatera Utara.

Dataran tinggi diolah menjadi perladangan, persawahan, dan

perkebunan untuk tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, kopi, padi, dan kapas. Tahun 1841 Tanah Batak terkenal karena kopi. Sejak itu pulalah Tapanuli Selatan wajib menanam kopi hingga 1918. Hasil hutan lainnya dari dataran tinggi dan Pegunungan Bukit Barisan meliputi: rotan, damar, kemenyan, kapur barus dan beberapa jenis pohon hutan yang bermutu. Laut-laut di sekitar Sumatera Utara kaya akan ikan. Karena hasil-hasil yang banyak dan bermacam ragam itulah, maka Daerah Sumatera Utara sangat penting dilihat dari segi ekonmis. Hubungan perdagangan antara pesisir dengan pedalaman dilakukan melalui sungai, jalan kaki, dan kuda beban. Hasil bumi dan hasil hutan dibawa ke pesisir dan sebaliknya garam, ikan asin, kain, dan lain-lain dibawa ke pedalaman. Tahun 1862 ada seorang Arab kelahiran Surabaya bernama Sayid Abdullah menghubungi orang-orang Eropa di Batavia agar mau berusaha menanam tembakau di Deli. Setahun kemudian (1863) Jacobus Nienhuys tiba di Deli. Tanahh diperolehnya secara percobaan. Hasilnya tidak seimbang dengan modal dan tenaga yang dikeluarkan, tetapi tahun berikutnya Nienhuys berhasil mengekspor 50 bal tembakau dengan nilai 48 seper $\frac{1}{2}$ kilo tembakau. Sejak itu keuntungan mereka meningkat 100 persen pada tahun 1868 dan 200 persen pada tahun 1769. Tetapi kemudian timbul masalah baru. Mereka kewalahan tentang kurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan; semula diperkirakan 88 orang tenaga kerja Tionghoa dan 23 orang Melayu buruh harian.

Untuk mengatasi masalah tenaga kerja itu, buruh Tionghoa dimasukkan dari Semenanjung melalui perantara (makelar). Dalam pada itu perkebunan Nienhuys (*Deli Myi*) semakin luas sehingga semua tanah milik petani Deli, Serdang, dan Langkat menjadi areal perkebunan terus meningkat. Hal itu dapat dilihat dari catatan ekspor tembakau, tahun 1867 m: 210 bal, tahun 1868 menjadi 890 bal, tahun 1869 1381 bal, tahun 1870 3922 bal, dan tahun 1872 6409 bal.⁷⁾

Karena pertumbuhan tenaga terus meningkat maka sejak tahun 1900 telah ada 14.151 orang Jawa yang bekerja sebagai kuli kontrak di Deli di samping 30.647 orang Timur Asing. Kehidupan mereka rata-rata sederhana sekali dengan gaji tiga atau empat

dollar sebulan.⁸⁾ Dengan kata lain, selama 60 tahun *Poenale Sanctie* (sejak 1872) buruh perkebunan di Sumatera Timur sangat menderita di tengah-tengah sultan dan perusahaan asing yang hidupnya makmur.

1.4 Penduduk

Penduduk Sumatera Utara pada dasarnya adalah suku bangsa Melayu, yaitu Melayu Tua dan Melayu Muda. Suku bangsa Batak termasuk Melayu Tua meliputi Toba, Karo, Simalungun, Pakpak/Dairi dan Angkola Mandailing. Suku bangsa Melayu Muda lebih umum dikenal sebagai suku bangsa Melayu yang mendiami Sumatera Timur. Suku bangsa Nias tersendiri, karena letaknya yang terpisah dari daratan Sumatera Utara. Kebanyakan penduduk pesisir Sumatera Timur adalah suku-suku bangsa Talang, Sakai, Akat, Rawa dan orang Utan. Orang Talang adalah orang-orang Jawa yang datang mengembara dan menduduki sebagian Tanah Jawa dan Batu Kihini di Pasir Mandoge. Kepala orang itu disebut patih, tetapi kemudian mereka diusir oleh orang-orang Batak yang datang dari Samosir. Orang Sakai lari ke Malaka.⁹⁾

Kemudian hari datanglah orang Bugis, Aceh, dan Minangkabau. Mereka membentuk kerajaan-kerajaan sehingga terjadi perbauran antara bahasa Batak dengan bahasa Melayu. Beberapa jumlah penduduk Sumatera Utara sebelum dan pada waktu masuknya pengaruh kolonialisme dan imperialisme tak dapat digambarkan secara pasti, tetapi dari beberapa penulis asing dapat diketahui gambaran kasar pada daerah-daerah tertentu. Menurut Anderson (dalam bentuk taksiran) penduduk Deli sejumlah 7.000 jiwa tahun 1822. Penduduk Sungai berjumlah 20.000 jiwa, penduduk Serdang ditaksir 3.000 jiwa (Melayu) dan 8.000 jiwa (suku bangsa Batak). Langkat berpenduduk 7.000 jiwa (Melayu), Stabat 1.000 jiwa, Selesai 1.400 jiwa, Bahorok 700 jiwa, dan daerah pedalaman 13.000 jiwa (suku bangsa Batak Karo). Jumlah suku bangsa Melayu (1823) yang berdomisili di sepanjang pantai Sumatera Timur (mulai dari Tamiang hingga Siak) ditaksir berjumlah 350.000 jiwa. Jumlah penduduk Tanah Karo disebutkan dengan istilah "banyak sekali" (tetapi Anderson tidak membuat notasi jumlah). Pendu-

duk Batubara berjumlah 10.000 jiwa (suku bangsa Melayu)¹⁰⁾ Penduduk Simalungun tak disebutkan, jadi tak ada perhitungan jumlah, baik yang pasti maupun dalam bentuk taksiran. Lain pula dengan keadaan penduduk di Tapanuli pada masa itu. Menurut Willem Middendorp, tahun 1880 penduduk setiap *huta* di Samosir adalah 35 jiwa. Tahun 1878 di Humbang terdapat 16 rumah setiap *huta*.¹¹⁾ Di sini tidak jelas disebutkan berapa jumlah *huta* yang ada di Tapanuli Utara, yang disebutkan hanyalah jumlah jiwa dan rumah per *huta* serta penduduk Mandailing 300 - - 400 jiwa per *huta*.¹²⁾ Keadaan ini tercatat pada tahun 1845. Jelasnya dari data-data penduduk di atas, gambaran penduduk Sumatera kurang lengkap karena penduduk Pakpak/Dairi, Labuhan Batu, dan Nias serta buruh perkebunan belum disertakan. Gambaran yang lebih lengkap tentang penduduk Sumatera Utara dapat dilihat pada *Volkstelling* 1930, IV halaman 161 - - 180. Menurut sumber ini suku bangsa Melayu berjumlah 953.397 jiwa dan suku bangsa Batak seluruhnya berjumlah 1.169.947 jiwa (tidak termasuk yang bermigrasi ke daerah lain, sebanyak 37.612 jiwa¹³⁾

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci mengenai penduduk Sumatera Utara khususnya tentang keadaan suku bangsa Batak dapat dilihat pada tabel *Enumeration of the Tapanuli and East Coast Batak in 1930*.

Enumeration of the Tapanuli and East Coast Batak in 1930

Batak Group	In Tapanuli	on East Coast	Total
Tapanuli Batak	778.197	126.425	904.623
Toba	523.524	74.139	597.663
Pakpak	19.936	197	20.133
Angkola	79.849	6.706	86.555
Mandailing	89.475	45.308	134.783
Padang Lawas	65.414	75	65.489
East Coast Batak	9.912	240.573	250.485
Karo	8.912	145.429	154.350

Simalungun	991	95.144	96.135
Other Batak	488	14.351	14.839
Total Batak	778.596	381.349	1.169.947

Source: *Volkstelling, 1930, IV, pp 162 – 163, VIII, pp 194*

Pada awal abad ke-20 banyak penduduk pindah dari Tapanuli Selatan ke Sumatera Timur. Sebagian dari mereka ditampung sebagai karyawan pada perkebunan-perkebunan di samping sebagai pegawai-pegawai Pemerintah Belanda dan kerajaan-kerajaan yang ada.

Keadaan penduduk Tapanuli Utara berbeda. Mereka sengaja diberi kesempatan pindah ke Sumatera Timur karena Pemerintah Belanda kewalahan mencukupi kebutuhan beras untuk perkebunan-perkebunan. Mereka itu ditempatkan di tanah-tanah pertanian yang dapat diairi dengan cara irigasi.

Penduduk Nias tahun 1930 berjumlah 202.400 jiwa. Jadi penduduk Sumatera (suku bangsa Melayu, Batak, dan Nias) berjumlah 2.325.744 jiwa (belum termasuk buruh perkebunan yang berasal dari Pulau Jawa dan Cina dari Semenanjung dan Tiongkok)

Pada tahun 1872, pekerja Eropa di Deli berjumlah 75 orang, kuli Tionghoa 4.000 orang, Keling dan pribumi (dari Pulau Jawa) berjumlah ratusan saja¹⁵⁾. Mereka itu bekerja pada 13 perkebunan tembakau di Deli, satu di Langkat dan satu di Serdang.

Pada awal abad ke-20, jumlah itu meningkat menjadi 14.152 orang, (suku bangsa Jawa), 30.647 orang (Timur Asing) atau dengan imigran Tionghoa 56.683 orang. Di antaranya 20.549 orang telah dipulangkan ke tempat asalnya (di Semenanjung atau Tiongkok¹⁶⁾). Itulah keadaan selama periode 1900 hingga 1901. Tahun berikutnya (1902), tenaga kerja perkebunan seluruhnya menjadi 99.568 orang. Tahun 1903 jumlah tenaga kerja (buruh) di Sumatera Timur meningkat menjadi 60.000 (Tionghoa) dan 40.000 pribumi (sebagian besar dari Jawa¹⁷⁾). Hingga tahun 1921 imigran Jawa yang bekerja di perkebunan berjumlah 49.179 orang Imigran Tionghoa 17.432 orang.¹⁸⁾

Data penduduk di atas belum jelas mana yang bekerja sebagai kuli kontrak dan berapa imigran yang bekerja sebagai tenaga kerja upahan. Gambaran yang lebih jelas dapat dilihat pada catatan perkebunan dari tahun 1926. Waktu itu kuli kontrak (Jawa) berjumlah 194.400 orang, terdiri atas 142.000 orang laki-laki dan 52.400 perempuan. Kuli Tionghoa berjumlah 27.100 orang (belum termasuk imigran¹⁹).

Menurut Parker waktu Anderson mengunjungi pantai timur Sumatera (1823), orang Cina sangat sedikit di daerah Sumatera Timur. Sebelumnya, pernah armada Cina mengunjungi Pulau Kampai di Teluk Hari dan kemungkinan mereka telah mengunjungi (Paya Pasir Kota Cina) di Labuhan Deli, demikian juga masa pemerintahan Sultan Husein (Deli). Waktu perkebunan Markubung dibuka, 88 orang kuli Tionghoa dimasukkan dari Penang hingga akhir abad ke-19. Jumlah itu meningkat menjadi 18.352 orang. Pada permulaan abad ke-20, kuli Tionghoa di Deli berjumlah 37.608 orang.

Orang Tionghoa yang bermukim di daerah Deli seluruhnya 99.236 orang, di antaranya 92.646 orang laki-laki yang umumnya mereka dimasukkan sebagai kuli kontrak.

Berdasarkan data penduduk perkebunan (dari tahun 1926) dan data penduduk asli (dari tahun 1930), penduduk Sumatera Utara pada permulaan abad ke-20 berjumlah kurang-lebih 2,5 juta orang.

1.5 Migrasi Cina ke Sumatera Utara

Sejak akhir abad ke-19, pertumbuhan perkebunan-perkebunan di Sumatera Timur sangat pesat sekali. Keadaan ini menyebabkan pihak perkebunan Belanda mengalami suatu permasalahan, yaitu masalah buruh yang sangat diperlukan untuk mengelola perkebunan yang demikian luas dan bertebaran di Deli. Untuk itu pihak perkebunan mengadakan hubungan dengan bandar Penang, karena disana banyak *cukong* yang dapat menyediakan buruh-buruh. Hal ini dilakukan karena penduduk setempat, yaitu penduduk Deli yang terdiri atas suku bangsa Melayu dan Karo tidak mempunyai *keimigran* untuk menjadi buruh perkebunan. Pada mulanya seorang

pengusaha perkebunan tembakau yang tereknal yaitu Nienhuys mengadakan hubungan dengan seorang Jawa yang berada di Penang untuk menyediakan sejumlah kuli bagi perkebunannya. Untuk tujuan itu telah diadakan suatu kontrak, tetapi kontrak itu tidak dapat dipenuhi karena orang yang berasal dari Jawa lebih banyak perhatiannya untuk melaksanakan dahwah Islam dari kegiatan dagang. Karena hal tersebut, maka Nienhuys memutuskan kontrak dengan haji yang berasal dari Penang itu. Sejak itu Nienhuys mulai melakukan hubungan dengan orang-orang Cina yang telah lama bermukim di Penang dan disebut dengan *Lau-Keh* (sebutan bagi orang Cina yang telah lama di perantauan).

Melalui orang-orang Cina inilah kemudian didatangkan pekerja-pekerja dari Negeri Cina yang umumnya berasal dari daerah sekitar Swatao, Amoy Kanton. Pada waktu itu keadaan politik dan perekonomian Tiongkok sangat merosot sekali, sebagai akibat pemerintahan penguasa Manchu. Keadaan ini menarik banyak orang Cina tersebut untuk pindah ke Sumatera Timur dan diharapkan dapat dikenal dengan sebutan Negeri Selatan atau Nan Yang, suatu daerah surga dan kaya. Sumatera Timur yang mereka sebut dengan *Su Tung* (Su = Sumatera; Tung = Timur). Kedatangan orang Cina ke Sumatera Utara itu berkelompok dan dikepalai oleh seorang kepala suku. Melalui tokoh-tokoh Cina yang berada di Penang, mereka menandatangani kontrak-kontrak kerja dengan pihak perkebunan yang berada di Sumatera Timur. Di antara suku-suku bangsa Cina yang datang ke Sumatera Timur adalah suku Kong Hu yang berasal dari Propinsi Kwantung, Suku Hok Chieu, Hai Lam, Tio Chiu berasal dari Hokien dan suku K'hek yang sering juga disebut dengan orang-orang Hakka. Mereka itu semuanya berasal dari Tiongkok Selatan.

Pekerja-pekerja Cina yang datang itu sesampainya di perkebunan tetap berada di bawah pimpinan kepala sukunya dan juga langsung diperintah oleh kepala sukunya. Jadi pengusaha Belanda di perkebunan senantiasa berhubungan dengan para pimpinan suku orang-orang Cina itu dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan di perkebunan itu. Jadi kedudukan pimpinan suku itu seperti mandur atau pengawas buruh-buruh Cina. Pada setiap per-

kebunan terdapat banyak buruh Cina dan banyak pula pimpinan-pimpinan buruhnya. Pimpinan buruh Cina biasa disebut dengan *tandil*.

Pekerjaan buruh-buruh Cina itu biasanya menggali parit dan mencangkul tanah-tanah yang akan ditanami dengan tembakau. Mereka umumnya bekerja tekun dan rajin, karena pekerjaan itu dilakukan dengan sistem borongan. Karena ketekunan pekerja-pekerja Cina itu, maka tandil-tandil banyak memperoleh keuntungan dan cepat menjadi kaya. Pada umumnya, setelah mereka mempunyai modal dan kontrak kerja telah selesai, mereka pindah ke kota. Di kota-kota mereka bekerja sebagai perajin atau berdagang. Orang-orang K'hek umumnya membuka perusahaan kerajinan seperti bertukang, sedangkan Hokkieh berdagang; demikian pula dengan orang-orang Kong Hu. Di kota mereka juga berada di bawah pengawasan pimpinan sukunya masing-masing. Kelompok-kelompok suku itu terus berkembang dan sengaja dipelihara terus oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Kepala-kepala suku itu di kota-kota diangkat oleh Belanda sebagai pimpinan dari kelompok orang-orang Cina. Melalui mereka inilah Belanda melakukan hubungan dengan orang-orang Cina, baik mengenai pajak atau hal-hal yang lain. Pada waktu itu pengurus bangsa Cina tidak berada di bawah kepala-kepala kampung tetapi mempunyai bagian tersendiri yang langsung berada di bawah penguasa Belanda. Dengan kedudukan kepala-kepala suku Cina ini mereka menjadi sangat penting sekali dan mudah memperoleh fasilitas-fasilitas. Mereka diangkat oleh pihak Belanda dengan pangkat letnan, kapten, dan mayor sesuai dengan kedudukannya dan pengaruhnya dalam kalangan masyarakat Cina. Kelompok-kelompok suku itu dalam masyarakat Cina perantaraan di Sumatera Timur dan Sumatera Utara umumnya tidak saja berfungsi sebagai suatu bentuk sosial saja tetapi justru merupakan suatu kekuatan ekonomi pula. Melalui masyarakat suku-suku itulah mereka dapat mengumpulkan modal dan membentuk suatu kegiatan dalam usaha perdagangan. Salah seorang pimpinan suku bangsa Cina yang terkenal di Medan dan dihormati sebagai seorang raja kecil ialah Tjong A Fie. Pada mulanya ia juga merupakan pimpinan suatu kelompok suku yang datang dari Negeri Cina. Karena keuletannya dan kesungguhan-

nya, maka ia dapat menjadi seorang yang dipercaya oleh orang-orang Belanda terutama dari pihak perkebunan. Pengaruhnya sangat besar di kalangan Cina sehingga ia diangkat sebagai mayor dari kelompok masyarakat Cina di Medan. Ia adalah suatu contoh dari orang Cina yang berhasil menjadi hartawan dan kemudian menjadi seorang yang terpandang dari kalangan masyarakat Kota Medan sekitar abad ke-20.

Dari urian tersebut jelaslah bahwa kelompok Cina yang bermukim di Sumatera Utara atau khususnya di Sumatera Timur dahulu datang sebagai pekerja dan dalam beberapa generasi mereka telah berubah menjadi pedagang karena keuletannya serta ketekunannya.

BAB II PENJAJAHAN ASING DI SUMATERA UTARA

2.1 Keadaan Sosial Ekonomi sebelum Abad ke-18

Sebelum abad ke-18, Sumatera Utara boleh dikatakan merupakan daerah yang berada dalam pengaruh kekuasaan Aceh yang menguasai perdagangan pesisir pantai utara Pulau Sumatera dan juga pantai barat. Penguasaan Aceh terhadap daerah-daerah ini sudah berlangsung sejak masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada masa pemerintahan raja tersebut jalur perdagangan dan pelayaran yang dilakukan oleh saudagar-saudagar Indonesia melalui pantai barat Sumatera karena Selat Malaka dikuasai oleh Portugis sejak Malaka dikuasai.

Jalur perdagangan dan pelayaran tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan daerah pantai Sumatera Utara di bagian barat, di mana terdapat bandar-bandar perdagangan seperti Barus, Natal, dan lain-lain. Faktor-faktor tersebutlah yang menyebabkan hubungan sangat erat dengan dunia luar lebih dahulu terjadi di daerah pantai barat daripada pantai timur. Pantai timur baru memainkan peranan penting dalam percaturan politik dan perdagangan pada abad ke-19. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan Sumatera Utara pada waktu itu dapat kita ikuti tinjauan secara rinci keadaan sosial dan ekonominya.

2.1.1 Keadaan Masyarakat

Sebagaimana telah diketahui masyarakat Sumatera Utara terdiri atas berbagai suku bangsa yang mendiami wilayah yang berbeda-beda pula. Pada umumnya di daerah pedalaman berdiam suku bangsa Batak dan di daerah pesisir suku bangsa Melayu pesisir. Suku bangsa Batak hidup dari mengolah tanah-tanah pertanian, sedangkan suku bangsa Melayu hidup dari hasil penangkapan ikan dan berdagang. Hasil-hasil pertanian itu sebagian besar adalah untuk kebutuhan sendiri dan selebihnya ditukar dengan barang-barang konsumsi lainnya dengan pedagang-pedagang dari pantai. Masyarakat Batak yang tinggal di pedalaman boleh dikatakan tertutup hubungannya dengan dunia luar. Dalam masyarakat yang tertutup itu peranan adat sangat menentukan sekali. Kehidupan masyarakat dalam segala sendi diatur oleh hukum adat. Keadaan itu memang sudah berjalan dengan sendirinya karena masyarakatnya homogen dan belum bercampur dengan bangsa asing. Kontak-kontak dengan kebudayaan asing secara langsung pun sedikit sekali.

Penduduk pantai yang kebanyakan terdiri atas suku bangsa Melayu tidak tertutup dan mempunyai hubungan yang luas dengan dunia luar. Penduduknya sebenarnya terdiri atas berbagai suku bangsa, tetapi setelah menetap di daerah pesisir, mereka mengakui dan mengasimilasikan dirinya sebagai suku bangsa Melayu. Kenyataan ini dapat terlihat dalam penelitian yang diadakan. Di daerah pesisir timur Sumatera Utara suku-suku Melayu itu, kalau diselusuri garis keturunannya, berasal dari berbagai keturunan. Di daerah Asahan mereka mengaku berasal dari keturunan Batak Toba. Di daerah Batu Bara terdapat pula suatu daerah pemukiman suku bangsa Minangkabau, di sekitar Bedagai mengaku keturunan Banjar, dan di Langkat dan Deli Serdang mengaku berasal dari Batak Karo. Dari kenyataan di atas jelas, yang menjadi suku bangsa Melayu di daerah pesisir timur berasal dari berbagai suku bangsa. Keadaan semacam ini juga terdapat di daerah pantai barat Sumatera Utara. Di Barus dan Sibolga terkenal pula dengan sebutan penduduk pesisir. Mereka berasal dari suku bangsa Batak, suku bangsa Minangkabau, malahan ada yang berasal dari bangsa

asing India.

Walaupun tadinya berasal dari berbagai keturunan, namun mereka mengasimilasikan dirinya ke dalam suku bangsa Melayu. Adaptasi demikian mungkin terjadi karena mereka pada umumnya telah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama dan menganut agama yang sama yaitu Agama Islam. Peraturan masyarakatnya pun tidak lagi dilakukan menurut hukum adat, tetapi menurut hukum Islam. Walaupun demikian beberapa kebiasaan adat lama yang tidak bertentangan dengan Agama Islam masih dilanjutkannya. Keadaan ini masih jelas kelihatan dalam beberapa upacara-upacara seperti dalam perkawinan, kelahiran bayi, dan lain-lain. Penduduk pesisir inilah sebenarnya yang melakukan hubungan dengan penduduk pedalaman, misalnya dalam perdagangan dan lain-lain. Mereka memang dapat mengadakan kontak dengan daerah pedalaman secara garis keturunan.

2.1.2 Jalur perdagangan

Menurut data yang ditemukan di daerah pesisir telah lama terjadi hubungan dagang dengan daerah-daerah luar Sumatera Utara. Keadaan ini berlangsung baik di daerah pesisir pantai timur maupun di daerah pesisir pantai barat. Di pesisir pantai barat terdapat bandar-bandar dagang seperti Barus dan Natal yang telah ada sejak abad ke-12 yaitu Kota Cina Paya Pasir dan di Perdagangan yang sering disebut oleh orang Tionghoa dengan sampan Tao. Menurut pengamatan penulis, tempat tersebut adalah kota-kota dagang yang tertua. Dari daerah ini lintas perdagangan bergerak ke pedalaman. Untuk menghubungkan daerah pedalaman dengan pantai atau kota-kota dagang, sungai merupakan suatu sarana yang penting.

Di kota-kota pantai itu berdiam para pedagang asing seperti Cina, India, dan pedagang pribumi yang menjadi pedagang penggalas atau penghubung dengan daerah pedalaman. Jumlah pedagang asing itu cukup banyak dan ini dapat dibuktikan dengan adanya kuil-kuil dan diketemukannya barang-barang keramik. Pedagang-pedagang Indonesia hanyalah pekerja-pekerja dari penguasa

pantai yang memberikan kepercayaan untuk membawa barang-barang miliknya yang akan ditukar dengan barang-barang milik penduduk daerah pedalaman. Barang-barang yang dibawa ke pedalaman antara lain garam dan barang-barang yang nilainya tinggi seperti candu. Di sekitar Pulau Samosir dan di pedalaman Simalungun terdapat pipa-pipa untuk mengisap candu yang dimiliki oleh pengetaua adat dan raja-raja. Perdagangan candu ini mungkin masih berusia muda karena pengenalannya di Asia baru abad ke-19. Perdagangan lada, kapur barus, dan hasil-hasil hutan lainnya sudah lama berlangsung. Dari daerah Deli dan Langkat terdapat lada dan di Tapanuli Utara terdapat kemenyan serta kapur barus. Melalui sungai-sungai barang itu diangkut ke pelabuhan di pesisir pantai. Sungai Asahan merupakan jalur perdagangan ke daerah sekitar Danau Toba. Dari Sungai Bah Bolor dan Sungai Padang ke daerah pedalaman Simalungun. Sungai Deli dan Sungai Wampu menghubungkan daerah pedalaman sekitar Tanah Karo dan pinggiran Danau Toba. Di pantai barat Sumatera Utara yang merupakan perairan samudra, peranan sungai-sungai sebagai jalur perdagangan juga sangat penting. Keadaan inilah yang menyebabkan kebanyakan kota-kota pelabuhan terletak di muara-muara sungai. Dahulu sungai-sungai dapat dilayari oleh kapal-kapal kecil atau sampan-sampan. Kenyataan ini dapat dilihat dari bekas-bekas garis pantai yang kita temukan pada sisa-sisa sungai itu.

Dari gambaran tersebut dapat kita ketahui bagaimana jalur perdagangan pada waktu itu, dan bagaimana pula peranan penduduk setempat dalam perdagangan. Segala kegiatan perdagangan itu pada umumnya dilakukan secara barter antara penduduk pesisir dengan pedalaman. Mengenai penggunaan mata uang tidak pernah ditemukan bukti-buktinya. Mata uang yang ditemukan adalah mata uang Portugis, VOC, dan mata uang asing lainnya yang ditemukan di pedalaman dan tidak dijadikan sebagai alat tukar tetapi mempunyai peranan dalam kegiatan adat sebagai benda magis saja. Pedagang-pedagang asing yang berdiam di pelabuhan-pelabuhan itu bertindak sebagai penumpuk bahan-bahan tersebut. Mereka mengangkutnya bila kapal-kapal dagang dari negerinya datang menyinggahi pelabuhan tersebut. Suasana perdagangan seperti itu sudah berlangsung sejak lama sampai datangnya pedagang bangsa

Eropa ke daerah ini. Mereka melakukan suatu cara baru untuk memperoleh barang-barang dagangan dengan cara monopoli hasil-hasil yang terdapat di suatu daerah. Dengan cara demikian mulai terjadi suatu perombakan tradisi perdagangan kuno dan lahirlah suatu *intrigue-intrigue*.

2.1.3 Penguasa-penguasa di Sumatera Utara

Dilihat dari segi geografi, kedudukan Sumatera Utara sangat strategis di bidang lalu-lintas perdagangan kuno, sehingga daerah ini sejak abad-abad permulaan Masehi telah terlibat dalam kegiatan perdagangan dengan negara-negara luar. Bukti-bukti tertulis memang tidak terdapat, tetapi beberapa peninggalan yang lain dapat memberikan petunjuk-petunjuk ke arah itu.

Daerah ini dapat mengadakan hubungan dengan dunia luar karena adanya sungai-sungai besar. Melalui sungai-sungai inilah segala kebutuhan barang-barang yang berasal dari luar dimasukkan. Kota perdagangan merupakan pelabuhan bagi Kerajaan Naghur. Kerajaan ini berkembang sampai pada abad ke-17. Sultan Aceh Alauddin pernah mencoba untuk menaklukkannya, tetapi tidak berhasil. Sampai dewasa ini di daerah sekitar Simalungun masih terdapat nama-nama desa yang memakai Naghur seperti Naghur Bayu, Naghur Usang, dan Naghur Raja. Mungkin di sekitar daerah ini dahulu merupakan pusat kerajaan. Sisa keraton tidak pernah ditemukan karena bahan-bahan yang dipergunakan pada umumnya terbuat dari kayu sehingga mudah musnah.

Di daerah Tapanuli Utara pada masyarakat Batak Toba terdapat struktur sosial berdasarkan kesatuan-kesatuan yang disebut *bius* (republik desa). Disebut demikian karena dalam masyarakat Batak tiap desa merupakan suatu kesatuan yang berdiri sendiri dalam pemerintahannya. Republik desa itu merupakan suatu kesatuan otonomi dalam kedudukan hukumnya. Pengaturan masyarakatnya diatur menurut hukum adat yang disebut *Dalihan Na Tolu*. Pemimpin desa ialah seorang yang dianggap mempunyai kedudukan *magi* atau *sahala*. Pemimpin biasanya mempunyai karisma dan mempunyai kelebihan-kelebihan dari anggota masyarakat

lainnya. Pemimpin suatu desa dianggap juga seorang yang berjasa dalam melakukan sesuatu seperti pendiri atau perdagangan desa dengan laku. Kedudukannya disebut sebagai *raja huta*.

Seorang raja huta membawahi suatu unit politik yang meliputi suatu daerah pertanian yang dimiliki oleh anggota masyarakat huta. Kumpulan dari huta kemudian merupakan suatu unit kekuasaan yang disebut dengan *horja*, dan di atas horja disebut pula bius. Setiap daerah mempunyai kebebasan sendiri dan mereka terikat seluruhnya oleh hukum adat. Pimpinan dalam horja disebut *raja punjungan dan bius raja parbaringin*. Kedua kedudukan pemimpin itu hanya melaksanakan upacara-upacara keagamaan saja, sedangkan yang melaksanakan pemerintahan secara langsung ialah raja huta.

Di Tapanuli Selattan, sebelum masa kekuasaan Belanda, memerintahkan diatur menurut hukum adat. Suatu desa diperintahi oleh kepala desa yang disebut dengan kepala kampung. Kepala *huria* membawahi beberapa kampung. Di Tanah Karo kesatuan unit politik yang kecil disebut *rumah siwaluh jabu*. Pimpinan dari siwaluh jabu itu disebut *raja jabu*. Unit yang kecil itu bergabung dalam suatu kesatuan politik yang lebih besar lagi yang disebut *kuta*. Pimpinan kuta disebut *penghulu* atau juga raja. Kesatuan kuta-kuta yang merupakan suatu keturunan berada dalam suatu kesatuan pula yang disebut *urung*. Seluruh sistem pemerintahan diatur menurut ketentuan adat yang 'bersistem pemerintah diatur menurut ketentuan adat yang berlaku. Susunan pemerintahan seperti ini berlangsung di Tanah Karo sampai terbentuknya kekuasaan Belanda di Tanah Karo kemudian. Misalnya dalam lingkungan masyarakat Karo terdapat nama-nama yang memakai marga Sembiring Brahmana, Pelawi, Colia, dan Pandia. Ini membuktikan bahwa daerah ini telah mempunyai hubungan yang erat dengan luar atau India sehingga kebudayaan Hindia itu memasuki daerah ini. Mengenai kerajaan-kerajaan purba yang ada di daerah ini tidak ada bukti-bukti tertulis sehingga melahirkan kekaburan jalannya sejarah daerah ini. Karena itu tidak dapat kita ketahui bagaimana keadaan pemerintahan dan kekuasaan pada abad-abad I Masehi di daerah Sumatera Utara. Sejak masa Kerajaan

Sriwijaya, daerah Sumatera Utara pasti telah turut serta dalam kegiatan perdagangan asing terutama di pantai timur. Sriwijaya dapat mengamankan daerah lintasan pelayaran Selat Malaka sehingga jalur lintasan dagang itu tumbuh penguasa-penguasa pantai yang tunduk pada Kerajaan Sriwijaya. Dengan sendirinya kerajaan itu tidak terkenal dan tidak disebut-sebut dalam sejarah kuno Indonesia. Tetapi setelah Kerajaan Sriwijaya mulai pudar pada abad ke-13, mulailah terdengar berita-berita tentang kerajaan-kerajaan kecil di Sumatera Timur dengan sebutan Kerajaan Aru, Panai dan lain-lain menurut berita yang terdapat pada peralatan.

Dalam *Sejarah Melayu* telah mulai disebut-sebut adanya Kerajaan Aru pada abad ke-15 yang terletak di daerah Langkat. Lokasi kerajaan ini sampai sekarang belum dapat diketahui dengan pasti karena belum ada suatu penyelidikan mengenai kerajaan ini. Seterusnya di daerah Barumun telah pula ditemukan adanya candi-candi di Portibi Padang Lawas, dan ini menunjukkan bahwa suatu penguasa dahulunya pernah berkuasa di daerah ini. Penguasa tersebut tentunya mempunyai pengaruh yang cukup besar sehingga ia dapat melaksanakan suatu pembangunan candi-candi. Berdasarkan suatu perhitungan, kerajaan tersebut berdiri pada abad ke-13, karena patung-patung yang terdapat di situ merupakan perpaduan bentuk antara unsur-unsur Budha dengan Ciwa.

2.2 Perebutan Negara-Negara Eropa di Sumatera Utara

Sumatera Utara sudah lama dikenal oleh bangsa asing, yakni sejak masa perdagangan kuno antara Tiongkok dengan negara-negara di Timur Tengah. Pada masa itu beberapa daerah pantai telah pernah disinggahi oleh pegagang-pedagang asing. Kalau benar Barosai yang disebut oleh ahli geografi Mesir pada zaman purbakala yang terletak di timur itu Barus, maka bandar inilah yang tertua di Sumatera Utara dan pernah menjadi pusat perdagangan pada zaman purba di samping Natal. Bagaimana jalan perdagangan tersebut seterusnya tidak banyak kita mengetahuinya karena datanya sangat sedikit. Walaupun demikian, di Barus sendiri ditemukan bekas-bekas pemukiman dari zaman dahulu dan juga makam-makam Islam tua. Data ini tidak berasal dari suatu masa yang lama atau

zaman kuna melainkan sesudah abad-abad Masehi. Menurut berita, pada abad ke-9 di Barus telah ada Agama Kristen Nestorius yang dibawa oleh orang-orang Armenia. Pada masa pelayaran bangsa Portugis ke timur daerah ini tidak menjadi jalan lintasan perdagangan karena bangsa Portugis telah mengamankan Selat Malaka setelah bandar itu dikuasainya. Tetapi setelah bangsa Belanda sampai ke Bantam melalui Samudra Indonesia, daerah pantai barat mulai lagi mendapat perhatian dari bangsa Eropa lainnya kecuali Portugis. Demikian pula pedagang-pedagang Indonesia yang bersaing dengan Portugis menjadikan jalur pantai barat Sumatera sebagai daerah persinggahan para pedagang Indonesia.

Jatuhnya Bandar Malaka ke tangan bangsa Belanda dan berakhirnya supremasi bangsa Portugis di timur dan dalam pelayaran di abad ke-17, mulai terjadi perebutan wilayah antara negara-negara Eropa atas wilayah sekitar Selat Malaka terutama Pulau Sumatera. Bangsa Belanda dan Inggris mempunyai perhatian besar terhadap penguasaan wilayah Pulau Sumatera karena kedua bangsa ini merupakan bangsa pelaut dan pedagang yang menggantikan kedudukan bangsa Belanda di Eropa abad ke-17. Bangsa Belanda dengan *Verenigde Oost Indische Compagnie* dan bangsa Inggris dengan *East Indian Company* mulai melakukan kegiatan-kegiatan pelayaran ke timur dan mereka itu berlomba-lomba menguasai wilayah-wilayah di timur. Perlombaan untuk menguasai itu melibatkan juga penguasaan mereka terhadap daerah Sumatera Utara. Untuk mengetahui bagaimana perkembangannya atau prosesnya penguasaan tersebut dapat diikuti pada uraian berikut:

2.2.1 Penanaman Kekuasaan Inggris di Asia

Sejak pemerintahan Elisabeth I, dunia pelayaran di Inggris sangat berkembang. Sir Walter Raleigh mengadakan pelayaran ke Amerika dan berhasil mendirikan koloni Inggris yang pertama di Virginia. Kemudian pada tahun 1577, Francis Drake yang berasal dari Plymouth berhasil mencapai Kepulauan Maluku dan kembali ke Inggris melalui Tanjung Pengharapan. Sejak pelayaran tersebut perhatian Inggris terhadap perdagangan di Asia Timur mulai mendapat perhatian dan mengharapkan dapat pula dapat memiliki

wilayah-wilayah di timur. Pada tahun 1583 Ralph Fitch menjadi orang pertama di Inggris yang sampai di Ormuz. Ia ditangkap penguasa Portugis di sana, tetapi kemudian dapat melarikan diri dan berhasil mencapai Hugli, yaitu suatu daerah yang terdapat di delta Sungai Gangga. Dari sana ia melanjutkan perjalanannya ke Pegu, Burma sampai di Malaka pada tahun 1588. Pada tahun 1591 ia kembali ke Inggris. Dari perjalanannya ini, perhatian terhadap perdagangan dengan dunia timur semakin bertambah dan banyak pedagang-pedagang yang ingin melakukan perdagangannya ke timur. Hancurnya armada Spanyol yang menjadi kebanggaannya, pada akhir abad ke-16 memberi peluang besar pula bagi kelanjutan pelayaran-pelayaran armada Inggris ke timur atau ke Asia. Thomas Caveendish kemudian mengikuti pelayaran Drake sampai ke pulau-pulau Maluku dan pulanginya ia singgah pula di Pulau Jawa. Setelah itu, beberapa kali diadakan pelayaran ke Asia yang dibiayai oleh pedagang-pedagang Inggris. Pelayaran Lancaster pada tahun 1591 telah pula menyinggahi daerah utara Pulau Sumatera dan ia berdiam pula untuk beberapa lamanya di Pulau Penang sebelum ia kembali ke Inggris.

Keberhasilan dari pelayaran ini menyebabkan pedagang-pedagang Inggris itu pada tahun 1600 mendirikan persekutuan dagangnya yang disebut *East Indian Compagny* atau disingkat dengan EIC. Kedatangan Inggris ke timur ini menyebabkan Portugis mulai mendapat persaingan dari orang-orang Eropa dalam perdagangannya di timur. Inggris cepat pula mendirikan loji-loji dagangnya di timur seperti Calcutta dan Bombay. Demikian pula di Indonesia seperti di Jakarta pada abad ke-17. Kedatangan Lancaster ke Aceh pada tahun 1602 membuka harapannya untuk melanjutkan perdagangan dengan Aceh, karena ia memperoleh lada dengan harga yang murah dari daerah penghasil rempah yaitu Tiku dan Pariaman. Kedua daerah di pantai Sumatera itu merupakan daerah pelabuhan dagang yang penting di abad ke-17 dan dikuasai oleh sultan Aceh. Keinginan Inggris untuk menguasai daerah perdagangan di Sumatera itu telah ada sejak itu, tetapi masih memerlukan waktu yang lebih lama karena persaingannya yang banyak dari bangsa Belanda dan Portugis di perairan Indonesia.

2.2.2 Penanaman Kekuasaan Belanda di Asia

Sejak lumpuhnya armada Spanyol di akhir abad ke-16 dan kurangnya rempah-rempah yang diterima oleh pedagang-pedagang Belanda, mulai timbul hasrat pedagang-pedagang Belanda untuk mengadakan pelayaran ke Indonesia atau ke Asia. Perintis pertama pelayaran ke Indonesia yang dipelopori oleh de Houtman dan de Kyzer berhasil membuka lembaran baru dalam sejarah pelayaran bangsa Belanda. Setelah itu mulailah Belanda mengorganisasi pelayaran dan perdagangan ke Indonesia melalui *Vereenigde Oost Indische Compagnie* atau VOC. Belanda mulai meletakkan batu pertamanya dalam menguasai perdagangan di Asia yaitu dengan menguasai Jayakarta dan mendirikan Batavia pada tahun 1619. Dalam perdagangannya di Asia, terutama di Maluku, Belanda mendapat persaingan yang besar sekali dari bangsa-bangsa Eropa lainnya seperti Portugis, Inggris, dan Spanyol. Untuk mengatasi persaingan ini Belanda melakukan berbagai cara seperti pada mulanya mengikat perjanjian dengan raja-raja di daerah-daerah yang didatanginya. Perjanjian monopoli yang dilakukan VOC itu juga tidak menguntungkan karena banyak pedagang-pedagang Indonesia yang tidak dapat menerima monopoli yang dilakukan oleh Belanda.

Belanda mengalami kesulitan karena banyaknya bandar-bandar dagang yang dapat mengimbangi Batavia seperti Bantam, Malaka, dan Makasar yang sekarang disebut Ujung Pandang. Jalur perdagangan mendirikan lojinya di Pulau Desima. Dengan penguasaan Belanda atas daerah dagang itu, dengan sendirinya bandar-bandar dagang Indonesia itu dapat dikuasainya dan pengaruh serta peranan pedagang Eropa lainnya dapat diperkecil, di antaranya Portugis. Satu per satu pelabuhan dagang Indonesia sejak dari timur yaitu Makasar pada tahun 1667 dan Banten tahun 1684, jatuh ke tangan pengaruh VOC. Dengan jatuhnya kedua pusat dagang itu, orang-orang Eropa selain Belanda telah dapat diusir dari pantai-pantai di timur yaitu Pulau Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Sebaliknya daerah pantai barat yaitu Sumatera masih saja terjadi perdagangan bebas karena belum ada satu pun raja-raja Indonesia di daerah ini. Pada waktu itu sedang bertarung dua kekuasaan untuk menguasai Sumatera yaitu Inggris dan Belanda.

Setelah Malaka dan Ujung Pandang jatuh, boleh dikatakan peranan Portugis di Indonesia semakin menurun. Satu-jatunya daerah yang dikuasainya di Indonesia hanyalah Timor. Kenapa kedudukan Portugis itu menjadi demikian merosot? Bangsa Portugis datang ke Indonesia bukan saja berdagang tetapi juga menyebarkan Agama Kristen sebagai tugas yang telah dibebankan oleh Sri Paus dalam perjanjian Tordicella, sehingga tindakan mereka di Indonesia yang sebagian besar beragama Islam tidak disukai. Bukan saja tidak disukai tetapi malah terjadi suatu konflik antara Portugis dengan raja-raja Indonesia seperti dengan Kerajaan Ternate dan Tidore di Maluku dan Kerajaan Aceh di masa Iskandar Muda.

Di daerah pantai barat Belanda telah dapat menguasai wilayah Indonesia sejak Maluku sampai ke Pulau Jawa, sedangkan Pulau Sumatera Belanda menghadapi persaingan pula dari bangsa Inggris yang telah berusaha menanamkan pengaruhnya di sana. Inggris yang telah mendirikan kedudukannya atau tempat berpijak di India, mulai mengembangkan sayapnya untuk menguasai wilayah di Asia. Pada tahun 1785 Inggris memperoleh Penang setelah melakukan suatu persetujuan dengan sultan Kedah. Dari Penang, melalui Raffles Inggris mengadakan perjanjian dengan sultan Johor. Sebagai akibat adanya perjanjian ini, Singapura diserahkan kepada Inggris.

2.2.3 Persaingan Inggris dan Belanda untuk Menguasai Sumatera

Hubungan Negeri Belanda dengan Inggris pada abad ke-17 berlanjut sampai mereka datang di Indonesia. Inggris dapat melakukan pelayaran dengan aman di Selat Malaka ke Negeri Cina, demikian pula pelayaran kembali ke India. Keadaan itu berubah setelah Belanda mengadakan hubungan dengan Amerika Serikat sejak negeri itu menyatakan kemerdekaannya. Sejak itu Belanda mulai memperkuat kedudukannya di Selat Malaka. Dengan dikuasainya daerah itu, Inggris mulai menjadikan Penang sebagai pusat perdagangan yang menghubungkan Cina, Sumatera, dan India. Sejak itu kedudukan Bengkulu yang telah dikuasai Inggris pada tahun 1686, mulai mempunyai arti penting pula. Bengkulu

menjadi titik penguasaan Inggris untuk pelayaran Selat Sunda dan Penang di Selat Malaka. Perang koalisi yang terjadi di Eropa menyebabkan jatuhnya Malaka ketangan Inggris sehingga dengan demikian titik yang strategis untuk menguasai Pulau Sumatera menunggu waktu saja lagi. Sejak itu Belanda sudah mencurigai gerak gerik Inggris tetapi Belanda tidak dapat berbuat banyak karena negerinya terlibat dalam peperangan di Eropa sebagai akibat gejolak Revolusi Perancis. Sewaktu Raffles menjadi gubernur jenderal di Batavia ia mulai melakukan kegiatan-kegiatan seperti ekspedisi dan pengiriman misi-misi Agama Kristen. Kegiatan yang dilakukan Raffles ini tiada lain berdasarkan pandangan bahwa Sumatera akan dijadikan suatu basis perdagangan Inggris di Asia. Segala tindakan Raffles itu mendapat protes dari Pemerintah Belanda yang pada waktu itu melarikan diri ke Inggris. Di dalam Peretujuan London 1814 (*Conventie London*) Raffles kecewa karena apa yang menjadi cita-citanya untuk menguasai jajahan Belanda di Timur jauh itu gagal karena berdasarkan persetujuan itu harus dikembalikan kepada Belanda kecuali Malaka. Kekecewaan ini terjadi karena penguasa Inggris melihat kepentingan perdagangan yang lebih diutamakan dari pada kepentingan politik. Dengan kembalinya kekuasaan Belanda di Indonesia termasuk Sumatera dan daerah Selat Malaka maka perdagangan Inggris akan terhalang. Karena itulah Raffles (setelah *Conventie London* 1814) menguasai Singapura karena melihat bandar itu penting bagi perdagangan Inggris di masa depan. Walaupun demikian Raffles masih berusaha untuk menguasai Sumatera dan gerak-geriknya itu kelihatan di Bengkulu dan Palembang. Kegiatan Raffles itu tiada lain karena ia ingin menjadikan seluruh Pulau Sumatera bagian dari Kerajaan Inggris, walaupun Pemerintah Inggris sendiri tidak berpikir demikian.

Sementara itu kedudukan Belanda di India mulai tidak berarti karena tidak memberikan keuntungan-keuntungan untuk perdagangan. Lagi pula telah banyak kantor-kantor dagang Belanda ditutup. Keadaan ini mengalihkan perhatian Belanda untuk memperkokoh kekuasaannya di Selat Malaka yang sangat penting artinya bagi perdagangan Asia. Karena itu Inggris dan Belanda me-

ngadakan perundingan tingkat pemerintah untuk membahas persoalan tersebut Perundingan berlangsung di London pada tahun 1820, dan Belanda menuntut haknya atas Singapura. Perundingan itu baru membuahkan suatu persetujuan disebut *Tractaat Londen* 1824, yang isinya seperti tertuang dalam lampiran berikut :

LAMPIRAN

- Fasal 1 : Kedua pihak berjanji memberikan kesempatan berniaga bagi warga negara masing-masing di wilayah kepulauan Timur dan di daratan India dan Sri Langka sebagai warga yang diutamakan dengan arti bahwa warga masing-masing akan mematuhi hukum setempat.
- Fasal 2 : Warga dan kapal dari salah satu bangsa yang keluar masuk dari dan ke pelabuhan Timur tidak akan membayar lebih tinggi dari selipat dari bea cukai keluar masuk dari pelabuhan Timur yang dibayar oleh warga dari penguasanya. Cukai bea masuk dari Belanda di pelabuhan Inggris untuk tanah daratan India atau untuk Sri Langka akan dibayar dengan ketentuan berikut bahwa jumlah ini tidak boleh lebih tinggi dari selipat dari yang dibayar oleh warga kapal Inggris. Mengenai barang yang bebas cukai jika diangkut oleh warga dan kapal negara pemiliknya, maka jumlah lebih dari 6 perseratus.
- Fasal 3 : Kedua pihak berjanji tidak akan mengikat perjanjian dengan salah satu negara diperairan Timur yang mungkin akan mewujudkan tertutupnya kesempatan berniaga dari pihak lain dan jika perjanjian demikian ada dianggap menjadi dibatal. Kedua pihak berpendirian bahwa perjanjian yang diikat sebelum ini oleh salah satu pihak akan diberitahukan kepada pihak lainnya tentang perjanjian-perjanjian yang diikatnya dengan negara lain diperairan Timur.

Demikian pula pemberitahuan sedemikian akan dilakukan jika salah satu pihak membuat perjanjian itu dimasa datang.

- Fasal 4 : Raja-raja Inggris dan Belanda berjanji akan memerintahkan kepada pembesar masing-masing baik sipil maupun militer bahkan juga kepada kapal barang masing-masing mengenai kebebasan bertindak sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, 2, dan 3 supaya mereka patuhi dan tidaklah boleh sekali-kali terhambat perhubungan antara rakyat di kepulauan Timur dengan pelabuhan-pelabuhan dari pemerintah keduanya. Demikian pula tidak boleh menghambat perhubungan antara rakyat keduanya dengan pelabuhan-pelabuhan dari negara raja-raja di Indonesia yang lain.
- Pasal 5 : Kedua Raja-raja Inggris dan Belanda berjanji akan membasmi bajak laut dengan giat. Tidak dibolehkan memperlindungi kapal bajak laut. Tidak dibolehkan diberi kesempatan barang-barang dirampok, dimiliki dibawa, disimpan maupun diperjualkan oleh kapal-kapal begitu.
- Pasal 6 : Telah disetujui bahwa masing-masing pemerintah melarang kepada pembesar dan agen masing-masing untuk mendirikan kantor baru dikepulauan Timur, sebelum diberi kuasa oleh masing-masing pemerintahnya di Eropah.
- Pasal 7 : Untuk melaksanakan kegiatan pasal 1, 2, 3, dan 4 monopoli di pulau-pulau Maluku dan khususnya Ambon, Banda dan Ternate kecuali pulau sekitarnya akan dihapuskan pada waktu yang dianggap oleh pemerintah Belanda keadaannya sudah mengijinkan. Dan bilamana perniagaan diperkenankan kepada negeri-negeri lain selain negeri asli sendiri, maka warga Inggris akan mendapat kesempatan yang serupa kelapangannya dengan lainnya.

Pasal 8 : Raja Belanda menyerahkan kepada raja Inggris segala establismentnya di tanah besar India dan melepaskan segala hak istimewa yang diperolehnya karena pemi-
likan ini.

Pasal 9 : Loji Inggris di Fort Marlborough dan segala miliknya di pulau Sumatera dengan ini diserahkan kepada raja Belanda.

Raja Inggris berjanji bahwa di pulau itu tidak akan dibangun kantor-kantor Inggris. Tidak ada dibikin perjanjian dengan siapa-pun dari raja-raja dan kepala-kepala bumi putera di situ untuk ber-
ada di bawah kekuasaan Inggris.

Pasal 10 : Kota dan benteng Malaka dan sekitarnya dengan ini diserahkan kepada raja Inggris. Raja Belanda berjanji atas nama rakyatnya tidak akan membuka kantor di-
bagian semenanjung Malaka akan membuat perjanjian denan raja-raja bumi putera atau negarayang ada di Semenanjung itu.

Pasal 11 : Raja Inggris melepaskan segala niatnya terhadap di-
dudukinya pula Belitung dan wilayahnya oleh agen pemerintah Belanda.

Pasal 12 : Raja Belanda melepaskan segala niatnya terhadap di-
dudukinya pulau Singapura oleh rakyat raja Inggris.

Di samping itu raja Inggris berjanji tidak akan mendirikan kan-
tornya di pulau-pulau Karimun atau pulau-pulau Bantam, Bintang, Lingga atau pulau-pulau lainnya yang terletak di sebelah selatan Selat Singapura dan juga tidak akan membuat perjanjian dengan kepala di situ supaya takluk dibawah kuasa Inggris.

Pasal 13 : Semua jajahan milik dan establisment yang tersebut di-
pasal-pasal di atas haruslah diserahkan oleh pembesar negara yang bersangkutan selambatnya tanggal 17 Ma-
ret 1825. Pendudukan tersebut harus berada dalam

keadaan ketika perjanjian ini diumumkan di India, tapi tidak boleh ada tuntutan dari siapa kepada siapa-pun alat-alat atau suatu bentuk keperluan yang ditinggalkan oleh negara yang menyerahkan baik mengenai perolehannya yang ditinggalkan maupun mengenai hutannya dari bentuk apapun.

Pasal 14 : Semua penduduk dari negeri-negeri dimana terjadi pertukaran ini selama tempo 6 tahun terhitung sesudah perjanjian ini di ratifikasi mendapat kebebasan-nya untuk menentukan bagaimana diperbuatnya dengan harga bendanya untuk memindahkannya dengan tidak boleh ada rintangan siapapun untuk melakukannya.

Pasal 15 : Kedua pihak berjanji tidak akan menyerahkan kepada negara lain atau establismen yang dimaksud dalam pasal 8, 9, 11, dan 12. Jika ada diantara tempat dimaksud hendak ditinggalkan oleh salah satu pihak, hak-haknya dengan serta merta pindah ke tangan pihak lain.

Pasal 16 : Telah disetujui bahwa segala perhitungan dan penagihan yang tumbuh dari pemulangan Jawa dan establismen lainnya kepada pembesar raja Belanda di India Timur, baikpun yang merupakan persoalan dari suatu konvensi di Jawa pada tanggal 24 Juni 1817, telah diikat oleh kedua bangsa maupun segala apa yang lain, tidak akan merupakan dakwa-dakwi lagi, kecuali mengenai pembayaran sebanyak 100.000 paun Inggris dari pihak Belanda yang dilakukan di London sebelum akhir tahun 1825.

Pasal 17 : Perjanjian ini akan diratifikasi dan peratifikasi akan dipertukarkan di London, tiga bulan sesudah tanggal ini, atau jika mungkin lebih cepat lagi

Untuk meneguhkan perjanjian ini ditangani oleh masing-masing utusan dikuatkan oleh cap materai dari pelambangan masing-masing.

Diperbuat di London 27 Maret Tahun Masehi 1824

(tt) A. R. Falck
H. Fagel

C. Watkin William Wyinn
George Canning

Yang penting dari perjanjian ini bukan saja bahwa mereka mempertukarkan jajahan masing-masing yang satu menerima Sumatera dan yang lain menerima Semenanjung Melayu, melainkan juga mengenai masalah kedudukan Kerajaan Aceh. Tentang ini tidak ditentukan sebagai merupakan sesuatu pasal dari perjanjian, tetapi ditentukan oleh pengakuan terpisah pihak Belanda sendiri berupa nota yang isinya mengatakan bahwa Belanda tidak ingin memperkosa kedaulatan/kemerdekaan Aceh. Selain pasal 6 di atas melarang dengan tegas tidak boleh diperluas daerah sebelum diberitahukan pada pucuk pemerintahan pihak lain maka adanya pengakuan Belanda dalam notanya tadi dapatlah dianggap sebagai jaminan bahwa Belanda harus membiarkan Aceh merdeka. Dengan ketentuan *Tractaat London* ini maka kedudukan Inggris di Sumatera harus segera diserahkan kepada Belanda, dan Inggris tidak boleh menanamkan pengaruhnya di pulau itu. Sebaliknya Belanda harus meninggalkan seluruh kegiatannya untuk menanamkan kekuasaannya di daerah Asia. Mengenai daerah Kesultanan Aceh memang tidak ada suatu keterangan pun, tetapi kemudian ada ketentuan yang diperundingkan antara kedua negara itu bahwa kedaulatan Aceh tidak boleh diganggu gugat dan Belanda harus menjaga keamanan di Selat Malaka dari gangguan pembajak-pembajak laut. Walaupun demikian Inggris melalui beberapa pedagang mencoba untuk menanamkan kekuasaannya di pantai timur Sumatera seperti di Siak dan Jambi tetapi mendapat protes dari pihak Belanda. Pada tahun 1858 Siak mengakui kedaulatan Belanda atas Wilayahnya dan Inggris mengakui perjanjian ini dengan imbalan dihapuskannya pajak-pajak yang berbeda antara barang-barang masuk yang dibawa pedagang-pedagang Inggris ke koloni Belanda (*Differateele rachten*).

Kedudukan Belanda menjadi lebih kuat lagi setelah diadakan penandatanganan perjanjian pada 3 November 1871 antara Inggris dengan Belanda yang dikenal dengan Traktaat Sumatera. Dengan traktat ini Belanda mendapat hak pengakuan untuk menjalankan politik tangan terbuka bagi seluruh Sumatera termasuk Aceh dan Inggris tidak akan mengganggu.

Dengan penjelasan di atas maka Belanda telah mulai melakukan penjajahan secara terbuka atas Pulau Sumatera, tetapi perkembangannya melalui suatu proses yang cukup lama. Untuk jelasnya baiklah di bawah ini diuraikan proses tersebut :

2.3 Penjajahan Belanda di Sumatera Utara

Pantai Barat Sumatera merupakan daerah yang sangat rawan sekali, karena disanalah bercongol pedagang-pedagang asing dan perebutan pengaruh antara Inggris dengan Belanda untuk menamakan pengaruhnya. Wilayah kekuasaan Aceh semakin lama semakin ciut dan tidaklah mengherankan kalau Aceh melihat tindakan-tindakan negara-negara Barat itu sebagai keinginan menghancurkan pengaruh Aceh di pantai Barat Sumatera. Karena itulah maka Aceh mengirimkan pasukan-pasukannya untuk menghancurkan kedudukan negara-negara Barat itu di daerah tersebut. Pasukan-pasukan Aceh itu sering disebutkan dalam sejarah negara-negara Barat itu sebagai perampok-perampok atau dengan istilah lain Zeero-ver. Dari kenyataan diatas maka Belanda setelah ia memperoleh peluang menanamkan pengaruh di Sumatera maka sebagai titik tolak untuk menguasai Sumatera Utara lebih dahulu menguasai daerah pantai Barat Sumatera.

2.3.1 Penguasaan Daerah Pantai Barat Sumatera Utara

Setelah Perang Paderi usai, Belanda mulai berusaha untuk melanjutkan penguasaannya ke bagian lain dari daerah utara Sumatera Barat. Memang daerah-daerah yang ditinggalkan Inggris di pantai Sumatera Utara telah dikuasainya tetapi penguasaan secara intensif belumlah dilaksanakan. Untuk melaksanakan hal tersebut, Belanda menempatkan seorang pelopor dengan tugas membentuk suatu organisasi seorang pelopor dengan tugas membentuk

suatu organisasi yang lebih baik, yaitu Michiels. Ia diangkat sebagai gubernur pantai barat atau *Gouvernuer van Sumatra's Westkust*. Sebagai seorang gubernur di pantai barat ia menaruh perhatian untuk menguasai seluruh Sumatera. Hal ini dapat terlihat dari salah satu pernyataannya, yang diterjemahannya kurang lebih sebagai berikut :

"Orang Aceh telah diusirnya dari Singkel. Sisa dari pulau itu menurut menteri van den Bosch dalam seperempat abad dikuasai, tetapi Michiels dan 1 tahun dapat dikuasai dengan pasukan yang kecil saja. 3)

Pandangan Miechiels ini tentunya beralasan karena ia mempunyai pengalaman-pengalaman dalam menguasai bagian-bagian lain di Indonesia. Di daerah lain dapat dengan pasukan yang kecil untuk menguasai suatu daerah. Politik *Devide et Empera* dapat dilakukannya sehingga dengan tenaga yang kecil mereka kemudian dapat menguasai daerah tersebut. Bertitik tolak di Sumatera, usahanya dapat dilakukan karena peperangan di Jawa atau Penang Di-ponegoro telah berakhir sehingga Belanda dapat lebih intensif mengarahkan penguasaannya di Sumatera bagian utara, terutama pada daerah pesisir barat Pulau Sumatera. Kenyataan-kenyataan ini dapat kita lihat dari uraian berikut :

Dalam tahun 1839 Gunung Sitoli diduduki dan langsung berada di bawah pengawasan gubernur pantai barat. Tujuannya sebagai perbentengan terhadap Aceh.

Pada tahun 1847 Lagundi di Nias Selatan diduduki oleh pasukan topografi dan desa-desa sekitarnya dibakar dan kemudian ditinggalkan.

Pada tahun 1852 Gubernur Van Swieten berusaha untuk memasukkan unsur-unsur kebudayaan Barat untuk melemahkan penduduk. Untuk itu ia mengirim Residen Tapanuli Couperus mengadakan inspeksi ke Pulau Nias. Ia menganjurkan agar dikirim zending-zending tetapi pemerintah menolaknya sesuai dengan RR. art. 82.⁴⁾

Dari keterangan tersebut di atas jelas bahwa setelah mendirikan daerah kekuasaannya di pantai barat, Belanda mengalami banyak kesulitan dari pelaut-pelaut Aceh yang merasa terdesak

karena perluasan kekuasaan Belanda ke bagian utara Sumatera. Belanda memang telah mendirikan lembaga-lembaga kekuasaannya di Tapanuli dan Singkel, tetapi daerah yang dikuasainya hanyalah daerah pesisir. Sebagian besar daerah pedalaman tidak dapat dikuasai karna keadaan wilayahnya berbeda sekali dengan daerah lain seperti di Jawa. Pengaruh Aceh terhadap daerah-daerah di bagian utara pulau Sumatera besar sekali dan hal inilah yang sangat mengelisahkan sehingga Belanda ingin menguasai daerah itu secepatnya. Hal ini melahirkan prasangka buruk terhadap Belanda. Dalam masyarakat Batak sendiri sampai sekarang ada istilah "Si Bontar Mata", suatu istilah untuk menyatakan orang itu berkulit putih. Justru karena prasangka yang demikianlah maka beberapa pejabat Belanda seperti Residen Couperus mengusulkan agar Pemerintah Belanda segera mengembangkan misi gereja ke daerah Nias maupun daerah-daerah lainnya. Dengan jalan memperluas penyebaran Agama Kristen dalam kalangan penduduk pribumi, diharapkan dengan mudah daerah itu dikuasai. Hal ini tidak dapat dicampuri oleh Pemerintah Belanda karena mereka terikat dengan 82 art. (Art. 82 RR), di mana pemerintah tidak mencampuri masalah keagamaan. Walaupun demikian Belanda tetap memberikan kesempatan kepada organisasi swasta untuk kegiatan itu. Selain melalui unsur keagamaan, Belanda berusaha pula memajukan masyarakat daerah itu dengan memasukkan kebudayaan Barat. Belanda bermaksud memasukkan pendidikan Barat dan ini telah dimulai di Tapanuli Selatan.

Dengan cara demikian Belanda mencoba melemahkan sikap penduduk yang anti Belanda. Selain itu, tindakan Belanda dapat pula melahirkan kelompok-kelompok dalam masyarakat yang berbeda pandangan dan sikapnya sehingga politik pecah belah atau *divide et impera* dapat dilaksanakan. Usaha Belanda untuk menguasai daerah pantai barat Sumatera Utara dimulai dari daerah pantai Pulau Nias setelah melalui beberapa kali ekspedisi yang berhasil diamankan. Pada tahun 1866 di Goenoeng Sitoli telah ditempatkan seorang kontroler serta sepasukan tentara Belanda. Daerah yang dikuasai Belanda pada waktu itu sangat kecil, hanya sekitar Goenoeng Sitoli tetapi setelah tahun 1880, hampir meliputi seluruh Pulau Nias. Untuk memudahkan kekuasaan-

an Belanda, misi gereja dari Jerman yaitu *Rheinische Mission* diberikan kesempatan untuk melakukan penyebaran Injil. Pada mulanya misi Jerman itu (1865) hanya bergerak sekitar Goeneng Sitoli. Pada tahun 1892 mulailah penginjilan dilakukan ke luar daerah Goeneng Sitoli yaitu ke daerah pedalaman. Banyak penduduk yang mencurigai tindak-tanduk Belanda, mungkin karena daerah ini dahulu lebih erat hubungannya dengan Aceh. Kenyataan ini dapat dibuktikan dari pernyataan missionaris sebagai berikut:

"Sekarang adalah saat yang baik untuk menguasai Nias, penduduk kembali ke tempat kediamannya dan desa-desa sudah penuh dengan penduduk".⁵⁾

Dari kenyataan di atas jelaslah bagaimana peranan misi dalam mengamankan daerah yang belum dikuasai Belanda melalui penginjilannya sehingga misi tersebut seakan-akan dijadikan perisai oleh Belanda untuk kepentingan kekuasaannya. Setelah daerah itu dapat dikristenkan, maka akan mudah bagi Belanda untuk menanamkan pengaruh dan kekuasaannya. Selanjutnya missionaris tersebut menyatakan sebagai berikut :

"Untuk melindungi penduduk serta missionaris yang telah kembali, tahun 1900 sampai 1901 diadakan kegiatan-kegiatan patroli".⁶⁾

Dengan cara ini maka seluruh daerah Nias pada permulaan abad ke 20 telah dikuasai Belanda. Daerah Nias pada mulanya hanya diperintahkan oleh seorang kontroler, kemudian telah ditempatkan seorang asisten residen dan menjadi wilayah Keresidenan Tapanuli. Daerah pesisir yang lain yang dikuasai Belanda ialah Natal. Natal diperoleh Belanda dari Inggris setelah Inggris meninggalkan Sumatera sesuai dengan persetujuan yang dilakukan kedua negara itu. Pada masa penjajahan Inggris, untuk menanamkan kekuasaannya telah dicoba melakukan penginjilan ke daerah Natal ini. Pendeta Ward dan Burton yang berasal dari gereja Baptis tidak berhasil melakukan penginjilan, karena daerah ini penduduknya telah menganut Agama Islam. Kegagalan misi ini menyebabkan

kan Belanda dalam menanamkan kekuasaannya di Tapanuli Selatan menempuh jalan lain untuk dapat sukses.

Sebagaimana telah dinyatakan di atas, daerah pantai barat Sumatera merupakan daerah kekuasaan gubernur pantai barat yang berkedudukan di Padang. Daerah pesisir pantai barat Sumatera juga merupakan bagian dari wilayah kekuasaan gubernur pantai barat. Pantai barat Sumatera Utara yang dikuasai Belanda itu merupakan bagian dari wilayah kekuasaan karesidenan yang berpusat di Air Bangis. Setelah wilayah Belanda di pantai barat semakin meluas, daerah pantai barat Sumatera Utara berada di bawah Keresidenan Tapanuli yang berkedudukan di Sibolga.

Belanda mulai menguasai Tapanuli dari daerah selatan, yaitu melalui Natal. Sejak berdirinya, kekuasaan gubernur pantai barat di Natal telah ditempatkan seorang asisten residen yang menguasai wilayah Mandailing dan Angkola. Di sini pernah berkuasa Asisten T.Y. Willer dan kemudian Douwes Dekker yang kemudian terkenal dengan nama Multatuli. Di dalam penguasaan daerah Tapanuli Selatan ini Belanda menghadapi kesulitan-kesulitan, karena penduduk mempunyai prasangka terhadap Belanda, apalagi karena penduduknya beragama Islam. Selain itu, pengaruh Perang Paderi yang juga melibatkan daerah ini menyebabkan Belanda mengalami kesukaran untuk memperluas kekuasaannya.

Untuk menghadapi persoalan ini Belanda lebih hati-hati sehingga dalam usahanya menyebarkan pengaruhnya terpaksa mendekati para tokoh terkemuka dalam masyarakat seperti ketua adat. Belanda berusaha memasukkan pengaruh Barat melalui jalur pendidikan. Di setiap tempat yang dikuasai pada pertengahan abad ke-19, Belanda mendirikan sekolah-sekolah *Volkschool* untuk memikat hati rakyat. Dengan cara demikian Belanda sudah dapat membentuk golongan di kalangan rakyat yang sekurang-kurangnya tidak menentang Belanda. Cara yang dilakukan Belanda ini ternyata berhasil. Melalui daerah Tapanuli Selatan inilah sebenarnya pengaruh Barat masuk ke Sumatera Utara yaitu Natal. Sebagai permulaan dari penguasaan daerah Tapanuli Selatan atau Mandailing dan Angkola, pesisir selatan dan pantai barat Sumatera Utara telah dikuasai.

Di bagian utara pantai barat Sumatera Utara sebenarnya Belanda telah mendirikan kantor-kantor dagang yakni Belanda inilah kemudian terjadi perluasan pengaruh ke daerah Belanda inilah kemudian terjadi perluasan pengaruh ke daerah pesisir utara pantai Sumatera Utara bagian barat. Dari Barus melalui misi gereja Kristen, Belanda meluaskan pengaruhnya ke daerah pedalaman. Pada pertengahan abad ke-19, Belanda telah pula menguasai daerah pesisir ini sepenuhnya sejalan dengan penguasaan Belanda ke Nias. Kenyataan ini jelas diketahui dengan berdirinya Keresidenan Tapanuli yang berpusat di Sibolga pada tahun 1842.

2.3.2 Penguasaan Belanda atas Daerah pedalaman Tapanuli

Di daerah pedalaman Tapanuli berdiam suku bangsa Batak yang pada waktu itu sebagian besar masih belum beragama. Mereka terdiri atas suku bangsa Batak Toba dan Dairi. Di daerah selatan berdiam suku bangsa Batak Angkola. Batak Angkola yang mendiami daerah sekitar Sipirok sebagian menganut Agama Islam. Daerah kediaman mereka itu boleh dikatakan tertutup. Hubungan dengan dunia luar daerah Barus di utara dan selatan dilakukan melalui daerah Natal, sedangkan yang berada di daerah Porsea terjalin hubungan dengan daerah pantai timur Sumatera Utara. Daerah-daerah yang tertutup mempunyai corak kehidupan yang agak berlainan dengan daerah pesisir. Kebudayaan dan adatnya masih menunjukkan kemurnian. Pada waktu kaum Paderi menguasai daerah Tapanuli, mereka juga sampai ke daerah Batak tersebut. Pasukan Paderi mencoba secara paksa agar penduduk tersebut menganut Agama Islam, sehingga penduduk daerah itu menentangnya. Penyebaran Agama Islam terhadap daerah Batak Toba tidak berhasil malahan penduduk menjadi anti terhadapnya. Keadaan ini menyebabkan mereka menjadi curiga terhadap sesuatu yang datang dari luar. Hubungan dengan Aceh ada tetapi cenderung bersifat perdagangan. Kuda-kuda Batak yang terdapat di Tanah Batak dijual ke Aceh untuk perlengkapan tentara Aceh. Melalui perdagangan inilah terjadi pemasukan unsur-unsur yang bersifat Islam di kalangan suku bangsa Batak seperti mistik-mistik

agama. Karena itu kehidupan masyarakat Batak masih dalam keadaan yang asli.

Susunan pemerintahan jauh berbeda dengan daerah lain. Pemerintahan yang bersifat *monarchie* tidak dikenal mereka itu. Setiap desa merupakan suatu kesatuan tersendiri dan mempunyai kedudukan yang berdaulat. Ikatan di antara mereka hanyalah diatur oleh adat yang merupakan suatu unsur persatuan di antara mereka itu. Di antara desa dengan desa sering terjadi peperangan disebabkan masalah-masalah daerah pertanian dan lain-lain. Walaupun demikian di antara kepala-kepala adat itu ada yang mengakui seorang raja yang bukan berkuasa karena mahkotanya tetapi karena dianggap oleh rakyat sebagai mempunyai kesaktian. Raja itu ialah Sisingamangaraja yang bertahta di Bakkara. Kepatuhan penduduk terhadapnya sangat besar dan ini disebabkan mereka percaya bahwa Sisingamangaraja itu dapat melakukan berbagai kesaktiannya. Kalau suatu daerah dengan daerah yang lain berperang dan Sisingamangaraja sedang berada di daerah itu maka perang terhenti. Demikian menurut penuturan penduduk di daerah tersebut. Dari penguraian di atas jelas daerah itu sangat terisolasi dan jarang terjadi hubungan dengan daerah-daerah lain. Karena itulah maka Belanda berusaha memasuki daerah tersebut dan dapat pula melebarkan pengaruhnya ke daerah itu. Sebagaimana telah dikatakan jalan yang terbaik untuk menguasai daerah itu satu-satunya cara hanyalah dengan mengirim misi Agama Kristen ke pedalaman.

Sebelum Belanda memasuki daerah pedalaman tersebut terlebih dahulu Belanda mengumpulkan data sebanyak-banyaknya tentang tanah Batak tersebut. Beberapa ahli orientalis dikirim Belanda untuk menyelidiki dan mengumpulkan data tentang daerah Batak. Di antara ahli tersebut yang terkenal ialah Van der Tuuk. Ia lama tinggal di Barus dan hidup sebagai pedagang kopi. Melalui pekerjaannya itu ia banyak bergaul dengan penduduk yang berasal dari daerah pedalaman. Salah satu hasil yang terkenal dari Van der Tuuk adalah penyusunan *Kamus Batak dan Belanda*. Hasil yang dicapai oleh Van der Tuuk itu sangat besar sekali perannya bagi sukses Belanda memasuki pedalaman Tanah Batak kemudian.

Sebelum adanya penyelidikan oleh Van der Tuuk telah dua kali terjadi kegagalan dalam penyebaran Injil ke daerah pedalaman ini. Para penginjil yang kedua malah mengalami keadaan yang tragis. Lyman dan Munso, dua orang penginjil dari Boston, Amerika, terbunuh di Lubu Pinang pada tahun 1834. Mereka terbunuh karena kecurigaan penduduk terhadap orang-orang asing yang dianggap mengganggu ketenteraman kehidupan mereka. Hal ini disebabkan mereka telah merasakan pahitnya daerah mereka sewaktu terjadinya serangan Paderi sehingga mereka senantiasa waspada. Kegagalan Missi Babtis dari Amerika itu kemudian diambil alih oleh missi dari Negeri Belanda. Dengan berpedoman kepada hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh Van der Tuuk, *Nederlandsche Zendings Gencotschap* pada tahun 1856 mengirim missinya ke Tanah Batak.

Berbeda dengan missi sebelumnya yang memusatkan tempat penginjilan di Sibolga, missi Belanda ini berpusat di Sipirok yaitu daerah Angkola. Dipilihnya tempat ini sebagai pusat missi karena daerah ini mempunyai banyak persamaan dengan daerah Batak Toba daripada daerah Sibolga yang berada di daerah pesisir, di mana kebudayaannya telah lebih mendekati kebudayaan Melayu. Keputusan yang diambil oleh missi Belanda ini menyimpang dari ketentuan Van der Tuuk. Namun demikian missi ini berhasil juga menyebarkan penginjilan. Sebagai penginjil yang pertama bergerak dari Sipirok ialah G. Van Asselt. Ia memulai penginjilannya dari Sipirok ke utara yaitu Tanah Toba. Dalam penginjilan ke Tanah Batak ini ia dibantu oleh Klammer, Heine, dan Bets. Dari Sipirok ia bergerak ke Tapanuli Utara, tempat kediaman suku bangsa Batak Toba. Daerah yang pertama sekali dilalui adalah daerah Sarulla dan kemudian Silindung. Kedua daerah ini mempunyai panorama yang indah sehingga sangat menarik perhatian bagi para zending itu. Berbeda dengan missionaris sebelumnya, mereka lebih mudah mendekati penduduk setempat sehingga pekerjaan penginjilannya lebih berhasil dan sukses. Di daerah Sigumpulon Heine berhasil menarik beberapa orang penduduk untuk menganut Agama Kristen. Walaupun penduduk ada yang menerima agama baru itu, tetapi mereka sangat sulit meninggalkan segala kebiasaan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat

Batak yang sangat terikat kepada Dalihan na Tolu, yaitu Hulahula, Boru, dan Dongan Tubu. Karena itu, apa yang telah dirintis oleh Heine kemudian mentah kembali. Hal yang penting adalah bahwa mereka telah mengenal suatu agama yang baru yaitu Kristen dan ini sangat penting bagi kelanjutan missinya. Dari segi keberhasilan kalau diteliti memang tidak sebagaimana yang diharapkan, tetapi Van Asselt telah meletakkan suatu dasar bagi kelanjutan misi Kristen.

Karena lambannya gerak *Nederlandsche Zending Genootschap* dalam penyebaran Injil, maka usaha misi itu kemudian dilanjutkan oleh misi dari Jerman yaitu *Rheinische Mission Gesellschaft*. Misi Jerman yang beraliran Luther itu lebih dapat menyesuaikan dirinya dengan penduduk Batak, tidak seperti misi Belanda yang bersipat puritan. Pelopor dari RMG adalah Nomenzen. Berbeda dengan misi Belanda ia mengambil kebudayaan pertama sekali di Barus. Di sini ia kembali mengikuti jejak Van der Tuuk dengan lebih dahulu mengadakan persiapan-persiapan dalam penyebaran Injil ke Tanah Batak.

Dengan mengetahui bahasa dan kebudayaan Batak, mulailah ia menuju ke pedalaman. Perjalanan pertamanya ke Sipirok dan dari sana ia kemudian melanjutkan ke daerah Silindung. Tujuan akhir ini sesuai dengan instruksi dari pusat penginjilannya di Barmen. Dalam missinya ini Nomenzen berhasil mengristenkan penduduk sekitar Silindung dan di antaranya Raja Pontas Lumban Tobing, seorang raja adat. Keberhasilannya ini terjadi karena sebelum ia melakukan penginjilan, lebih dahulu ia mengadakan hubungan dengan raja-raja adat.

Sisingamangaraja XII aktif pula mengembangkan kepercayaan yaitu Pormalim. Dengan penyebaran agama ini di kalangan masyarakat Batak, ia mengharapkan pemerintahnya dapat lebih terkonsolidasi dan persatuan di kalangan masyarakat Batak dapat tercapai karena selama ini antara desa dengan desa sering terjadi perkelahian. Dengan tindakan-tindakan Sisingamangaraja XII itu maka dalam waktu yang singkat tercapai suatu kesatuan baik dalam pemerintahan maupun dalam agama seperti Parbaringin untuk pemerintah dan Pormalim untuk unsur-unsur keagama-

an. Penduduk Tanah Batak sangat patuh dan taat kepada Sisingamangaraja. Ia bukan hanya dipuja sebagai raja saja tetapi lebih dari itu ialah raja yang sakti.

Kemajuan-kemajuan Sisingamangaraja dalam mengkonsolidasikan masyarakat Batak sangat menggelisahkan penguasa Belanda di Sibolga karena dengan sendirinya usaha untuk menguasai Tanah Batak menjadi lambat dan mungkin saja tidak tercapai. Belanda menguasai daerah Toba dan seluruh Tapanuli. Setelah Perang Sisingamangaraja, Belanda mulai mengatur suatu pemerintahan di sana. Pemerintahan itu tentunya mempunyai bentuk yang sama dengan daerah-daerah lain yang telah dikuasainya. Tapanuli sebagaimana telah dibicarakan dalam penguraian di atas adalah suatu daerah keresidenan. Daerah keresidenan itu dibagi atas daerah yang lebih kecil yang disebut *afdeling* dan *onderafdeling*. Tiap-tiap *afdeling* diperintah oleh seorang asisten residen dan kontroler untuk wilayah *onderafdeling*.

Karesidenan Tapanuli dibagi menjadi tiga daerah *afdeling* yaitu *Nias*, *Mandailing en Angkola*, dan *Batak landen*. Kedudukan residen berada di Sibolga. Tiap-tiap *afdeling* itu dibagi lagi menjadi daerah *onderafdeling* dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Di bawah kekuasaan Belanda terdapat kekuasaan yang dikepalai oleh penduduk pribumi. Dahulu, sebelum adanya kekuasaan Belanda, telah ada suatu organisasi pemerintahan penduduk Tanah Batak. Daerah Batak Toba dibagi menjadi bius-bius yang masing-masing berdiri sendiri dan mempunyai kedudukan yang sama secara horizontal. Di bawah bius itu terdapat kekuasaan raja huta. Hubungan antara raja bius dengan raja huta adalah hubungan vertikal. Sesudah Belanda menguasai daerah Tapanuli, maka diadakan perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan itu dilakukan tanpa menghapuskan susunan yang telah ada dalam pemerintahan desa. Tujuan Belanda tiada lain adalah agar yang berhubungan dengan penduduk haruslah penduduk pribumi sendiri. Ini menyebabkan di Sumatera Utara susunan pemerintahan di kalangan bawah atau tingkat distrik berbeda-beda.

Di Tapanuli Utara, untuk tingkat desa atau huta diangkat penghulu yang tugasnya mengurus rodi dan pajak di desa sehingga

ia disebut juga penghulu rodi. Pemerintahan bius dihapuskan dan diganti dengan *onder district* yang membawahi negeri dan di bawahnya terdapat huta. Kumpulan negeri disebut distrik yang dikepalai oleh kepala distrik yaitu *asisten demang*. Di atas asisten demang terdapat pula demang yang mengepalai suatu distrik. Di Tapanuli Selatan kenegerian itu disebut *kuria* dan kepalanya disebut kepala kuria. Sebenarnya kekuasaan sejak distrik ke bawah diberikan kepada penduduk pribumi adalah untuk memperlancar jalannya pemerintahan dan pengutipan pajak-pajak penduduk. Selain itu, tugas kepala-kepala anak negeri adalah untuk melaksanakan peradilan adat. Pelaksanaan pemerintahan ini berlangsung terus sampai akhir pemerintahan Belanda di Tapanuli, yaitu dengan masuknya tentara Jepang ke daerah ini. Dengan sistem pemerintahan yang diajarkan Belanda di atas, kedudukan kepala-kepala bius dan pimpinan-pimpinan informal dalam masyarakat Batak banyak yang tersingkir dan hal inilah yang melahirkan perasaan tidak puas terhadap pemerintahan Belanda, sehingga sangat besar pengaruhnya kepada perlawanan penduduk di daerah ini terhadap pemerintahan penjajahan Belanda seperti Perang Sisingamangaraja dan perlawanan-perlawanan yang lain.

2.3.3 Penguasaan Belanda atas Wilayah Sumatera Timur

Wilayah pantai barat Sumatera Timur semakin penting pada pertengahan abad ke-19, karena banyaknya negara-negara asing ingin menguasai daerah ini. Hal ini disebabkan daerah pantai timur telah mempunyai kegiatan-kegiatan perdagangan dan hubungan dagang dengan Singapura. Salah seorang pedagang Inggris yang telah melihat prospek ini ialah Wilson. Ia mengadakan hubungan dengan sultan Siak, malahan ia membantu sultan dalam perselisihan tahta kerajaan. Atas bantuannya ia meminta pembayaran yang tinggi, tetapi ditolak sultan sehingga Wilson kemudian menentang sultan. Akibatnya sultan melarikan diri dan meminta pertolongan Belanda. Atas kegiatan Wilson itu kemudian Belanda memperotes terhadap Inggris yang melakukan pelanggaran terhadap Traktat London sehingga Inggris kemudian melarang kegiatan-kegiatan Wilson tersebut. Dengan protes tersebut Wilson meninggalkan daerah tersebut dan Belanda memulai kegiatannya

untuk menanamkan kekuasaan. Belanda melakukan suatu perjanjian dengan sultan yang terkenal dengan Perjanjian Siak (1858). Dalam perjanjian itu Siak mengakui kekuasaan Belanda yang meliputi wilayah Kesultanan Siak sampai ke daerah Tamiang di utara yang berbatasan dengan Kerajaan Aceh.

Kerajaan-kerajaan yang terletak di pantai timur Sumatera itu saling bersaing pula. Salah satu kerajaan yang terkemuka di antara kerajaan itu adalah Kerajaan Deli. Kerajaan ini sejak pertengahan abad ke-19 sangat maju perdagangannya dengan daerah-daerah luar terutama sekali dengan Singapura dan Penang. Dari daerah ini terdapat juga hasil lada dan pedagang-pedagang asing banyak pula memasukkan segala kebutuhan seperti kain-kain dari Madras dan candu sebagai tukarannya. Karena itu Kerajaan Deli menjadi terkenal. Kemajuan ini menimbulkan iri hati kerajaan-kerajaan yang lain. Kerajaan Deli mendapat perlindungan dari Kerajaan Aceh.

Kedudukan Kerajaan Deli dengan sendirinya melahirkan iri-hati Kerajaan Langkat. Kerajaan Langkat yang juga ingin maju dan berkembang mengadakan hubungan pula dengan Belanda. Bertepatan pula pada waktu itu di Kerajaan Langkat terjadi perselisihan antara sultan dengan Tuanku Hasyim yang mengancam kerajaan. Untuk itu sultan Langkat meminta bantuan kepada Belanda. Pada 1 Februari 1862 sultan Langkat menghadap Asisten Residen Bengkalis Eliza Netscher. Asisten residen ini tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik ini dan mengusahakan agar kerajaan-kerajaan di Sumatera Timur dapat pula mengakui *Perjanjian Siak* tahun 1858. Pada 1 Agustus 1862 berangkatlah Residen Eliza Netscher bersama-sama asisten residen dan kontroler disertai pula pejabat-pejabat dari Kesultanan Siak. Mereka menggunakan kapal perang *Reinier Classen*. Dalam perjalanan itu Belanda menyinggahi kerajaan-kerajaan di Sumatera Timur untuk meminta pernyataan mengakui ketentuan Perjanjian Siak yang telah ditandatangani dan juga berlaku di kerajaan-kerajaan tersebut. Kerajaan yang disinggahi adalah Kerajaan Panai, Bilah, Serdang, Asahan, dan Deli, Raja-raja dari kerajaan-kerajaan tersebut harus menandatangani suatu ketentuan yang disebut *Akte van Erken-*

ning (Pernyataan Persetujuan). Akte ini merupakan suatu pernyataan dari setiap raja dari kerajaan-kerajaan di Sumatera Timur untuk mengakui kekuasaan Belanda atas wilayahnya. Dalam akte ini disebutkan bahwa kerajaan-kerajaan itu harus mengakui Kerajaan Siak sebagai atasannya dan Pemerintah Hindia Belanda sebagai pemegang kedaulatan dari kerajaan itu. Kemudian juga disebutkan bahwa raja-raja itu tidak boleh berhubungan dengan orang-orang Eropa lainnya tanpa izin Pemerintah Belanda. Dengan akte tersebut jelas sekali bahwa seluruh kerajaan di daerah pantai harus mengakui kekuasaan Belanda. Dengan demikian Belanda telah aman dari gangguan bangsa-bangsa lainnya. Di tempat-tempat yang baru itu Belanda segera menempatkan pejabatnya. Dari daerah pantai ini kemudian Belanda melakukan penguasaan pula ke daerah pedalaman yaitu Simalungun dan daerah Tanah Karo.

Penguasaan Belanda terhadap daerah pedalaman berhubungan erat dengan pembukaan perkebunan di Sumatera Timur. Pembukaan perkebunan dimulai tahun 1863, yaitu setahun setelah penandatanganan *Akte van Erkenning* yang dilakukan oleh sultan Deli. Nienhuys pada tahun itu diberi konsesi tanah di Tanjung Sepat untuk mengusahakan perkebunan tembakau yang kemudian ternyata membawa hasil.

Kemajuan-kemajuan Belanda di Sumatera Utara baik di pantai barat, Tapanuli Utara maupun pantai pesisir, menjadikan raja-raja di daerah pedalaman seperti Simalungun menjadi curiga terhadap Belanda; karena itu di antara raja-raja Simalungun yaitu Raja Maropat (Raja Tanah Jawa, Raja Siantar, Raja Panai, dan Raja Silau) telah terjadi suatu perundingan dengan Sisingamangaraja yang sedang mengadakan perlawanan dengan Belanda di Tapanuli.

Raja Maropat di Simalungun telah menyusun suatu kekuatan bersenjata. Panglima besarnya dipercayakan kepada Tuanta Nambayan yang populer dengan sebutan Ronda Hein. Atas prakasa Panglima Besar Ronda Hein, dalam tahun itu juga berlangsung perundingan untuk mengatur siasat dan taktik serta menyusun kekuatan yang lebih besar dalam menghadapi Belanda.⁷⁾

Dari kenyataan itu jelaslah antara Tapanuli Utara dan Simalungun telah terjadi suatu kerjasama untuk membendung agresi

Belanda. Demikian pula dengan raja-raja di daerah pantai seperti raja Tanjung Kasau yang beragama Islam telah membentuk suatu persatuan. Hubungan dengan daerah ini memang erat karena penduduk Simalungun yang berdiam di daerah tersebut ada hubungan kekeluargaan dengan penduduk Simalungun di pedalaman. Pada tahun 1884 penguasa Belanda yang berada di daerah pesisir menurunkan raja Padang di Tebingtinggi. Tindakan Belanda ini dilakukan karena raja Padang yang berada di bawah naungan Kerajaan Serdang telah menandatangani *Akte van Erkenning*. Raja Padang Mohamad Nurdin meminta bantuan dari Rondahein yaitu Panglima perang dari raja-raja Simalungun. Hal inilah yang nantinya akan melahirkan perlawanan rakyat Simalungun melawan Belanda. Perang ini sebenarnya merupakan perlawanan yang dimulai oleh Sisingamangaraja, tetapi kemudian meluas ke seluruh dataran tinggi daerah Batak. Perang ini baru berakhir pada tahun 1907, yaitu dengan gugurnya Sisingamangaraja. Tokoh ini sangat penting dalam masyarakat karena masyarakat meletakkan kepercayaan kepada seseorang yang dianggapnya sakti atau mempunyai sifat yang dapat dicontoh.

Dengan berakhirnya Perang Batak atau *Batak Oorlog*, maka Belanda mulai menanamkan kekuasaannya di daerah dataran tinggi Sumatera Timur pada permulaan abad ke-20 boleh dikatakan telah aman dari perlawanan rakyat terhadap Belanda. Karena daerah yang dikuasai Belanda di Sumatera Timur cukup luas, maka Sumatera Timur dijadikan suatu keresidenan dengan Medan sebagai ibukotanya. Keresidenan Sumatera Timur pada waktu itu terdiri atas beberapa *afdeling* seperti *Simalungun*, *Karo landen*, *Deli en Serdang*, dan *Asahan en Riou ellanden*. Di setiap *afdeling* ditempatkan pula seorang asisten residen dan di bawahnya terdapat kontroler. Kekuasaan raja-raja atau kepala-kepala bumiputera tidak dihapuskan. Kekuasaan raja-raja itu berada dalam ketentuan *self bestuur* dan biasa disebut dengan pemerintahan *landschap*. Pemerintahan ini berbeda-beda pada setiap daerah dan disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing. Di daerah pesisir pantai di mana terdapat kerajaan-kerajaan seperti Deli, Serdang, Langkat, Asahan, dan lain-lain, raja merupakan penguasa di daerahnya. Ia mengatur pemerintahan melalui para datuk dan para penghulu

sebagai kepala desa. Di atas raja-raja ini terdapat kontroler yang membawahi suatu *onderafdeling* dan di atasnya terdapat *afdeling* yang dipimpin oleh asisten residen dan yang terakhir ini bertanggung jawab terhadap residen.

Di Simalungun Belanda merombak tata pemerintahan kerajaan yang telah ada. Sebelum kedatangan Belanda memang di Simalungun telah ada Kerajaan Maropat yaitu Kerajaan Silau, Siantar, Panai dan Tanah Jawa. Kerajaan ini ditambah Belanda lagi dengan Kerajaan Purba, Kerajaan Raya, dan Kerajaan Silima Kuta. Di bawah kekuasaan raja-raja ini Belanda membentuk daerah-daerah pertuanan yang merupakan bawahan dari raja, seperti perpertuanan Bandar, Dolok Batunanggar, Tiga Dolok, dan Negeri Dolok. Di bawah kekuasaan pertuanan ada pula perbapaan yang tidak memiliki wilayah tetapi bertugas menyampaikan perintah-perintah kepada penghulu atau kepala desa.

Dengan memecah kerajaan dan menambah penguasa-penguasa Belanda dapat menguasai wilayah itu sehingga pengaruh kerajaan menjadi menipis. Keadaan seperti ini juga terjadi di Tanah Karo. Organisasi pemerintahan di Tanah Karo sebelum datangnya Belanda terdiri atas Kesain yang menggepalai kelompok keluarga dan kemudian di atasnya terdapat raja kuta yang menggepalai satu desa atau kampung. Di atas kuta ada kekuasaan raja urung yang menggepalai suatu kelompok dari kuta. Sesudah kekuasaan Belanda didirikan di Tanah Karo, urung-urung itu disatukan pula dalam suatu kesatuan yang disebut sibayak. Di Tanah Karo terdapat lima sibayak yaitu Kuta Buluh, Lingga, Sarinembah, dan Suka. Penguasa wilayah sibayak merupakan kepala distrik, sedangkan urung menjadi *onderdistrict* dan kuta merupakan suatu kampung. Pimpinan kesain merupakan suatu pimpinan kelompok marga.

Dengan berhasilnya pengembangan kekuasaan administratifnya di Sumatera Timur ini boleh dikatakan kekuasaan Belanda telah berkembang di daerah ini. Karena itu dalam waktu yang singkat di Sumatera Timur tumbuh pula penanaman modal asing dalam bentuk perusahaan-perusahaan. Kebanyakan usaha itu dimiliki

oleh bangsa Eropa sedangkan bangsa Indonesia hanya menjadi buruh atau pegawai saja.

2.4 Masa Pendudukan Jepang

Pada pertengahan abad ke-20 dunia mengalami krisis yang akhirnya diakhiri dengan suatu kekerasan yaitu Perang Dunia II. Perang ini berlangsung dari tahun 1939 sampai 1945. Indonesia yang saat itu merupakan jajahan Belanda juga terlibat dalam peperangan tersebut. Jepang sudah lama mengharapkan agar wilayah di Asia Timur dapat menjadi bagian dari negaranya melalui perundingan dengan negara-negara Eropa akhirnya dengan kekerasan senjata berhasil pula. Boleh dikatakan seluruh daerah jajahan negara-negara Eropa di Asia jatuh ke tangan Jepang kecuali India. Pasukan Jepang yang menyerang Indonesia tidak dapat ditahan oleh Sekutu walaupun armada Sekutu di Laut Jawa mencoba menghalangi maksud Jepang itu.

Pada 9 Maret 1942 wakil Pemerintah Belanda untuk Indonesia Gubernur Jenderal Tjarda van Stakenbourg dan pimpinan tentara Belanda di Indonesia yaitu Ter Poorten menyerah kepada Jepang. Sejak itu jatuhlah seluruh jajahan Belanda ke tangan Jepang, dan berakhirilah masa kejayaan Belanda yang sudah berabad-abad di Indonesia.

Di Sumatera Utara pasukan-pasukan Belanda yang berada di bawah pimpinan Mayor Jenderal R.T. Overakker tidak bersedia mengikuti perintah menyerah tanpa syarat kepada Jepang sebagaimana yang telah dilakukan oleh pimpinan mereka di Jawa. Mereka memutuskan untuk melakukan peperangan di hutan-hutan menghadapi Jepang sampai waktu yang tidak dapat ditentukan. Untuk melaksanakan hal ini mereka memang telah melakukan persiapan-persiapan. Mereka telah menyediakan perbekalannya di Gunung Setan yaitu di daerah perbatasan antara Aceh dan Sumatera Utara.

Untuk memaksa pasukan Belanda yang belum mau tunduk kepada perintah dari Jawa, Tentara Ke-25 Jepang yang berpusat di Singapura mengirimkan pasukannya untuk melakukan penyerbuan ke Pulau Sumatera. Pendaratan tentara Jepang di Sumatera Utara

dilakukan di Pelabuhan Tanjung Tiram (Batu Bara) Asahan pada 11 Maret pukul 12.00. Pasukan Jepang yang mendarat di Tanjung Tiram itu kemudian dibagi menjadi tiga kelompok.

Pasukan Belanda yang telah mengetahui pendaratan Jepang itu mengundurkan diri ke pegunungan. Ada yang melalui jalan Tarutung ke Sidikalang terus ke Gunung Setan, ada yang melalui Dataran Tinggi Karo kemudian bertemu di Gunung Setan sebagaimana yang telah dibicarakan. Tentara Jepang terus bergerak mengejar mereka ke tempat pertahanan terakhir. Di samping itu bantuan masyarakat terhadap pasukan Belanda pun tidak ada. Karena kegagalan ini, maka pada bulan Maret itu juga Mayor Jenderal Overakker beserta pasukannya menyerah kepada Jepang. Dengan peristiwa ini maka berakhirilah penjajahan Belanda di Sumatera Utara. Sumatera Utara mulai memasuki babak baru di tangan penjajah Jepang yang lazim disebut dengan Masa Pendudukan Jepang. Jepang mulai menjalankan pemerintahannya yang disebut dengan Pemerintahan Pertabiran Militer Jepang. Pemerintahan Pertabiran Militer Jepang di Sumatera Utara dilaksanakan sesuai dengan pembagian kesatuan-kesatuan angkatan perangnya. Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah yang berdiri sendiri, yaitu Sumatera, Jawa, dan Indonesia Timur. Pembagian wilayah di Pulau Sumatera tetap seperti masa pemerintahan Belanda. Hanya pusat pemerintahan bukan lagi di Medan melainkan di Bukittinggi. Pemindahan pusat pemerintahan dari Medan ke Bukittinggi mungkin dilakukan atas dasar strategi perang.

Bukittinggi berada di bawah kekuasaan *tyokan kakka* atau gubernur. Sumatera Utara waktu itu terdiri atas Keresidenan Sumatera Timur dan Tapanuli. Tiap-tiap keresidenan diperintah oleh *buntzucho* atau asisten residen di zaman pemerintahan Belanda. Pemerintahan di bawah kekuasaan *buntzucho* dipegang oleh *zelfbestuur* terus berjalan dalam tingkat sebagaimana berlangsung sebelumnya. Pemerintahan Pertabiran Militer Jepang mengetahui bahwa struktur pemerintahan buatan Belanda tidak perlu diubah karena bentuk itu sangat praktis di mana penguasa dapat berhubungan dengan rakyat melalui pemimpin mereka masing-masing.

Pemerintah Pertabiran Militer Jepang melaksanakan peme-

rintahan di Sumatera Utara sesuai dengan tujuan perang, yaitu mengerahkan segala potensi yang ada di daerah ini untuk mencapai kemenangan perang mereka. Karena tujuan itu maka segala kegiatan senantiasa dihubungkan dengan kepentingan militer.

Melalui kepala-kepala, anak negeri penduduk diwajibkan menyediakan segala kebutuhan tentara seperti beras, lau-pauk, dan sayur-mayur bagi tentara Jepang. Mereka harus pula menyediakan tenaga kerja untuk membangun pertahanan Jepang. Dalam situasi seperti inilah pemimpin-pemimpin penduduk merasakan bagaimana pahit-getirnya masa penjajahan Jepang. Hal ini dilakukan Jepang karena segala kebutuhan makanan tentara Jepang diperoleh dari daerah di mana mereka berada, sedangkan untuk mendatangkan dari luar tidak mungkin, karena lautan dikuasai armada Sekutu.

BAB III PERLAWANAN TERHADAP PENJAJAHAN ASING DI SUMATERA UTARA

3.1 Latar Belakang Perlawanan

Sebagaimana telah diuraikan di atas, pada pertengahan abad ke-19 Sumatera Utara mulai mengalami persentuhan-persentuhan dengan bangsa Barat, terutama bangsa Belanda dan Inggris. Persentuhan semula merupakan hubungan perdagangan antara dua bangsa yang sederajat dan masing-masing dengan memperoleh keuntungan. Dalam taraf-taraf demikian tidaklah terjadi pertentangan-pertentangan, tetapi kemudian bangsa-bangsa Eropa saling bersaing untuk memperoleh barang dagangan. Hal ini melahirkan persaingan yang tidak sehat di antara mereka bahkan menciptakan perkelahian bersenjata. Malahan kemudian hak-hak mereka atas penguasa-penguasa setempat merasa telah diperkosa oleh pedagang-pedagang Eropa, misalnya tindakan monopoli yang dilakukan penguasa Eropa terhadap daerah yang telah berada di bawah pengaruhnya sehingga menimbulkan perlawanan bersenjata terhadap orang-orang Inggris dan Belanda.

Setelah perlawanan-perlawanan penduduk dan penguasa pantai terhadap bangsa Eropa dapat dipadamkan oleh bangsa Eropa dan mereka dapat mengembangkan kekuasaannya di daerah pesisir, timbulah ketegangan-ketegangan antara penguasa baru dengan penduduk. Penduduk yang biasanya hidup dalam norma-norma yang diatur oleh hukum adat dan nilai-nilai budaya turun-temurun, ke-

mudian mengalami pergeseran nilai-nilai baru yang dibawa oleh bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang datang dan membentuk kekuasaan itu segera merombak struktur pemerintahan.

Masyarakat lapisan bawah memang tidak terganggu, tetapi wewenang pejabat-pejabat seperti sultan, raja, datuk-datuk, dan lain-lain menjadi sangat berkurang sekali. Usaha mereka untuk menyebarkan agama yang dianutnya pun melahirkan kecurigaan masyarakat Indonesia.

Semua itu dianggap oleh masyarakat sebagai pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma yang telah ada. Perkembangan kekuasaan Belanda yang terus meluas membuat terjadinya jurang pemisah yang semakin besar pula antara penguasa dengan rakyat. Kebencian-kebencian terhadap penjajahan itu semakin mendalam di kalangan rakyat, karena masyarakat Indonesia yang selama ini hidup dengan tenteram dipecahbelah oleh pihak penguasa.

Sebagai contoh banyak raja dipaksa turun dari jabatannya dan digantikan oleh raja-raja yang lain sesuai selera Belanda. Di Simalungun misalnya, Raja Siantar Sang Na Waluh dibuang ke Bengkalis karena tidak disukai Belanda walaupun ia sangat dicintai rakyat. Pembukaan perkebunan-perkebunan di sekitar desa-desa menyebabkan kehidupan desa menjadi terganggu karena lahirnya masyarakat asing di sekitarnya seperti buruh-buruh yang didatangkan dari luar Indonesia seperti Cina, India dan lain-lain. Hal ini melahirkan perombakan masyarakat desa secara tidak langsung, sehingga menimbulkan perlawanan-perlawanan di Sumatera Utara terhadap penjajahan sejak akhir abad ke 19 dan permulaan abad ke-20. Perlawanan pada waktu itu pada umumnya merupakan perlawanan yang bersifat fisik seperti Perang Sisingamangaraja (1877 -- 1907) yang meluas ke daerah-daerah Dairi dan Simalungun. Demikian pula dengan perang Sunggal tahun 1872 di sekitar Medan dan perlawanan Rondahein di Simalungun serta banyak lagi yang lain.

Seluruh perlawanan terhadap Belanda pada permulaan abad ke-20 boleh dikatakan tidak berhasil, karena tujuan yang jelas tidak ada dan hanya berdasarkan kepada tokoh-tokoh karismatis. Walaupun demikian hikmahnya tetap ada. Dalam sanubari rakyat tetap terpendam perasaan tidak senang terhadap penguasa Belanda.

Perasaan tidak puas dan tidak senang semakin lama semakin mendalam karena ulah dan tindakan-tindakan Belanda sendiri.

Belanda menindas rakyat dengan memaksa rakyat untuk membayar belasting tanpa memperhitungkan apakah daerahnya subur atau penduduknya dapat membayar pajak tanpa mengganggu kebutuhan hidupnya. Paksaan-paksaan membayar pajak ini dilakukan melalui penghulu-penghulu. Bagi yang tidak membayar pajak dipaksa bekerja rodi atau ditahan. Pemimpin rakyat non-formal seperti pemimpin adat dan agama setiap waktu diikuti dan diawasi.

Di kalangan penduduk sendiri diadakan pembedaan-pembedaan atau lebih jelas lagi disebut dengan istilah diskriminasi. Kehidupan masyarakat terpisah-pisah seperti Kampung Jawa, Melayu, Cina, dan lain-lain. Pemisahan-pemisahan ini sengaja diperbuat untuk memecahbelah penduduk. Yang sangat menyedihkan adalah fasilitas bagi orang-orang asing seperti Cina lebih banyak sebagai pekerja di perkebunan atau membuka usaha dagang secara memborong pekerjaan-pekerjaan. Di perkebunan-perkebunan, orang-orang Cina itu dikepalai oleh kepala-kepala mereka yang disebut tandil. Tandil ini dipercaya Belanda untuk mengurus segala pekerjaan di perkebunan di daerah Sumatera Timur.

Penduduk setempat tidak mendapat perhatian sehingga kehidupan rakyat merosot sekali. Jarang orang Indonesia mempunyai rumah sendiri di kota-kota dan dipedesaan boleh dikatakan umumnya tinggal di rumah yang sebenarnya hanya untuk hewan. Di daerah perkebunan juga demikian keadaannya. Walaupun perumahan diberikan tetapi tidak layak. Berpuluh keluarga tinggal dalam suatu bangsal yang besar dan hanya dibatasi dengan dinding penyekat.

Gaji mereka hanya cukup untuk makan saja. Agar mereka itu dapat tetap tinggal di kebun, sengaja diadakan arena perjudian pada tanggal-tanggal buruh menerima gaji. Dengan demikian para buruh itu tetap tinggal di daerah perkebunan karena setiap habis kontraknya terpaksa mengikat kontrak yang baru pula. Hal ini tidak saja terasa oleh penduduk yang mendiami kebun tetapi juga

desa-desa yang ada di sekitarnya. Penduduk desa yang ada di sekitarnya keranjingan berjudi pula.

Segala sistem penjajahan di daerah ini melahirkan kemerosotan dalam kehidupan rakyat di Sumatera Utara. Sebaliknya kehidupan bangsa Belanda yang berkuasa pada waktu itu sangat baik. Mereka mempunyai lingkungan hidup tersendiri yang cukup baik dan terpisah dari penduduk Indonesia. Hal ini merupakan jurang pemisah yang sangat besar antara penduduk dengan penguasa. Tempat-tempat rekreasi yang baik seperti peristirahatan di Danau Toba dan Berastagi hanya dapat dinikmati oleh bangsa Belanda. Penduduk tidak boleh mendekatinya. Perbedaan sosial yang sangat mencolok ini kemudian menimbulkan suatu garis yang tidak dapat dipertemukan antara pihak penguasa dengan penduduk.

Munculnya pergerakan kebangsaan di Pulau Jawa pada permulaan abad ke-20 membangkitkan semangat penduduk untuk memulai suatu gerakan perlawanan terhadap penjajahan waktu itu. Keadaan buruh perkebunan yang sangat buruk itu membangkitkan gerakan-gerakan kebangsaan di daerah ini, karena banyak pegawai-pegawai rendahan dari suku bangsa Jawa yang tinggal di daerah ini turut pula mendirikan Budi Utomo. Misalnya Iwa Kusuma Sumatra pernah tinggal di Kota Medan dan membuka kantor advokad atau pembela. Di desa-desa yang dekat dengan perkebunan lahir pula sekolah Budi Utomo yang seluruh gurunya terdiri atas suku bangsa Jawa. Perguruan inilah yang dikemudian menjelma menjadi Taman Siswa.

Pertumbuhan golongan yang dapat membaca dan menulis dan adanya pegawai-pegawai rendahan bangsa Indonesia baik yang bekerja untuk Pemerintah. Belanda maupun di perkebunan-perkebunan merupakan pelopor lahirnya segolongan masyarakat Indonesia di Sumatera Utara yang sadar akan nasib bangsanya.

Mereka menyadari bahwa perjuangan untuk memperbaiki keadaan sosial bangsanya itu tidak dapat dilakukan dengan kekerasan. Perjuangan sekarang harus dilakukan dengan cara baru yaitu menggunakan kesadaran berbangsa dan menanamkan perasaan kebangsaan dengan menggunakan senjata politik untuk menghadapi Belanda. Melalui mas media yang didirikan oleh beberapa tokoh

mulailah gerakan yang bersifat politik bergerak di Sumatera Utara. Sebagai contoh harian *Tapian Nauli* yang terbit di Sibolga. Dari sinilah kemudian berkembang secara nasional seperti *Pewartu Deli* dan *Sinar Deli*. Dengan adanya surat-surat kabar, pergerakan politik untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial semakin meluas tidak saja di kalangan kaum terpelajar tetapi juga di kalangan masyarakat lainnya. Gerakan yang dulunya terpendam untuk menghadapi pemerintah kolonial itu sekarang menga-
 lihatkan kegiatannya dalam kegiatan politik.

Kegiatan menghadapi pemerintah kolonial Belanda semakin meningkat karena organisasi politik tidak lagi melakukan pemisahan antara suku-suku yang ada. Perjuangan menjadi jelas dan mempunyai tujuan untuk membebaskan seluruh tanah air dari kekuasaan Belanda. Dengan mencapai kemerdekaan maka perubahan kehidupan yang lebih baik dalam segala bidang akan tercapai, karena itu penjajahan haruslah dihapuskan. Perjuangan bukan lagi sifat kesukaran atau kedaerahan tetapi harus bersama. Dengan berakhirnya kekuasaan Belanda di Sumatera Utara sejak awal tahun 1942, perasaan kebangsaan di Sumatera Utara telah sampai pada puncaknya.

Jepang yang menguasai Sumatera Utara sejak 1942 -- 1945 yang diharapkan dapat memberikan angin. baru bagi kehidupan bangsa Indonesia ternyata tidak seperti yang diharapkan. Semula rakyat banyak membantu Jepang dengan harapan bahwa Jepang akan segera mengadakan perubahan-perubahan kehidupan sosial dan politik di daerah ini, tetapi tindakan Jepang setelah berkuasa ternyata sangat bertentangan dengan harapan rakyat.

Tokoh-tokoh rakyat dari pergerakan yang dahulu membantu banyak yang ditangkap dengan tuduhan melakukan perampokan-perampokan. Partai-partai politik kemudian dibubarkan dan segala bentuk kegiatan rakyat harus mengikuti garis-garis politik Pemerintah Jepang. Sejak itu perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan daerahnya dari penjajahan terpaksa mencari jalan lain. Gerakan-gerakan di bawah tanah dan illegal mulai dilakukan. Persiapan-persiapan menghadapi Jepang melalui perjuangan fisik mulai pula dihimpun. Gerakan itu disusun baik melalui penyusupan

ke dalam organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh Jepang maupun secara gelap. Pada masa ini sebenarnya segala kehidupan bangsa Indonesia di daerah Sumatera Utara telah sampai kepada titik yang sangat menyedihkan.

Penduduk tidak dapat berbicara dengan leluasa karena di mana-mana berkeliaran mata-mata *kempetai* (polisi militer Jepang) yang setiap saat dapat membuat orang yang dicurigai cacat atau mati. Karena itu penduduk menjadi ketakutan. Keadaan ekonomi yang sangat buruk juga merupakan suatu faktor yang menimbulkan semangat rakyat bangkit untuk melawan Jepang. Kenyataan ini dapat terlihat dari gerakan-gerakan yang tumbuh secara spontan menentang Jepang. Seluruh kenyataan di atas itu merupakan suatu misal yang kuat bagi lahirnya keinginan untuk cepat memerdekakan diri dari penjajahan asing. Karena itu proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan di Jakarta pada 17 Agustus 1945 secara spontan mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa perlawanan terhadap kolonialisme di Sumatera Utara mempunyai latar belakang yang sangat luas. Latar belakang itu dapat diketahui dengan mempelajari keadaan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat dan sekaligus juga struktur politiknya. Dari penelitian unsur-unsur tersebut dapatlah kita melihat motif-motif itu untuk seluruh wilayah tidaklah sama, karena setiap tempat mempunyai keadaan sosial, ekonomi, dan budaya yang berada.

3.2 Ujud Perlawanan

Sebagaimana telah diuraikan, ujud perlawanan di setiap daerah mempunyai sifat yang berbeda. Perbedaan itu terjadi karena kehidupan sosial, budaya, dan perekonomian masyarakat itu berbeda pula. Tidak saja unsur tersebut tetapi juga permasalahan lahir pun berbeda pula.

Berdasarkan hal tersebut maka perlawanan terhadap kolonialisme di Sumatera Utara memang banyak perbedaan-perbedaannya. Perbedaan-perbedaan inilah yang menyebabkan adanya pembedaan antara suatu periode dengan periode yang lain. Periode atau pembabakan dalam bentuk perlawanan itu dapat kita pisahkan

sebagai berikut.

- 1) Periode 1850 – 1907, perlawanan yang bersifat sosial budaya dan ekonomi, dan
- 2) Periode 1907 – 1945, perlawanan yang bersifat politik

Pada periode pertama, penduduk Sumatera Utara yang pada masa-masa sebelumnya hidup dalam alam yang merdeka mengalami sentuhan-sentuhan dengan bangsa Eropa. Persentuhan itu pada mulanya tidak menimbulkan pertentangan-pertentangan karena penduduk setempat menganggap hubungan yang terjadi sama dengan bangsa Asia seperti India dan Cina.

Sebagaimana diketahui, sepanjang pesisir pantai Sumatera sejak dahulu telah ada kontak-kontak dengan bangsa asing lainnya. Tetapi kenyataan-kenyataan kemudian tidak demikian halnya. Bangsa Eropa yang datang mencoba untuk memaksakan segala keinginannya dengan memaksa penduduk untuk mengikuti segala peraturan dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh ialah terjadinya monopoli dagang yang hanya dikenal dalam kehidupan masyarakat kapitalis. Struktur sosial dan budaya yang dibawa ingin pula diterapkannya dalam masyarakat. Pemaksaan seperti ini tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat. Hal ini melahirkan perlawanan penduduk terhadap bangsa-bangsa Eropa. Kenyataan ini dapat kita lihat dari kutipan di bawah ini :

Pelabuhan Inggris yang diserahkan pada Belanda seperti Natal, Sibolga, Barus menjadi pusat dari pasukan Belanda. Kedudukan Belanda di sana banyak mendapat tantangan dari rakyat karena Belanda menitikberatkan perekonomiannya menuju monopoli dan kekerasan. . . 1).

Pada periode kedua ujud perjuangan bersifat politis, karena untuk mencapai segala tujuan dari perjuangan yang pertama satu-satunya jalan ialah penjajahan harus diakhiri. Berdasarkan titik tolak pemikiran tersebut maka lahirlah suatu perjuangan yang bersifat politis dengan cara menghimpun segala potensi yang ada melalui kegiatan politik menentang pemerintahan Belanda. Pada masa inilah tumbuh organisasi-organisasi politik di daerah ini baik yang bersifat sekular maupun yang bersifat agama. Tidak saja ke-

Belanda. Pada mulanya pihak Belanda tidak begitu mengindahkan kegiatan tersebut berlangsung dalam bidang politik tetapi juga dalam bidang sosial budaya seperti pendidikan, kesenian, dan kependuan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa perlawanan pada waktu ini menggunakan segala potensi yang ada agar penjajahan itu dapat segera berakhir.

3.3 Jalannya Perlawanan

Sebagaimana telah diuraikan di atas, perlawanan menghadapi Belanda di Sumatera Utara dapat dibagi menjadi dua periode sesuai dengan ujud dari perlawanan itu sehingga dalam uraian berikut penulis juga memakai dasar tersebut untuk menjelaskan perlawanan itu.

3.3.1 Periode 1900 -- 1907

Pada tahun 1800 perhatian Belanda dan Inggris ditujukan ke daerah pantai Sumatera Utara terutama di pantai barat yang berbatasan dengan Samudera Hindia. Daerah ini memang mempunyai hasil yang banyak dan dapat diperdagangkan ke luar negeri seperti kopra, kopi, dan hasil-hasil lainnya. Negara-negara Eropa kemudian memaksa penduduk untuk melakukan penjualannya kepada mereka dengan harga yang telah ditentukan (monopoli). Tindakan bangsa Eropa itu melahirkan kemiskinan rakyat yang mendiami pantai dan ini menjadi suatu kasus meletusnya perlawanan di daerah ini. Beberapa pemimpin di daerah sepanjang pantai ini dapat menggerakkan rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Sebagai contoh dari perlawanan tersebut antara lain ialah perlawanan terhadap Belanda di Nias.

3.3.1.1 Perlawanan terhadap Belanda di Nias

Sejak tahun 1825 sebenarnya Belanda telah menempatkan pasukannya di Nias, tetapi kemudian ditarik kembali karena di Jawa sedang berlangsung Perang Diponegoro. Dalam keadaan demikian kembali pasukan Aceh di Nias melakukan pengawasan terhadap perdagangan. Sebagaimana diketahui Nias dahulu mempunyai hubungan dengan Aceh dan daerah itu berada di bawah naungan Kerajaan Aceh. Tetapi sejak VOC menguasai daerah itu pasukan Aceh mengalami kekalahan dan kedudukan Aceh di Nias diganti-

kan oleh Belanda. Situasi Nias yang sering berganti tuan itu dengan sendirinya mengganggu ketentraman penduduk setempat terutama dalam masa penguasaan Belanda. Pada tahun 1840, setelah Belanda berhasil memadamkan perlawanan yang terjadi di Jawa, kembali ia menanamkan kekuasaannya di Nias. Gunung Sitoli diduduki oleh Belanda dan dari sana Belanda meneruskan pendudukannya di Lagundi pada tahun 1947.

Di sana ditempatkan pasukan di bawah pimpinan seorang perwira. Pasukan itu melakukan pembakaran tempat kediaman penduduk sebagai hukuman karena penduduk mengadakan hubungan dengan Aceh. Tindakan Belanda ini tidak menyenangkan penduduk sehingga lahir perlawanan terhadap Belanda Rakyat Nias yang berada di Lagundi di bawah pimpinan siulu (raja) Orahili bersatu menentang Belanda. Dalam perlawanan itu di pihak Belanda banyak korban yang jatuh, sehingga pasukan Belanda ditarik kembali.

Untuk mengamankan daerah ini residen Tapanuli mengusulkan agar penyebaran Agama Kristen dipercepat di daerah ini, tetapi usul ini tidak dapat dijalankan. Pada tahun 1861 Belanda melanjutkan lagi penyerangan ke daerah yang dekat dengan Lagundi yaitu Desa Orahili. Serangan Belanda ini berada di bawah pimpinan Kapten Laut Reinier Claessen.

Serangan yang dilakukan juga menemukan kegagalan sehingga pasukannya yang masih tersisa terpaksa kembali ke kapal. Karena kegagalan itu Belanda yang berpusat di Padang mengirimkan kembali pasukannya yang berjumlah 600 orang untuk melakukan serangan. Serangan besar-besaran yang dilakukan Belanda pada tahun 1863 disambut dengan perlawanan yang gigih dari penduduk Nias. Dengan mengadakan suatu pertahanan yang kuat seperti benteng-benteng, mereka bertahan.

Setelah desa-desa pantai ditembaki dengan meriam dari kapal perang Belanda, pasukan itu mendarat. Belanda tidak melakukan serangan ke Desa Orahili, tetapi terhadap desa yang berdekatan dengannya yaitu Hilibabo. Sebagian pasukan Belanda menuju ke Desa Orahili sehingga prajurit-prajurit Nias terpaksa memecah kekuatannya. Dengan cara ini Belanda berhasil menembus pertahanan prajurit-prajurit Nias sehingga pertempuran dahsyat terjadi di

Orahili. Kedua belah pihak banyak korban yang jatuh.

Karena perlengkapan persenjataan yang lebih baik di pihak Belanda, maka pasukan Nias yang dikepalai oleh raja Orahili keluar dari desa tersebut dan melakukan perlawanan secara gerilya. Belanda membakar Desa Orahili dan kemudian meninggalkan daerah tersebut. Desa Orahili kemudian dibangun kembali dengan bentuk yang baru dan dinamakan Bawomataluo.

Walaupun perlawanan rakyat Nias di Orahili mengalami kesudahan yang tragis, tetapi semangat perjuangan tidak mengendor. Beberapa tahun kemudian terjadi lagi perlawanan-perlawanan seperti di Sirombu yang berakhir pada tahun 1908, di Marde dan di Idano Toa yang seluruhnya berakhir sekitar tahun 1915. Perlawanan ini seluruhnya terjadi di Nias Selatan.

3.3.1.2 Perlawanan terhadap Belanda di Daerah Pesisir Pantai Barat.

Natal dan Barus merupakan pelabuhan dengan yang mempunyai peranan penting dalam perdagangan sejak berabad-abad. Perdagangan tersebut banyak diselenggarakan oleh penduduk yang berasal dari daerah pesisir Sumatera Barat seperti Pariaman, Air Pangis, Tiju, dan Painan. Penduduk dari daerah pesisir ini hidup sebagai pedagang perantara dan menghubungkan daerah-daerah pesisir pantai barat Sumatera. Hal ini dapat diketahui dari bahasa yang mempunyai dialek sama dengan bahasa Minangkabau. Pedagang-pedagang itu mendapat perlindungan dari Aceh karena seluruh hasil dagang kemudian dikuasai oleh Aceh yang pada waktu itu menguasai daerah pantai barat Sumatera sampai Bangkulu.

Kedatangan bangsa Eropa yang menjalankan politik monopoli dan memaksakan harga barang menurut keinginan mereka menyebabkan kemerosotan perdagangan penduduk yang mendiami daerah pesisir itu. Banyak di antara mereka yang kehilangan mata pencahariannya. Perasaan tidak puas mereka dicetuskan dalam bentuk perlawanan terhadap penguasa Belanda yang telah menduduki daerah pantai tersebut. Salah seorang tokoh yang berasal dari Natal bernama Sidi Mara pada pertengahan abad ke-19 melakukan suatu perlawanan bersenjata terhadap Belanda di daerah ini. Benteng Belanda di daerah ini diserbu dan korban di pihak Be-

landa banyak yang berjatuhan. Perlawanan ini malahan merembet sampai ke Barus. Walaupun perlawanan demikian dahsyatnya, Belanda kemudian dapat menindasnya.

Setelah perlawanan Sidi Mara, Belanda mulai mengembangkan pemerintahannya di Tapanuli. Untuk memudahkan administrasi pemerintahan, Belanda memasukkan wilayah Tapanuli Selatan ke dalam wilayah Sumatera Barat. Sebelum Belanda menduduki wilayah Mandailing, Sutan Mangkutur sudah melihat bagaimana nasib bangsanya sewaktu pasukan Paderi menduduki daerahnya. Mereka sangat menderita akibat penindasan. Salah seorang raja bernama Gadombang bangkit melawan kekuasaan Paderi di daerah ini. Ia mati tertembak pasukan Paderi dalam suatu pertempuran yang terjadi di antara Rao dan Lubuk Sikaping. Karena raja tidak mempunyai anak, maka diangkatlah adiknya sebagai pengganti Raja Gadombang, yaitu Sutan Mangkutur.

Setelah satu tahun Sutan Mangkutur memerintah, Pemerintah Belanda mengadakan *bestuurs hevoming* di Tapanuli Selatan. *Sumatera reglement* mulai berlaku dan mengakibatkan pengadilan anak negeri bertukar dengan pengadilan *gouvernement*. Raja-raja di Mandailing merasa bahwa dengan berlakunya *reglement* itu, kekuatan mereka hilang. Selanjutnya pihak *gouvernement* menginstruksikan kepada semua raja di Mandailing Julu dan Mandailing Godang, agar setelah keluarnya peraturan baru tersebut, semua perkara yang akan diselesaikan dibawa ke Udung/kantor di Sengengu untuk diselesaikan.

Raja-raja harus datang langsung ke gedung di Singengu membawa tertuduh untuk diperkarakan. Raja tidak boleh mewakilkan dirinya untuk datang ke gedung pengadilan di Singengu itu. Apabila perintah Belanda tidak ditepati ataupun dilaksanakan, Belanda akan menghukum ataupun mendenda raja-raja yang membandel itu. Inilah langkah-langkah pertama dari pihak Belanda untuk memperkuat kedudukannya di daerah dengan mengambilalih kekuasaan pengadilan yang selama ini dipegang oleh raja-raja setempat. Hal ini berlaku sejak 28 Juli 1837.

Penindasan kaum Paderi menggugah hati dan pikiran Sutan Mangkutur untuk tidak mematuhi dan menaati segala perintah

pembangkangan Sutan Mangkutur ini. Belanda masih mengingat bahwa Sutan Mangkutur adalah adik kandung Raja Gadombang yang pernah menjabat *agen Mandailing* dan telah banyak berjasa pada Belanda dalam pertempuran di daerah Rao beberapa tahun sebelumnya.

Sebagai Mangkutur terus membangkang pada pihak Belanda. Mula-mula perlawanannya hanya dalam bentuk tidak mematuhi perintah Belanda. Makin kuatnya kedudukan Belanda di daerah Mandailing semakin mengurangi hak raja-raja yang telah ada dan juga merupakan intervensi yang bisa mengurangi kekuasaan tradisional dari raja-raja tersebut.

Sebalik akibat dari hal tersebut, timbullah perlawanan secara fisik Sutan Mangkutur. Permufakatan dengan beberapa raja-raja di Mandailing diadakan penyumpahan agar setiap raja yang hadir berjanji untuk setia dan tolong-menolong dalam peperangan melawan Belanda. Pada waktu itu juga dibicarakan waktu penyerangan.

Selesai rapat rahasia tersebut mereka mulai mengadakan persiapan-persiapan untuk memulai peperangan yang pertama pada tahun 1839. Sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati apabila pasukan Sutan Mangkutur menyerang dari Huta Godang ke Kota Nopan, maka Raja Huta Siantar harus menyerang dari arah Penyabungan. Sayang sekali sebelum pasukan Sutan Mangkutur menyerang ke Kota Nopan, pasukan Belanda telah mengetahui hal ini sehingga Belanda lebih dahulu menyerang pasukan Sutan Mangkutur ke Huta Godong. Perjumpaan pasukan Sultan Mengkutur dan pasukan Belanda terjadi di suatu tempat yang bernama Batu Bodang dekat Kampung Sipalupuk. Terjadilah suatu pertempuran yang sengit, yang menyebabkan beberapa perwira Belanda beserta puluhan pasukannya mati.

Dalam pertempuran yang pertama ini pasukan Belanda mundur dan mereka terus dikejar oleh pasukan Sutan Mangkutur sampai dekat ke Kota Nopan. Pasukan Raja Huta Siantar dari Penyabungan tidak kunjung tiba. Hal ini menimbulkan kecurigaan. Diduga ada kerjasama antara Raja Huta Siantar dengan Belanda.

Dalam pertempuran selanjutnya, Sultan Mangkutur selalu diban-

tu oleh para hulubalang. Pada hulubalang itu ialah, Ja Layang, Sampuran Tolang, Balang Garang, Langa Lalupak, dan Manimba Laut. Dalam peperangan selanjutnya, pasukan Sutan Mangkutur hanya bertahan, karena pasukan Belanda sudah semakin kuat dengan dibantu penduduk setempat.

Pada suatu ketika datanglah pasukan Belanda menyerang Huta Godang bersama Raja Huta Siantar. Ketika itu Sutan Mangkutur sedang dalam persembunyiannya. Pasukan langsung membakar Istana Bagas Godang karena tidak menjumpai Sutan Mangkutur. Isteri Sutan Mangkutur menangis, meraung-raung supaya tempatnya jangan dibakar. Raja Huta Siantar mengabulkan permohonan asal ditunjukkan di mana Sutan Mangkutur bersembunyi. Pada mulanya permintaan ini ditolak oleh istri Sutan Mangkutur, tetapi Belanda yang mengatakan bahwa mereka hanya ingin berjumpa dengan Sutan Mangkutur untuk berdamai dan dijanjikan pula bahwa Sutan Mangkutur akan dijamin keselamatannya. Karena itu dikirimlah utusan untuk menjumpai Sutan Mangkutur di persembunyiannya. Sewaktu utusan dalam perjalanan menuju Huta Godang, rupanya ada pasukan Belanda yang ditugaskan untuk mengikutinya dari belakang. Sutan Mangkutur ditangkap dan diturunkan dari tahtanya dan selanjutnya dibuang ke Pulau Ambon tahun 1839. Ia dituduh sebagai penjahat dan diharuskan membayar denda kepada Belanda.

Dalam tahun itu juga saudara Sutan Mangkutur dibuang ke Pulau Ambon. Sesudah itu masih ada perlawanan terhadap Belanda di Sekitar Mandailing (Natal). Pada waktu itu kontroler di sana adalah Edwards Douwes Dekker atau Multatuli. Perlawanan ini dapat berlangsung lama dan baru berakhir pada tahun 1839. Dengan berbagai cara Belanda berhasil menguasai keadaan dan mengadakan reorganisasi pemerintahan di Tapanuli. Daerah Tapanuli Selatan waktu itu terlepas dari Sumatera Barat dan bersatu dalam wilayah Karesidenan Tapanuli yang berpusat di Sibolga.

Sejak itu didirikan sekolah-sekolah kelas tiga atau lebih terkenal dengan nama *Volkschool*; di antaranya ialah *Volkschool* di Natal. Keinginan untuk memperoleh pendidikan Barat di kalangan penduduk Tapanuli Selatan ternyata besar sehingga Belanda me-

luaskan program pendidikan tersebut. Melalui pendidikan tersebut diharapkan pendekatan terhadap penduduk dapat dilaksanakan. Untuk itulah maka Belanda memberikan kesempatan kepada Willem Iskandar untuk melanjutkan pendidikan ke Negeri Belanda. Pembukaan sekolah guru di Tano Bato tiada lain adalah suatu usaha yang dilakukan Belanda untuk menyebarkan kebudayaan Barat di kalangan penduduk.

3.3.1.3 Perang Sisingamangaraja (1877 -- 1907)

Setelah membentuk Keresidenan Tapanuli di tahun 1942, Belanda berusaha meluaskan kekuasaannya ke Dataran Tinggi Toba dan Dairi. Hal itu penting untuk keamanan Belanda di daerah pesisir karena sering ada gangguan dari sana. Dalam pada itu kesan yang ditinggalkan pasukan Paderi di Toba berakibat kecurigaan terhadap datangnya orang-orang asing seperti yang dialami penyiur-penyiur Agama Kristen sebelum Nomensen.

Belajar dari peristiwa itu, Sisingamangaja XII melakukan konsolidasi ke dalam. Adat dan kepercayaan terhadap leluhur suku bangsa Batak kembali dikokohkan dalam masyarakat mengingat kegiatan Belanda semakin meningkat di pedalaman Barus. Di pihak lain sebagai akibat politik monopoli Belanda di Sibolga dan Barus, kemenyan dan kopi semakin merosot harganya. Hal itu juga dialami Aceh setelah perdagangan di pesisir dipegang oleh Belanda. Jadi Sisingamangaraja dan Aceh mempunyai kepentingan yang sama. Itulah sebabnya, di samping hubungan kekeluargaan, dalam perang melawan Belanda banyak panglima-panglima dari Aceh berada di tengah pasukan Sisingamangaraja XII. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari kutipan berikut :

"Raja Sisingamangaraja menyusun suatu pasukan yang berkekuatan kira-kira 300 orang prajurit dengan persenjataan lengkap. Di dalam pasukan turut pendekar-pendekar orang Aceh. Pendekar-pendekar orang Aceh sebelum meletuskan Perang Aceh dan sebelum berkecamuknya perang Batak "3).

Jadi sesungguhnya antara Aceh dan Batak telah ada kesiapsiagaan menghadapi agresi Belanda. Keadaan itulah yang memaksa Belanda mempercepat serbuannya ke Tanah Batak. Mula-mula Belanda membiarkan zending RMG dari Jerman menyebarkan Injil ke pedalaman Tapanuli karena zending Belanda telah gagal di Sisipirok. Zending Jerman berhasil karena tidak begitu drastis

menghapuskan unsur-unsur adat Batak selama tidak bertentangan dengan ajaran Kristen. Hal inilah yang membuat Nomensen berhasil menyebarkan Agama Kristen di Tapanuli Utara yang memberi peluang bagi penetrasi kekuatan Belanda.

Dengan dalih melindungi para missionaris dari serangan pasukan Sisingamangaraja, Belanda menempatkan pasukannya di Tarutung sekaligus mempersempit wilayah pengaruh Sisingamangaraja. Akibatnya pos tentara Belanda di Tarutung mendapat serangan dari pasukan Sisingamangaraja. Inilah yang menjadi alasan bagi serangan terbuka Belanda terhadap Sisingamangaraja seperti telah direncanakan oleh Residen Boyle.

Tahun 1877 pejuang Batak berusaha mengusir Belanda dari Tarutung. Terjadilah pertempuran di Bahalbatu (antara Tarutung dan Balige). Dalam pertempuran di Bahalbatu, pasukan Sisingamangaraja yang dipimpin panglimanya Ompu Badia Porhas Tampubolon. Di pihak Belanda dipimpin oleh Kapten Schelter. Persenjataan yang tidak seimbang membuat pasukan Sisingamangaraja mundur. Perlawanan diteruskan dengan taktik perang gerilya. Arena pertempuran berpindah dari satu tempat ke tempat lain.

Dalam pada itu dengan karismanya Sisingamangaraja memperkuat perlawanan dengan mengadakan perserikatan bersama raja-raja di Sumatera Timur seperti Simalungun yang telah merasakan tekanan dari penetrasi Belanda dari daerah pantai timur. Diadakan pula aliansi dengan pemuka-pemuka adat di Tanah Karo. Dengan demikian seluruh suku bangsa Batak terlibat dalam perlawanan ini sehingga Belanda menyebutkan "*Batak Oorlog*" (Perang Batak).

Berikutnya pasukan Belanda menyerang Bakara dengan kekuatan 400 orang pasukan. Pejuang Batak menyambutnya dengan tembakan, tetapi karena jumlah pasukan yang tidak berimbang, pasukan Sisingamangaraja bersama rakyat mengundurkan diri ke pegunungan sekitarnya seraya membuat pertahanan di Meat, Balige, Tambunan, dan Laguboti. Belanda terus mengadakan pengejaran ke Paranginan dan ke Gurgur dengan tujuan Balige. Belanda mengalami kerugian besar dan baru dapat bergerak setelah mendapat bantuan. Di Balige, 1200 orang pasukan Batak telah siap tetapi kemudian mengundurkan diri karena Belanda memasang mortir. Seperti biasanya, rumah-rumah yang kosong dibakar Belanda dan rakyat diharuskan membayar denda serta mengakui

kedaulatan Belanda. Belanda kemudian kembali ke posnya di Bahalbatu.

Walaupun beberapa daerah telah dikuasai Belanda, tetapi rakyat tetap berjuang bersama Sisingamangaraja. Ia melakukan perlawanan di sekitar Danau Toba pada saat Belanda menempatkan kontroler di Balige tahun 1883. Balige diserang pasukan Batak dari berbagai jurusan tetapi tidak lama karena pasukan dan persenjataan Belanda lebih unggul. Pasukan Belanda yang bergerak ke Laguboti dan Uluan disambut oleh pejuang-pejuang Batak dengan gigih. Setelah Laguboti diduduki, Belanda segera menduduki Tanggabatu dan Paranginan. Maksudnya ialah agar rakyat tidak memihak kepada Sisingamangaraja. Seterusnya Belanda melakukan pembersihan di Bakara dan kemudian ke Laguboti. Dari sana Belanda bergerak ke Sitorang menghadapi hadangan-hadangan dari pejuang Batak. Pada kesempatan baik, Sisingamangaraja melakukan serangan secara besar-besaran atau kecil-kecilan serta membuat huru-hara. Serangan tersebut dibalas Belanda dengan aksi patroli dan naik bakar.

Dalam pada itu peperangan di Aceh semakin hebat sehingga untuk sementara Belanda mengurangi peperangannya terhadap Sisingamangaraja. Kesempatan itu dimanfaatkan Sisingamangaraja untuk menyusun kekuatan. Dengan mendatangkan pasukan dari Padang, Belanda kembali menyerang pejuang-pejuang Batak terutama di Lontong. Akhirnya arena pertempuran beralih ke Pakpak — Dairi karena hampir seluruh Toba telah diduduki dan dihancurkan Belanda dengan taktik pembakaran kampung dan pembayaran denda. Namun demikian hubungan dengan Aceh masih tetap dilakukan dengan bebas.

Perlawanan terhadap Belanda dilakukan dengan gerilya dan nampak, semakin merosot setelah tahun 1904. Dalam pada itu dari Sumatera Timur mendesak agar keamanan segera dilakukan. Untuk itulah Belanda mendatangkan Kapten H. Christoffel. Bagi pemerintah kolonial Belanda, nama Kapten H. Christoffel dijunjung tinggi karena dialah yang dapat mematahkan perlawanan rakyat Kalimantan dan Lombok pada tahun 1904⁴.

Belanda mengadakan operasi perang terakhir dipimpin oleh Van Daalon mulai dari Gayo -- Alas hingga Pakpak -- Dairi. Peng-

hancuran dan pembunuhan secara membabitnya serta penyiksaan-penyiksaan yang tak berprikemanusiaan dilakukan. Hubungan Sisingamangaraja dengan Aceh menjadi terputus. Tugas penangkapan Sisingamangaraja hidup atau mati diserahkan kepada Kapten H. Christoffel dengan 80 orang pasukan marsose.

Pengejaran terus dilakukan karena Sisingamangaraja dengan pasukan yang setia terus berpindah-pindah. Pada suatu saat Sisingamangaraja terkepung dan tertembak. Ia gugur sebagai pahlawan bangsa pada 17 Juni 1907 Sementara itu semua anggota keluarganya ditahan dan hartanya dirampas. Perlawanan pun berakhir karena tokoh karisma telah wafat. Perlawanan kecil-kecilan secara sporadis masih berlangsung untuk menentang masuknya kebudayaan Barat. Misalnya perlawanan Guru Somalaing Pardede dengan pengikutnya menentang Agama Kristen di Toba,

Dengan aliran kepercayaan Parmalim, Guru Somalaing Pardede berusaha mengembalikan kepercayaan nenek moyang. Tokoh ini dianggap berbahaya oleh Belanda sehingga ia diusir dari Balige. Kemudian muncul pula kepercayaan Parsiakbagi atau Parugama yang dibawa oleh Jaga Siborutorop. Mereka ini menentang dan menolak segala bentuk pangkat-pangkat. Ia pun mendapat perlakuan yang sama seperti Guru Somalaing Pardede lalu diusir dari Siborong-borong.

Tahun 1915 Tanah Toba dihebohkan oleh gerakan Parhudamdandam yang dipimpin oleh Saman. Ajarannya sama dengan kepercayaan yang dianut oleh Sisingamangaraja ataupun Parmalim dengan penambahan-penambahan.

"Pesan agama ini adalah bahwa kerajaan Batak yang suci akan muncul dengan pimpinan Sisingamangaraja XII setelah terjadi satu peperangan besar. Hanyalah pengikut Parisihudamdandam yang tidak musnah dalam peperangan ini. . . "5)

Tentu saja ajaran ini cenderung membuat banyak pengikut. Pengikut-pengikutnya tersebar : di Humbang, Barus, Sibolga, Samosir, sampai ke Dairi. Karena itu Belanda segera melakukan penindasan-penindasan. Jelasnya sampai permulaan abad ke-20 di Tapanuli berlangsung perlawanan melawan Belanda. Secara fisik, Belanda mampu menguasai keadaan tetapi di hati rakyat Batak terus hidup keinginan melepaskan diri dari kekuasaan Belanda dan menunggu saat yang baik untuk mengembalikan Kera-

jaan Batak. Bagi sebagian besar rakyat Batak, Sisingamangaraja dianggap masih hidup.

3.3.1.4 Perlawanan Rakyat Sumatera Timur Menentang Kolonialisme Belanda.

Sebagaimana telah dijelaskan, Belanda mulai menaruh perhatian terhadap wilayah Sumatera Timur setelah Inggris mempunyai koloni di Sumenanjung Melayu, yaitu Singapura dan Penang. Hal ini disebabkan Inggris sering mengadakan hubungan dengan raja-raja di pantai timur Sumatera. Puncak dari kegiatan Inggris itulah terjadi pada tahun 1858 di mana Belanda mengikat Siak dengan Perjanjian Siak.

Berdasarkan perjanjian itulah Belanda mencoba menanamkan kekuasaannya di Sumatera Timur. Sebagaimana telah diuraikan, Asisten Residen Natscher yang berkedudukan di Bengkalis mengunjungi raja-raja di Sumatera Timur dengan kapal-kapal perang agar mereka menandatangani *Akte Van Erkenning*. Keinginan Belanda ini tidak ditangani dengan baik oleh beberapa raja-raja di Sumatera Timur sehingga terjadi perlawanan terhadap Belanda.

Salah seorang di antaranya ialah Sultan Ibrahim dari Asahan. Ia tidak bersedia menerima *Akte Van Erkenning* karena kepada Keprajaan Aceh. Sementara itu sultan mencoba mencari hubungan dengan Inggris di Penang, tetapi karena keterikatan Inggris pada perjanjian yang telah ditandatangani dengan Belanda yaitu *Tractaat Sumatera*, maka Inggris tidak memberikan angin. Pengganti Sultan Ibrahim yaitu Ahmadsyah meneruskan perlawanan terhadap Belanda. Perlawanan ini mendapat dukungan dari rakyat pesisir yang terdiri atas suku bangsa Melayu dan dari suku bangsa Batak pedalaman. Penduduk mendukungnya karena perang inilah yang menentukan kehidupan mereka.

Penduduk yang selama ini melakukan perdagangan dengan daerah pedalaman melalui Sungai Asahan akan kehilangan mata pencaharian bila Belanda berkuasa. Tetapi walaupun perlawanan tersebut mendapat bantuan dari segala jurusan akhirnya gagal juga karena daerah lautan telah dikuasai Belanda apabila persenjataan Belanda lebih ampuh.

Sultan Ahmadsyah kemudian ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Riau. Ia baru boleh kembali pada tahun 1885 setelah menandatangani *Korte Verklaringen* yang disodorkan Belanda. Penggantinya adalah Sultan Husinsyah pada tahun 1890. Di masa pemerintahannya, Belanda melakukan pengutipan *belasting* (pajak) yang tinggi, yang tidak bisa disanggupi rakyat. Ia bermohon kepada residen dan gubernur agar ketentuan ini ditinjau kembali, tetapi kedua pejabat tersebut secara halus menolaknya. Untuk mengurus masalah ini ia berangkat ke Negeri Belanda menghadap ratu. Di Negeri Belanda keinginannya juga tidak dapat dipenuhi karena ratu menunjukkan bahwa ia raja konstitusional.

Segala kegiatan Belanda di Tapanuli Utara dan sepanjang pantai Sumatera Timur menjadi perhatian dari raja-raja Simalungun. Peristiwa di Asahan di mana Sultan Ahmadsyah yang kemudian ditangkap Belanda dan kerajaannya harus mengakui kekuasaan Belanda merupakan suatu pukulan yang sangat berat bagi raja-raja Simalungun. Daerah Simalungun mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan daerah pesisir seperti Serdang, Batu Bara, dan Asahan karena segala hasil bumi mereka itu harus melalui daerah tersebut. Selain itu didipantai juga berdiam penduduk dan asalnya dari suku bangsa Simalungun yang telah menganut Agama Islam. Hubungan kebudayaan yang erat itu mengakibatkan raja-raja Simalungun turut merasakan apa yang telah terjadi di daerah-daerah pesisir. Di samping itu Kerjaan Simalungun suatu ketika akan mengalami nasib yang sama pula. Apalagi pada waktu itu telah kelihatan gejala-gejala ke arah itu karena Belanda telah membuka perkebunan di daerah Kerajaan Deli.

Bertolak dari pemikiran itulah maka raja-raja Simalungun dengan raja-raja daerah pantai yang beragama Islam dan belum dikuasai Belanda, mengadakan suatu perserikatan. Perserikatan itu disebut Empat Serangkai yang terdiri atas Raja Silau, Raja Panei, Raja Siantar (raja-raja Simalungun), dan Raja Tanung Kasau (raja daerah pesisir yang beragama Islam). Di Pematang Panei mereka mendirikan tempat bermusyawarah yang disebut Balai Berempat. Di sini mereka bertemu pada waktu-waktu tertentu untuk membicarakan kebijaksanaan apa yang harus dilakukan dalam

menghadapi suatu persoalan yang sama.

Sementara itu gerakan pelebaran kekuasaan kolonialisme Belanda semakin melebar. Raja Tanjung Kasau yang ahulunya bergabung dalam Empat Serangkai terpaksa melepaskan keanggotaannya karena Belanda berhasil menaklukkan daerah tersebut. Walaupun demikian perserikatan Empat Serangkai tidak bubar. Setelah menguasai daerah Tanjung Kasau, Belanda berusaha menuju lebih ke utara, yaitu daerah yang berbatasan dengan Simalungun. Raja-raja kecil yang berada di Tebingtinggi yang takluk pada Kerajaan Serdang tidak dapat menerima segala peraturan-peraturan yang dibuat Belanda. Di antaranya ialah Raja Padang yang sangat gigih mempertahankan agar adat istiadat kerajaan terus dijalankan.

Belanda menganggap Raja Tengku Maharaja Mahammad Nurdin dengan segala tingkah lakunya itu akan membahayakan penanaman kekuasaannya di daerah sekitarnya. Ia segera diturunkan dari tahta kerajaan. Raja Kerajaan Padang di Tebingtinggi tidak tinggal diam. Segera ia mengadakan hubungan dengan raja-raja Simalungun yang tergabung dalam Empat serangkai. Raja-raja Simalungun segera turun tangan menghadapi malapetaka yang menimpa raja Padang sebagai tetangganya. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1887. Raja-raja Simalungun segera menyiapkan suatu pasukan yang dipimpin oleh Rondaheim. Rondaheim adalah seorang yang dipercayai untuk memimpin penyerangan terhadap Belanda di Tebingtinggi. Ia mempunyai kewibawaan yang besar dan disegani oleh prajurit-prajurit karena keberaniannya.

Serangan yang dilakukan oleh Rondaheim mengakibatkan pasukan Belanda yang berada di Tebingtinggi meminta bantuan ke Medan. Dari Medan Belanda mengirim pasukannya sebanyak 60 orang dipimpin oleh Kapten J.C. R. Schenk. Pertempuran dengan sendirinya terjadi sekitar Tebingtinggi seperti Solok Marlawan dan Dolok Sagal. Untuk menakuti rakyat Kampung Dolok Kahean yang telah masuk daerah Simalungun, kampung itu dibakar. Seluruh peristiwa ini dengan sendirinya telah melibatkan daerah Simalungun dalam perang dengan Belanda.

Rondaheim berhasil melakukan perlawanan secara gerilya dengan berpindah-pindah tempat. Serangannya yang dilakukan

terhadap pasukan belanda di Baja Lingge pada bulan Februari 1888 berhasil. Karena sulitnya Belanda menangkap Rondaheim, dia diajak berunding tetapi tidak mendapat sambutan dari Rondaheim dan yang datang hanya wakil Rondaheim saja. Rondaheim mengetahui bahwa prundingan itu hanya siasat saja. Tujuan yang sebenarnya adalah untuk menangkapnya. Teman wakil Rondaheim ditangkap Belanda dan tidak kembali lagi.

Hal inilah yang mengakibatkan Rondaheim meneruskan perlawanannya sampai wafat pada tahun 1891. Dengan wafatnya Rondaheim, Belanda mulai pula menusuk ke daerah Simalungun. Daerah yang pertama dikunjungi Belanda adalah daerah Kerajaan Siantar. Untuk memudahkan Belanda menguasai wilayah itu, Belanda lebih dahulu mengakui raja Siantar yang pada waktu itu, berkuasa yaitu Sang Nauuluh Damanik. Namun Sang Nauluh tetap mengingat bahwa Belanda senantiasa tidak dapat dipercayai karena telah mencampuri masalah dalam negeri kerajaan-kerjaan dan kemudian menguasai kerjaan-kerjaan itu sebagai bagian dari milik mereka. Ini dilihatnya sendiri pada tetangganya. Kontroler Belanda yang berkedudukan waktu itu di Batubara dengan seenaknya saja melanggar hak-hak Simalungun sehingga kemerdekaan kerajaan boleh dikatakan lenyap. Hak-hak rakyat menurut hukum adat tidak diakui dan Belanda melakukan pembukaan-pembukaan perkebunan tanpa seizin kerajaan. Kedudukan Belanda di Batubara tidak sedikit pun digubris oleh Sang Nauuluh. Instruksi Belanda seluruhnya untuk menghapuskan hak-hak raja dan rakyat Simalungun ditolaknya. Sikap Sang Nauuluh yang lebih tidak menyenangkan Belanda ialah sewaktu ia menganut Agama Islam bersama dengan keluarganya.

Sikap ini tentu menimbulkan jurang pemisah karena Belanda sering melihat bahwa setiap raja yang menganut Agama Islam sulit untuk dapat didekati. Kenyataan ini dapat kita ketahui dari kutipan berikut :

Di samping tugas Sang Nauuluh sebagai raja, Sang Nauuluh menambah kegiatannya memperdalam dan mengembangkan Agama Islam. Pengembangan agama ini termasuk yang dibenci oleh Belanda, maka khusus untuk ini Sang Nauuluh melakukannya di "Juma bolon anggap".....⁶⁾

Karena kebenciannya terhadap Belanda pada tahun 1885, secara diam-diam Sang Nauuluh berhubungan dengan seorang pengusaha perkebunan Jerman bernama Baron von Horn. Ia seorang pemilik perkebunan di Hervetia Medan. Ia mengajak pengusaha Jerman itu membantunya mengusir Belanda dari Simalungun dan sebagai ganjaran akan diberi konsesi tanah di Simalungun.

Hal ini tercium oleh pengusaha Belanda di Medan sehingga Baron von horn diusir dari Medan. Belanda menangkap Sang Nauuluh dan dibawa ke Batubara, tempat kedudukan pengusaha Belanda yang tertinggi di Simalungun. Karena penahanannya di Batubara, penduduk Simalungun bergerak menentang penangkapan rajanya. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Belanda memindahkannya ke Medan. Residen Sumatera Timur meneruskan persoalan tersebut kepada gubernur jenderal untuk menetapkan suatu keputusan.

Gubernur jenderal dalam suratnya kepada *Raad van Indie* meminta petunjuk-petunjuk, tetapi *Raad van Indie* menunjuk kepada *artikel 47 Regerings Reglement* yaitu bila ada orang-orang yang lahir di Indonesia, demi untuk ketertiban umum dan keamanan, melarangnya untuk bertempat tinggal di bagian tertentu dari wilayah Hindia Belanda.

Selanjutnya orang itu dapat ditangkap melalui surat yang dikeluarkan oleh peradilan. Untuk menjatuhkan Sang Nauuluh dari tahta kerajaannya, Residen Sumatera Timur Schaap memakai laporan-laporan pengaduan dari bawahannya, Kontroler Batubara Karthaus, yang berisi 10 kesalahan kontroler atau Batubara tuduhan. Di antara tuduhan itu adalah sebagai berikut :

Hoewel men niet vewijzinkan dat de corst dwang uit cefent wat befreft de overgang tot de Islam van zijn onderdanen, wijs de beschuldiging omtrent de gevangen houding nan limahani daaat toch op ook doet het ondervolge zulk vermoeden

Tuduhan itu antara lain, memaksa penduduk memasuki Agama Islam tetapi sebenarnya tuduhan itu tidak beralasan. Walaupun demikian residen Sumatera Timur dalam suratnya kepada gubernur jenderal mengatakan bahwa Sang Naualuh telah mengakui kesalahannya. Surat tersebut bertanggal 25 Agustus 1905 No. 3775/4 dan berdasarkan ketentuan tersebut pula maka Sang Naualuh ditangkap dan kemudian dibuang ke Bengkalis pada tahun 1906.

Selanjutnya pemerintahan Kerajaan Siantar tergantung kepada residen Sumatera Timur berdasarkan Surat Keputusan Residen Sumatera Timur, 20 Juli 1907 Nomor 254. Maka dibentuklah sebuah dewan kerajaan yang dikepalai oleh seorang kontroler Belanda di Simalungun. Anggota-anggotanya terdiri atas Tuan Sidep Manik, Tuan Marihot, dan untuk lebih menguatkannya lagi diangkat pula dua orang besar kerajaan yaitu Tuan Marihat Si Tori Alam dan Tuan Sidep Manik Si Riahata. Mereka inilah yang disodorkan oleh Belanda untuk menandatangani *Korte Verklaaring* (Perjanjian Pendek) pada 16 Oktober 1907.

Untuk memperkuat dasar hukum, pihak Belanda berusaha mengumpulkan pemuka-pemuka masyarakat di seluruh wilayah Kerajaan Siantar untuk menandatangani pernyataan bahwa mereka menyetujui *Korte Verklaaring* yang telah ditandatangani oleh Tuan Sari Alam dan Tuan Si Riahata. Pemuka-pemuka masyarakat berjumlah 38 orang dari seluruh daerah. Selanjutnya Tuan Sidep Manik dan Tuan Marihat diangkat pula sebagai mangkubumi karena pada waktu itu Tuan Kadim, anak Sang Naualuh, masih di bawah umur.

Sang Raja Naualuh dibuang ke Bengkalis dan meninggal tahun 1914. Puteranya yang tertua, Tuan Kadim, oleh Pemerintah Belanda dititipkan di bawah pemeliharaan Pendeta Zending Guillaume di Negeri Purba agar jauh dari pengaruh Agama Islam. Sebagai akibatnya kontroler Belanda itu langsung menjadi kepala pemerintahan Kerajaan Siantar. Dengan demikian lapanglah jalannya modal asing membuka perkebunan secara besar-besaran di sekitar Kota Siantar. Perusahaan perkebunan yang pertama adalah *Siantar Estate* tahun 1908. Selanjutnya ibukota Simalungun dipindahkan

ke Kota Pematang Siantar tahun 1912.

Setelah beberapa tahun lamanya, Tuan Kadim yang dahulu beragama Islam mengubah namanya menjadi Tuan Waldemar Tuhan Naga Huta. Ia mengubah agamanya dari Islam menjadi Agama Kristen. Dengan ditandatanganinya perjanjian pendek *Korte Verklaring* 18 Mei 1916, diangkatlah ia menjadi raja Siantar. Dengan peristiwa ini maka Simalungun telah jatuh ke tangan Belanda.

Peristiwa perlawanan Rondaheim di Simalungun terhadap Belanda rupanya mempunyai pengaruh ke daerah Tanah Karo. Di Daerah Linggu Julu dan Batukarang, seorang yang bernama Si Kiras, melakukan perlawanan terhadap Belanda. Perlawanan ini mungkin mempunyai hubungan dengan usaha Belanda untuk merombak struktur pemerintahan Tanah Karo menurut keinginannya. Pemberontakan ini kemudian dapat dipadamkan oleh Belanda pada 9 September 1904. Setelah perlawanan Si Kiras itu Belanda mulai membentuk struktur pemerintahan baru di Tanah Karo dengan menciptakan kekuasaan para sibayak.

Bersamaan dengan gerakan Belanda di daerah Simalungun dan Asahan, di daerah Deli dan Langkat timbul pula perlawanan penduduk yang dipimpin oleh pemimpin mereka yang dikenal dengan Datuk Sunggal. Perang ini dapat dikatakan perlawanan penduduk terhadap Belanda karena persentuhan mereka dengan unsur-unsur kebudayaan asing yang dibawa Belanda ke daerah mereka. Persentuhan itu melahirkan perubahan nilai-nilai adat dan kebudayaan yang telah turun-temurun. Di pihak lain Belanda ingin segera melaksanakan segala struktur kehidupan baru menurut apa yang mereka inginkan agar tujuan mereka untuk melakukan perluasan penanaman modalnya dengan membuka perkebunan-perkebunan dapat dicapai. Untuk mencapai tujuannya itu Belanda menggunakan politik *De Vide et Impera* dengan mengadakan raja-raja seperti Sultan Deli dengan Datuk Sunggal. Sebenarnya antara kedua kerajaan itu masih ada hubungan keluarga. Untuk lebih jelasnya baiklah di bawah ini akan diuraikan Perang Sunggal.

Sebagaimana telah dijelaskan, pada tahun 1862 Kerjaan Deli mengakui *Akte van Erkenning* sehingga dengan demikian Deli

telah merupakan suatu daerah yang berada di bawah naungan Belanda. Pada waktu itu Kerajaan Deli telah berkembang karena perdagangan dengan bangsa-bangsa asing sehingga kedudukannya sangat penting. Karena itu Belanda lekas-lekas memaksakan kerajaan itu untuk mengakui kekuasaan Belanda. Setelah Belanda menguasai Deli, pada tahun 1863 Nienhuys mendapat konsesi tanah untuk penanaman tembakau.

Keberhasilan Nienhuys itu diikuti oleh penanam-penanam modal lain sehingga timbullah beberapa perkebunan-perkebunan asing di sekitar Kota Medan, antara lain *Deli Maatschappij* dan *Arendsburg*. Timbulnya perkebunan-perkebunan tembakau di sekitar Medan menyebabkan banyaknya tanah yang berada di bawah kekuasaan Urung Empat Suku yang berkuasa di sekitar Medan dijadikan kebun tembakau.

Pemberian konsesi tanah-tanah oleh sultan Deli tidaklah dilakukan musyawarah dengan pimpinan-pimpinan urung tersebut, sedangkan dalam tatakrama Kerajaan Deli kedudukan datuk-datuk pimpinan urung sangat menentukan dalam pemerintahan. Kalau kita lihat dari sejarah berdirinya Kerajaan Deli, cikal-bakal dari kerajaan itu sebenarnya orang pendatang yang ditempatkan oleh Iskandar Muda dari Aceh sebagai panglima Kerajaan Aceh menjadi yang dipertuan, sehingga tidak mengherankan kedudukan wakil Kerajaan Aceh di Deli itu mendapat penghormatan dari seluruh urung.

Atas aktivitas wakil raja Aceh itu seluruh urung yang empat itu kemudian memeluk Agama Islam. Ikatan yang erat kemudian terjalin pula antara wakil dari Aceh yaitu Gotjah Pahlawan yang kemudian mengawini salah seorang puteri dari Datuk Sunggal. Selain dari itu Datuk Sunggal juga mempunyai hak dalam menabalkan sultan Deli selain sebagai mahapatih kerajaan.

Kedudukan seperti ini mulai dilanggar setelah Belanda menanamkan pengaruhnya di Deli. Ini merupakan suatu pelanggaran dari adat-istiadat dan tradisi Kerajaan Deli, terutama dalam masalah penyewaan tanah-tanah yang berada dalam wilayah urung-urung tersebut. Seluruh pelanggaran terhadap adat-istiadat itu terjadi

pada masa pemerintahan Datu Kecil, yaitu datuk yang menguasai Urung Sunggal dan lebih terkenal dengan Datuk Sunggal.

Pada masa pemerintahan Datuk Sunggal inilah terjadi pertumbuhan pekebunan Belanda sekitar Kerajaan Deli. Pertumbuhan perkebunan-perkebunan tersebut melahirkan kegoncangan-kegoncangan dalam kehidupan masyarakat di Kerajaan Deli terutama pada daerah "Urung Empat Suku" atau disebut kemudian daerah datuk-datuk yang empat.

Kegoncangan itu disebabkan rakyat Sunggal melihat di sekeliling mereka Deli dan langkat : tanah-tanah rakyat yang subur diberikan untuk konsesi perkebunan tembakau kepada maskapai-maskapai asing sedang keuntungan tidak diberikan kepada rakyat di situ, mulailah Sunggal berjaga-jaga dan menentang cara-cara itu

Contoh di atas merupakan suatu gambaran dari keadaan di urung yang dikuasai oleh Datuk Sunggal. Perasaan tidak puas rakyat pada daerah tersebut juga disebabkan oleh perusakan tata kehidupan masyarakatnya. Sejak adanya perkebunan-perkebunan di sekitar kediaman penduduk, lahirlah suatu kelompok masyarakat yang asing bagi penduduk. Belanda mendatangkan buruh-buruh dari Negari Cina dan India untuk pembukaan perkebunan tembakau itu. Kehidupan masyarakat asing yang berada di dekat desa-desa penduduk sering melahirkan gangguan-gangguan pada desanya seperti kebiasaan berjudi, minuman keras, dan lain-lain.

Hal inilah yang sangat menggelisahkan penduduk. Seluruh keadaan ini diharapkan penduduk dapat diakhiri dengan melenyapkan pengaruh Belanda dari daerahnya melalui perlawanan bersenjata. Datuk Sunggal mengetahui bagaimana perasaan rakyatnya pada waktu itu sehingga ia mengadakan persiapan-persiapan untuk mengusir Belanda dari daerahnya dengan mendirikan benteng-benteng pertahanan dan mengadakan kesiapsiagaan pasukannya. Tindakan dari Datuk Sunggal itu mendapat dukungan dari masyarakat Batak Karo di Pegunungan, karena penduduk yang mendiami daerah urung empat suku itu adalah suku bangsa Karo yang masih mempunyai ikatan keluarga walaupun mereka telah memeluk Agama Islam.

Melihat kesiapsiagaan Datuk Sunggal tersebut, Belanda yang mempunyai kepentingan dalam penanaman modalnya di Deli segera mendatangkan pasukannya dari Jawa sebelum keadaan tersebut menjadi lebih parah. Pada 15 Mei 1872 datanglah pasukan ekspedisi Belanda yang pertama dipimpin oleh Kapten W. Koops. Belanda bersama dengan pasukan Kerajaan Deli sebagai penunjuk jalan, mulai melakukan penyerbuan ke daerah perbentengan Sunggal sehingga terjadilah Perang Sunggal. Dalam peperangan ini para pejuang dari Datuk Sunggal tidak hanya bertahan tetapi juga melakukan penyerangan-penyerangan. Mereka membakar bangsal-bangsal tembakau dan mengganggu pekerjaan buru-buruh perkebunan agar apa yang diharapkan Belanda tidak dapat tercapai.

Karena serangan-serangan ini pihak perkebunan Belanda mengalami kesulitan. Pasukan ekspedisi yang didatangkannya tidak dapat mengatasi keadaan. Bahan makanan yang selama ini didatangkan dari daerah pedesaan tidak dapat masuk ke kota dan perkebunan. Untuk mengatasi ini Belanda terpaksa mendatangkan beras dari Penang. Sementara itu kegiatan dari pejuang-pejuang Datuk Sunggal melahirkan perang urat syaraf sehingga Belanda harus terus-menerus berjaga-jaga.

Untuk mempercepat berakhirnya perang ini Belanda mengirim lagi ekspedisinya yang kedua. Pasukan ini lebih banyak dari yang pertama serta dipimpin oleh Letnan Kolonel Von Homracht. Persenjataannya lebih lengkap dari pasukan pertama karena dilengkapi oleh artileri berkuda. Pasukan ini bertujuan untuk mengadakan penyerahan ke kubu-kubu pertahanan Sunggal, tidak saja di daerah Sunggal tetapi juga di daerah pedalaman dan di daerah Karo.

Perlawanan Datuk Sunggal yang dibantu oleh penduduk pedalaman itu sangat memusingkan Belanda sehingga Belanda mencoba untuk mencari kubu-kubu pertahanan Sunggal. Untuk tujuan tersebut diperlukan meriam-meriam yang dapat menghancurkan kubu-kubu tersebut. Walaupun demikian perlawanan dari pasukan Sunggal tidak dapat dipatahkan oleh Belanda. Berbagai siasat dilakukan Belanda untuk mengamankan daerah sekitar Deli, tetapi tidak membawa hasil. Dengan suatu tipu muslihatnya Belanda me-

ngajak Datuk Kecil atau lebih terkenal lagi dengan Datuk Sunggal untuk berunding menyelesaikan segala perbedaan pendapat.

Usul itu disetujui oleh Datuk Sunggal dan perundingan dilakukan pada 25 Oktober 1872. Dalam perundingan itu Belanda melakukan suatu tindakan yang licik. Perundingan tidak diadakan, dan Belanda mengatakan bahwa Datuk Sunggal sekarang menjadi tawanan Belanda. Tindakan Belanda yang merupakan tipu muslihat ini berhasil dan Datuk Sunggal bersama putera-puteranya kemudian dibuang ke Cilacap berdasarkan putusan dari gubernur jenderal Belanda yang berkedudukan di Batavia.

Dengan ditawannya Datuk Kecil maka Datuk Badiuzzaman juga ditangkap dengan tipu muslihat Belanda dan dibuang pula ke Cianjur. Dengan ditangkapnya tokoh-tokoh Perang Sunggal ini Perang Sunggal pun berakhir pada tahun 1873, tetapi secara kecil-kecilan masih terus terjadi perlawanan terhadap Belanda tidak saja di Deli tetapi juga dibagikan lain dari wilayah Sumatera Timur, misalnya di Asahan dan Sumalungun seperti telah diuraikan di atas.

Untuk mengamankan daerah perkebunan yang vital di Sumatera Timur terutama di Deli, pihak perkebunan Belanda mengusulkan kepada Pemerintah Hindia Belanda agar suku-suku itu dipecah-pecah sehingga mudah dapat dikuasai. Daerah Deli yang banyak hubungannya dengan daerah Karo di pegunungan dipecah karena mereka itu sebenarnya suatu keturunan.

Untuk melakukan hal itu perlu dipercepat pengembangan Agama Kristen di daerah tersebut. Pemisahan satu suku tersebut dalam dua agama yang berlainan memudahkan Belanda untuk menguasai daerah ini sehingga perkebunan Belanda dapat aman. Usul ini dapat diterima Belanda sehingga setelah peperangan yang melanda daerah Sumatera Timur dan Tapanuli berakhir, Belanda mengirimkan misi *Nederlandsche Zending Genootschap* untuk mengembangkan Agama Kristen di Dataran Tinggi Karo.

Jurang pemisah itu semakin meluas karena di daerah pesisir Belanda mendukung tindakan kebijaksanaan raja-raja yang hanya menerima pegawainya tidak bermarga. Penduduk pesisir kemudian menanggalkan marganya agar dapat menjadi warga dari kerajaan-

kerajaan di Sumatera Timur seperti Deli dan Serdang dan Langkat. Keadaan ini melahirkan pertentangan antara penduduk pantai dengan daerah pedalaman, tetapi dengan politik pecah belahnya Belanda berhasil berkuasa daerah Sumatera Timur.

3.3.2 Periode 1907 – 1945

Dengan berakhirnya Perang Sisingamangaraja, perlawanan yang bersifat fisik di Sumatera Utara boleh dikatakan berakhir, baik di Tapanuli maupun di Sumatera Timur. Sebaliknya Belanda sekarang mulai melakukan konsolidasi dan mengembangkan pemerintahannya. Sebagaimana telah diuraikan, Belanda mengubah struktur pemerintahan pada beberapa daerah untuk kelancaran jalannya administrasi pemerintahannya.

Sebaliknya rakyat di Sumatera Utara juga mengadakan suatu perubahan dalam perjuangan menghadapi penjajahan Belanda. Pengembangan pemerintahan Belanda dan menyebarkan kebudayaan Barat di kalangan bangsa Indonesia untuk mengubah cara-cara perjuangannya menghadapi penjajahan. Kegagalan-kegagalan yang terjadi dalam perlawanan terhadap penjajahan di Sumatera Utara melahirkan suatu kesatuan yang lebih kuat walaupun Belanda mencoba memecahbelah bangsa Indonesia.

Setelah Belanda berkuasa di Sumatera Utara, tindakan-tindakan-nya semakin menimbulkan kebencian penduduk. Di daerah perkebunan, mereka melakukan tindakan semena-mena. Banyak buruh yang didatangkan dari Jawa bukan dengan sukarela tetapi karena berbagai tipu muslihat yang dilakukan Belanda. Banyak buruh yang didatangkan itu berasal dari keluarga yang mampu tetapi sampai ke Deli karena kena tipu oleh perusahaan-perusahaan yang menyediakan buruh-buruh perkebunan.

Keadaan sosial mereka pun sangat buruk. Perumahan berupa bangsal dan gaji kecil. Penguasa lokal mereka sebut tuan besar. Buruh perkebunan tidak mungkin pula pindah dari tempat kediamannya karena setiap kali menerima gaji di perkebunan perkebunan itu diadakan pula perjudian. Dengan demikian buruh itu tetap tinggal di kebun sampai tua.

Sering pula tuan-tuan kebun menggunakan kekerasan dengan

memukul buruhnya apabila terjadi kesalahan. Agar buruh patuh, mereka diawasi pula dengan *centeng* (untuk buruh-buruh Indonesia) sedang untuk buruh Cina disebut tandil. Untuk mencapai persatuan nasional, di Sumatera Utara mulai tumbuh organisasi-organisasi yang bersifat sosial, agama, dan yang bersifat nasional.

Perlawanan rakyat yang bersifat nasional menghadapi kolonialisme Belanda adalah sebagai akibat dari perkembangan sarana yang diadakan oleh Belanda sendiri. Sarana itu bersifat pendidikan maupun bersifat keagamaan. Tujuan Belanda mengembangkan Agama Kristen untuk benteng bagi kolonialismenya ternyata juga tidak sebagaimana yang diharapkan. Sebagai contoh dapat terlihat dari uraian berikut.

3.3.2.1. Hatopan Kristen Batak

Hatopan Kristen Batak didirikan di Balige pada tahun 1917. Organisasi ini didirikan untuk mempersatukan orang-orang Kristen Batak dan memajukan para anggotanya. Sebenarnya tujuan utamanya adalah mempertahankan daerah-daerah pertanian orang-orang Batak agar jangan dicaplok oleh pemerintah kolonial.

Dalam perjuangan ini HKB melihat dari sudut ekonomi dan sosial, sedang Zending melihatnya dari sudut keagamaan. Zending RMG berpendapat bahwa penduduk yang mengalihkan perhatiannya pada kegiatan perkebunan maka kegiatan beragama akan kurang. HKB melihat bahwa perkembangan perkebunan akan melahirkan kemelaratan rakyat karena tanah-tanah yang subur akan jatuh menjadi milik perkebunan dengan adanya *erfpacht*.

Untuk mengetahui perkembangan Hatopan Kristen Batak, kita harus mengetahui pula riwayat hidup dari pendirinya yaitu M.H. Manullang, sebab organisasi ini tumbuh sejalan dengan kehidupan tokoh M.H. Manullang sendiri. Ia pernah menjadi pegawai di sekolah Zending Naromunda dan pada tahun 1905 dan bermukim di Padang.

Keadaan buruh di perkebunan yang menyedihkan itu menyebabkan banyak perlawanan-perlawanan terhadap majikannya,

kadang-kadang dengan kekerasan. Kekerasan yang dilakukan buruh itu sampai-sampai merupakan pembunuhan terhadap tuan-tuan kebun. Walaupun ganjaran hukumnya berat, yaitu hukuman mati, tetapi hal itu tidak dihiraukan. Seterusnya bagi buruh-buruh wanita yang cantik-cantik dijadikan sebagai pekerja di rumah-rumah tuan kebun dan dijadikan nyai (isteri tanpa nikah). Jadi jelaslah bahwa di kebun-kebun sama sekali tak dikenal perikemanusiaan.

Selanjutnya penduduk desa diwajibkan membayar pajak-pajak atau kerja rodi, sedang penghasilannya tidak mencukupi karena mereka sebagian tinggal di daerah-daerah yang kurang kesuburan tanahnya. Petugas-petugas kerajaan dengan berat hati terpaksa melakukan pemungutan pajak-pajak karena mereka takut akan kena damprat dari atasannya yang telah ketakutan kepada Belanda. Pembuangan-pembuangan yang dilakukan Belanda terhadap raja-raja yang ingkar menghantui mereka.

Suasana demikian memberikan dasar bagi lahirnya perjuangan dalam bentuk baru. Persatuan haruslah dilaksanakan dan tidak mungkin lagi perjuangan terpisah-pisah serta tujuan untuk kebebasan dari penderitaan hanyalah dengan menghapuskan penjajahan Belanda di Sumatera Utara. Dengan adanya perkebunan-perkebunan, penduduk tidak lagi terdiri atas satu suku tetapi telah merupakan kumpulan dari berbagai suku. Karena itu perjuangan bertujuan untuk melepaskan penderitaan yang dihaer sama. Perjuangan pada periode ini lebih bersifat nasional dan politis. Perjuangan yang bersifat nasional ini sejalan dengan perjuangan yang terjadi di Jawa dan daerah-daerah lain di Indonesia, dan mungkin Sumatera Utara agak lebih menonjol ketimbang di daerah lainnya di Sumatera. Manullang bekerja pada suatu percetakan dan menerbitkan surat kabar yang berbahasa daerah, *Binsar Sinondang Batak*. Kemudian ia kembali pula ke Pearaja sebagai pusat Zending pada waktu itu dan mengajar di sana.

Pengalaman-pengalaman selama Manullang berada di Padang sangat menentukan hidupnya kemudian, karena di sana ia berkenalan dengan dunia yang lebih luas, yaitu kehidupan masyarakat Indonesia. Di Padang waktu itu telah ada pula surat kabar

yang berbahasa Melayu (bahasa Indonesia) di mana salah seorang pimpinan staf redaksinya seorang yang berasal dari Tapanuli Selatan, yaitu Ya Endar. Di sini ia memperoleh pengarahan dalam perjuangannya. Segala pengalamannya di Padang kemudian diteruskan kepada murid-muridnya. Manulang hijrah ke Singapura, dan akhirnya menetap di Bogor, memimpin suatu asrama sekolah Methodist. Di sini ia mulai mendapat pengalaman baru karena waktu itu di Pulau Jawa telah pula bersemi pergerakan kebangsaan. Dengan semangat kebangsaan yang tumbuh dalam jiwanya, ia kembali ke Tapanuli.

Dengan bekal yang cukup itulah Manulang mendirikan Hoto-pan Kristen Batak di Tapanuli. Karena semangat kebangsaan yang dimilikinya itu dalam waktu yang singkat organisasi itu mendapat simpati dari masyarakat setempat. Sesudah kongresnya yang pertama di Balige pada tahun 1918, terbentuklah cabang-cabangnya di sekitar daerah Toba dan Silindung.

Dalam kegiatannya pada taraf pertama organisasi ini lebih menggiatkan pembukaan sekolah-sekolah dan perbaikan irigasi rakyat. Dalam suatu kesempatan, H.M. Manulang menghadap gubernur jenderal di Batavia dan meminta agar pendidikan, kesehatan, dan irigasi diperbaiki di Tapanuli. Inisiatif H.M. Manulang dengan HKB tidak menyenangkan pihak Zending sehingga ia dituduh menjadi anggota *Insulinde* yang berpusat di Jawa dan bersifat kebangsaan.

Tuduhan ini memang dapat terjadi karena pihak Zending merasa mengalami persaingan dengan tindak-tanduk HKB itu. Tentu saja kegiatan-kegiatan HKB di bidang sosial dan ekonomi seperti penurunan pajak dan hal-hal yang telah dikemukakan di atas menyebabkan pihak pemerintah mulai mencurigai H.M. Manulang dengan organisasi HKB-nya.

Suatu perjuangan organisasi HKB yang sangat menarik simpati rakyat adalah mengenai persoalan tanah di Pangaribuan. Di daerah tersebut pemerintah memberikan izin untuk mendirikan perkebunan-perkebunan. Hal ini menggelisahkan penduduk, sehingga Manulang pergi ke Batavia menghadap gubernur jenderal

untuk minta agar masalah itu ditinjau kembali. Akibat petisi itu gubernur jenderal membentuk suatu panitia untuk menyelidiki persoalan tersebut. Panitia itu kemudian memberikan laporan bahwa keberatan penduduk itu tidak realistis sehingga perkebunan yang akan didirikan berjalan terus.

Karena kegagalan dalam perjuangannya itu, dalam kongres tahun 1920 Manullang tidak terpilih lagi sebagai ketua. Kemudian ia hanya menulis artikel-artikel pada majalah *Pustaka*. Karena tulisan-tulisannya itu ia kemudian ditangkap Belanda dan dijatuhi hukuman limabelas bulan penjara. Setelah keluar dari penjara, Manullang meneruskan memperjuangkan cita-cita kebangsaan yang pada masa itu sedang menonjol.

3.3.2.2 Perlawanan terhadap Kolonialisme Belanda melalui saluran Pendidikan

Untuk mengokohkan penjajahan di Sumatera Utara, Belanda mengembangkan sarana pendidikan. Apalagi kebutuhan-kebutuhan akan tenaga kerja yang terdidik diperlukan Belanda untuk mengisi pemerintahan maupun perusahaan-perusahaan Belanda. Pembukaan sekolah-sekolah *Volkshool*, *Vervoghschool*, *Holland's Inlandshe School*, *Mulo* dan *HBS* di Sumatera Utara bukanlah untuk memperbaiki kehidupan bangsa Indonesia, tetapi kalau diteliti hanyalah untuk kepentingan Belanda saja, karena hanya beberapa orang Indonesia yang kemudian mencapai tingkat HBS walaupun bangsa Indonesia merupakan mayoritas. Melihat perkembangan keadaan tersebut akan melahirkan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat penduduk di Sumatera Utara, dari kalangan bangsa Indonesia kemudian timbul kesadaran-kesadaran untuk meningkatkan lembaga-lembaga pendidikan.

Kenyataan-kenyataan itu melahirkan suatu inisiatif bagi pemuda-pemuda bangsa Indonesia bagi yang bergerak dalam bidang agama maupun dalam bidang politik dan dunia dagang untuk membentuk lembaga pendidikan yang bersifat nasional maupun yang bersifat agama. Pendidikan yang bersifat nasional diharapkan agar dari kalangan pelajar itu nantinya akan lahir kader-

kader yang dapat meneruskan perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Di samping itu mereka pun dapat diharapkan sebagai kelompok yang akan meneruskan kebudayaan bangsanya. Dalam kalangan agama dapat tumbuh golongan cerdik-cendekiawan yang berorientasi kepada agama dan bersikap cinta terhadap tanah air. Pertumbuhan pendidikan ini sejalan pula dengan lahirnya organisasi politik sekitar tahun-tahun duapuluh.

Atas azas inilah maka di tahun 1929 berdiri perguruan Taman Siswa yang disponsori oleh Ki Sugondo Kartoprojo. Perguruan ini bermula dari perguruan yang belum terorganisasi. Karena banyaknya transmigran dari Jawa, di Sumatera Utara dibuka perguruan Budi Utomo. Kemudian setelah Pergerakan Nasional Indonesia berada di puncaknya, berubahlah nama perguruan tersebut dengan Taman Siswa. Perguruan ini tersebar luas di Sumatera Utara dan berkembang di daerah-daerah di mana banyak berdiam suku bangsa Jawa. Perkembangannya pun pesat karena bersifat nasional.

Politik pendidikan yang dijalankan Taman Siswa mengikuti politik dari Taman Siswa pusat. Karena itu Taman Siswa di daerah mengalami keadaan yang sama dengan keadaan di pusat. Banyak guru yang ditangkap karena melanggar peraturan-peraturan pendidikan Belanda. Walaupun demikian Taman Siswa dapat berkembang dan berpengaruh di daerah-daerah, malahan sampai ke pelosok-pelosok yang tidak ada sekolah yang diadakan oleh Pemerintah Belanda.

Berbeda dengan sekolah yang didirikan oleh Pemerintah Belanda di mana anak-anak didik sebagai ambtenar, di Taman Siswa anak-anak itu diajarkan cinta tanah air dan budaya bangsa. Watak yang lahir dari pelajar-pelajar Taman Siswa adalah manusia demokratis dan cinta tanah air.

Menyusul Taman Siswa ini berdiri pula perguruan-perguruan lain yang bersifat nasional. Walaupun dalam garis pendidikan mereka tidak radikal seperti Taman Siswa, namun unsur-unsur nasionalis merupakan dasar dari pendidikan itu. Perguruan-perguruan itu semuanya didirikan dengan tujuan memajukan bangsa Indonesia melalui jalur pendidikan; dengan demikian proses untuk mencapai kemerdekaan akan lebih singkat.

Berdasarkan prinsip itulah maka pada tahun 1930 lahir beberapa perguruan seperti *Yosua Instituut*, di Kota Medan yang dipimpin oleh seorang pendidik yaitu G.B. Yosua. Demikian juga Mohammad Noeh mendirikan *Instituut Voor Neutrale Onderwijs* pada tahun 1930. Pada tahun yang sama berdiri pula Perguruan Kota di bawah pimpinan Noenar S. Hamijoyo.

Di kota-kota seperti Pematangsiantar berdiri pula perguruan Bumi Putera yang diasuh oleh beberapa tokoh terkemuka bangsa Indonesia yang berdomisili di Pematangsiantar. Tokoh-tokoh itu adalah dr. Machmud Hamzah, drh. Musa, dan lain-lain. Perguruan ini didirikan pada tahun 1935. Di Kota Balige yang merupakan tempat tumbuhnya Hatopan Kristen Batak dan sebagai tempat tumbuhnya kelembagaan dari pergerakan nasional di Tapanuli lahir pula *Schakel School* yang disahkan oleh pedagang-pedagang pribumi yang disebut *Handel Vereniging Batak*.

Dengan adanya pendidikan yang berhaluan nasional, maka lahirlah tokoh-tokoh yang berjiwa nasional yang hidup dalam masyarakat. Merka inilah pemimpin-pemimpin yang menggerakkan masyarakat. Dalam perjuangan kemerdekaan di Sumatera Utara, peranan pemimpin-pemimpin ini sangat penting sekali.

Selain pendidikan yang bersifat nasional, di Sumatera Utara lahir pula pendidikan agama. Perkembangan Agama Islam yang tidak begitu mendapat dukungan dari Pemerintah Belanda menyebabkan di kalangan umat beragama Islam di Sumatera Utara membentuk kader-kader penerus. Perkembangan pendidikan Islam di Sumatera Utara ini semakin meluas sejak di Mesir timbul gerakan pembaharuan dalam Islam atau reformisme. Banyak tokoh ulama yang mendapat pendidikan dari Al Azhar dan menggerakkan pula pembaharuan itu di Sumatera Utara.

Pembaharuan yang lahir di Mesir itu membangkitkan perlawanan umat Islam terhadap penjajahan. Kebangkitan itu juga secara tidak langsung melahirkan suatu penyuburan terhadap gerakan umat Islam dalam menentang penjajahan di Sumatera Utara. Gerakan reformis itu muncul di Sumatera Utara dalam bentuk organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Al Jamiyatul Washliyah, dan Al Itihadiyah. Dalam kegiatan organisasi itu tum-

buhlah pendidikan-pendidikan yang mengasuh anak-anak didik dalam pendidikan yang bersifat modern dan berjiwa Islam. Walaupun pendidikan itu berbentuk madrasah atau pesantren, mereka juga mengajarkan ilmu pengetahuan yang menyangkut hal-hal kedu-niawan. Dalam setiap pelajaran diajarkan juga pengetahuan-pe-ngetahuan umum dan guru-guru mereka banyak yang berasal dari kalangan tokoh-tokoh kebangsaan.

3.3.2.3 Pergerakan Nasional di Sumatera Utara

Sebagaimana telah diuraikan di muka di Sumatera Timur pada abad ke 20 telah tumbuh perkebunan-perkebunan yang sebagian besar adalah milik pengusaha Belanda. Keadaan perkebunan yang berkembang dengan pesatnya itu melahirkan situasi sosial yang baru pula bagi masyarakat di Sumatera Timur khususnya dan Sumatera Utara umumnya.

Penduduk Sumatera Utara yang dahulu merupakan kelompok yang tidak banyak berbeda antara satu dengan lainnya, sekarang telah mengalami perubahan dan tidak hanya berbeda suku bangsa tetapi telah pula bercampur dalam berbagai jenis bangsa pula. Di antara bangsa-bangsa itu bangsa Belanda yang paling dominan karena mereka berkuasa. Mereka mempunyai kehidupan sosial dan ekonomi yang sangat baik dan jauh melebihi kehidupan bangsa Indonesia umumnya.

Jurang pemisah ini telah melahirkan beberapa gejolak sosial di perkebunan-perkebunan yang dikuasai Belanda. Gejolak-gejolak sosial ini misalnya pembunuhan terhadap tuan-tuan kebun sebagai rasa tidak puas terhadap perlakuan tuan kebun. Untuk mengatasi kejadian-kejadian, maka di setiap kebun ditempatkan seorang atau lebih tukang-tukang pukulnya yang disebut centeng.

Centeng-centeng ini diambil dari buruh itu juga tetapi yang dianggap mempunyai kelebihan dari yang lain, seperti kekuatan jasmani dan disegani. Dengan menjalankan politik adu domba ini maka kekuasaan penguasa perkebunan ini menjadi sangat besar dan keamanan perkebunanpun terjamin. Sebaliknya penindasan terhadap pihak buruh semakin menjadi-jadi. Buruh tidak jarang

pula didera atau dipukul dan hal ini dilindungi hukum karena adanya Poenale Sanctie.

Penderitaan di perkebunan itu melahirkan suatu dasar untuk tumbuhnya kebangunan bagi perlawanan terhadap Belanda. Situasi perkebunan yang sangat buruk merupakan benih bagi lahirnya gerakan-gerakan menentang penjajahan. Untuk melawan secara kekerasan sebagaimana telah diuraikan tidak berhasil, sehingga tumbuhlah taktik baru menghadapi penjajahan Belanda. Taktik itu tidak lain adalah gerakan yang teratur dan tersusun dalam wadah kepartaian dan organissi yang didukung oleh seluruh masyarakat Sumatera Utara.

Kebangunan nasional yang terjadi di Jawa dengan lahirnya Budi Utomo memberikan pula suatu inspirasi bagi tokoh-tokoh intelektual dari suku bangsa Jawa yang bertugas di Sumatera Timur untuk mengembangkan sayap organisasi.

Atas usaha beberapa dokter yang berasal dari Jawa seperti dr. Abdul Manap, dr. Suraji, dan dr. Pirngadi, di Kota Medan, lahir pula organisasi Budi Utomo. Sebagaimana ujud dan tujuan organisasi ini di Jawa, di Sumatera Timur Budi Utomo juga bergiat dalam lapangan sosial.

Untuk meningkatkan kehidupan bangsa terutama di kalangan para buruh perkebunan di Sumatera Utara Budi Utomo mendirikan sekolah-sekolah. Tentu saja sekolah-sekolah itu harus didirikan di daerah yang berada di lokasi perkebunan, karena tujuan dan sasaran pendidikan adalah anak-anak karyawan kebun. Kota Tebingtinggi memang sangat tepat untuk pendidikan tersebut.

Di kota inilah untuk pertama kalinya didirikan sekolah oleh Budi Utomo yang kemudian mengembangkan pula ke kota-kota lain seperti Lubuk Pakam Galang, Binjai, Perdagangan, dan Medan. Sekolah-sekolah itu berupa sekolah dasar yang mengajarkan bahasa Belanda atau juga disebut HIS Budi Utomo. Kegiatan pendidikan ini tiada lain sebagai suatu reaksi dari sikap Belanda yang tidak melaksanakan pendidikan secara demokratis dan melakukan diskriminasi. Usaha pendidikan seperti Budi Utomo ini kemudian diikuti pula oleh organisasi partai-partai lain baik

yang bersifat nasional maupun bersifat keagamaan sehingga dengan demikian kemajuan bangsa Indonesia cepat tercapai di daerah ini.

Selain kegiatan pendidikan, Budi Utomo juga melaksanakan kegiatan kesenian dengan tujuan menghidupkan kesenian Jawa di kalangan penduduk Jawa yang tinggal di Sumatera Utara. Melalui kesenian dapat diharapkan kesadaran bangsa Indonesia akan terus hidup, dan ini merupakan suatu landasan bagi perlawanan terhadap kolonialisme. Kelompok kesenian seperti wayang ludruk, dan paduan suara yang diberi nama dengan Panembromo merupakan salah satu unsur kesenian yang sering dipertunjukkan. Demikian pula segala kesusastraan Jawa mendapat tempat yang utama pula dalam kegiatan Budi Utomo itu. Buku-buku kesusastraan Jawa seperti dari Prapanca, Mangkunegara, dan Paku Buana IV dipelajari karena banyak mengandung filosofi kehidupan masyarakat Jawa.

Sesudah lahirnya Budi Utomo, di Sumatera Utara tumbuh pula organisasi Partai Sarikat Islam. Karena umat Islam merupakan mayoritas di Sumatera Utara, maka organisasi ini cepat pula berkembang. Anggotanya pada umumnya adalah para pemuka-pemuka Agama Islam yang tinggal di beberapa kota besar di Sumatera Utara. Karena itu perkembangannya hanya dikota-kota pula seperti Medan, Sibolga, Pematangsiantar, Tanjung Balai, dan Tapanuli Selatan. Syarikat Islam selain mengurus masalah Agama Islam juga membicarakan dan memperjuangkan perbaikan-perbaikan sosial dan politik bagi umatnya.

Karena perjuangannya iut maka kehidupan Sarikat Islam hanya subur di daerah-daerah yang tidak dikuasai oleh Sultan seperti Simalungun dan Tapanuli serta kota-kota besar lainnya. Sultan yang tidak ingin penduduknya melibatkan diri dalam kegiatan politik melarang Sarikat Islam itu mengadakan kegiatan di wilayahnya. Tokoh-tokoh terkemuka dalam Sarikat Islam di Sumatera Utara adalah Muhammad Samin. Tokoh ini sangat terkenal dalam Sarikat Islam malah dalam kegiatan politik di masa itu. Ia juga memperjuangkan perubahan-perubahan sosial.

Selain Sarikat Islam sebagai partai yang berorientasi kepada

Islam, juga terdapat organisasi seperti Muhammadiyah dan Al Jamiyatul Walayah. Kedua organisasi ini lebih menitikberatkan kepada masalah yang bersifat pendidikan saja. Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad Said, Was Pono, Raden Karto Utoyo, dan Abdul Wahid AR. Pendirian organisasi ini berlangsung sejak tahun 1927. Aljamiyatul Washliyah didirikan sekitar tahun 1930 dan sebagai tokoh utama adalah Haji Abdul Rachman Sjihob.

Dalam perjuangan, kedua organisasi itu sangat berbeda. Muhammadiyah ingin kemurnian dalam Agama Islam dan menghendaki penggunaan radio dalam pelaksanaan agama dan harus bersumberkan kepada *Qur'an* dan *Hadith*. Karena itu Muhammadiyah menentang segala unsur yang tidak terdapat pada *Qur'an* dan *Hadith*, sedangkan Al Jamiyatul Washliyah dapat menerima unsur-unsur tersebut selama tidak bertentangan dengan ajaran Agama Islam. Karena penduduk di Sumatera Utara lebih mempunyai kecenderungan kepada Al Jamiyatul Washliyah, maka Muhammadiyah tidak mendapat pengaruh.

Walaupun ada perbedaan antara keduanya itu dalam tujuan, melaksanakan dakwah Islam tetap menjadi tujuan kedua organisasi itu. Dengan adanya dakwah yang terorganisasi maka dalam kalangan umat Islam terbentuk suatu persatuan. Tidak jarang pula dalam setiap dakwah Islam itu para pembicara juga memasukkan unsur-unsur perjuangan bangsa seperti kebebasan dari penjajahan, karena Islam menentang segala bentuk penjajahan. Karena itu setiap ada rapat-rapat yang diselenggarakan oleh organisasi itu tetap harus mendapat izin dari penguasa Belanda dan dihadiri pula oleh polisi.

Perkembangan organisasi kepartaian menjelang tahun-tahun tigapuluhan agak menurun disebabkan pengaruh zaman malaise atau krisis ekonomi dunia juga turut melahirkan masa suram kepartaian di Sumatera Utara. Menjelang tahun-tahun empat puluhan, setelah keadaan krisis ekonomi agak mereda, suasana kepartaian agak meningkat.

Di Sumatera Utara lahir pula organisasi Gerindo dan Partindo, tetapi sangat sulit berkembang karena senantiasa diawasi oleh Pemerintah Belanda. Beberapa tokoh-tokohnya yang dianggap

sangat ekstrim oleh Pemerintah Belanda seperti M. Djoni atau lebih terkenal dengan Benteng Gemuk dibuang ke Digul. Selain tokoh tersebut juga Zarim M. S. dan Saleh Umar (nama samaran-nya Surapati) turut juga dibuang ke Digul. Dalam rapat-rapat umum mereka sering menyerang pemerintah jajahan dan dianggap oleh pemerintah jajahan sebagai penghasut dan mengganggu keamanan. Dengan tindakan-tindakan demikian ini perlawanan terhadap Belanda melalui gerakan kepartaian tidaklah bungkam, tetapi juga berlangsung terus. Melalui rapat-rapat gelap, partai-partai itu meneruskan kegiatannya.

Dari seluruh kegiatan partai-partai itu yang menonjol ialah pemogokan buruh *Deli Spoorweg Maatschappij*. *Deli Spoorweg Maatschappij* adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang angkatan di Sumatera Timur pada zaman penjajahan Belanda. Perusahaan ini merupakan suatu perseroan terbatas yang andilnya berasal dari berbagai perusahaan Belanda yang mengadakan eksploitasinya di Sumatera Timur. Dengan adanya perusahaan ini, pengangkutan hasil perkebunan dari perusahaan Belanda dapat cepat diangkut ke Pelabuhan Belawan yang merupakan pelabuhan ekspor. Selain barang-barang hasil perkebunan cepat diekspor, angkutan ini dapat pula mengangkut penumpang-penumpang.

Dengan demikian DMS memperoleh keuntungan ganda baik untuk kepentingan usaha perkebunannya juga dari hasil pengangkutan umum. Hal ini memang merupakan suatu tujuan dari kegiatan-kegiatan dagang pada masa kapitalisme modern. Walaupun keuntungan yang diperoleh pengusaha Belanda tinggi, namun kehidupan karyawannya atau buruh sebagian tetap sangat rendah. Gaji buruh perkebunan tidak lebih dari lima rupiah sebulan dan bekerja tanpa perhitungan waktu. Mereka diperlakukan seperti budak karena *Poenale Sanctie* melindunginya. Keadaan ini tidak saja berlaku di perkebunan, tetapi juga di perusahaan Belanda yang lain.

Mereka tidak membedakan standar upah buruh di perkebunan dengan usaha yang lain karena takut kalau-kalau akan terjadi kegoncangan-kegoncangan. Sebaliknya kehidupan buruh-buruh di luar perkebunan tidak sama dengan di perkebunan karena bebe-

rapa fasilitas yang ada di kebun tidak diperoleh oleh pekerja di luar perkebunan sehingga buruh di luar perkebunan itu lebih rendah dibandingkan di perkebunan.

Keadaan buruh di luar perkebunan yang demikian buruknya melahirkan suatu persatuan buruh di antara mereka. Di antara persatuan itu adalah perserikatan di antara buruh-buruh DSM yang disebut mereka Serikat Sekerja DSM. Tahun 1919 yang merupakan tahun yang sangat sulit karena dunia baru saja mengalami perang sehingga Belanda melakukan suatu penghematan besar-besaran. Hal ini mengakibatkan kehidupan sosial buruh sangat sulit sekali dan di mana-aman banyak buruh yang dikurangi dan penggajian mereka sangat rendah pula.

Karena keadaan ini maka seorang bernama Muhd. Samin yang terkenal sebagai tokoh dalam Serikat Sekerja itu bersama teman-temannya melakukan pemogokan. Muhammad Samin selain sebagai tokoh Serikat Sekerja ia juga seorang tokoh dalam Serikat Islam sebagaimana telah diuraikan. Karena itu pemogokan meluas ke seluruh perusahaan DSM yang tersebar ke segala kota di Sumatera Timur. Tujuan perjuangan itu tidak bersifat politik, tetapi semata-mata untuk perbaikan sosial buruh yang sudah hidup di bawah standar.

Pemogokan ini terjadi pada tahun 1919 dan sempat juga melahirkan stagnasi di Pelabuhan Belawan, stasiun-stasiun, atau perkebunan yang memerlukan kereta api sebagai alat transportasi satu-satunya terganggu karena pemogokan itu. Walaupun demikian pengaruhnya bagi pihak direksi DSM yang umumnya terdiri atas pemilik perkebunan seperti J. Th. Cremer tetap bertahan. Pada masa itu sampai-sampai Pemerintah Belanda melalui gubernur menyampaikan usul-usul untuk menengahi perselisihan tersebut, tetapi dari pihak direksi Perubahan DSM tetap bertahan.

Pekerjaan di stasiun diambilalih oleh orang-orang Belanda seperti masinis, kondektur, dan lain-lain. Mereka takut gerakan pemogokan itu akan merembet sampai di daerah perkebunan, sekiranya permohonan buruh itu dipenuhi dan akibatnya akan bertambah fatal. Karena itu pihak pengusaha terus bertahan dan dari

kalangan Serikat Sekerja tidak ada dana yang cukup bagi buruh-buruh yang mogok sehingga buruh-buruh pun kembali bekerja.

Dari peristiwa pemogokan itu dapat kita memetik suatu gambaran bahwa di daerah Sumatera Utara telah tumbuh suatu kesadaran akan suatu persatuan dalam menghadapi kolonialisme Belanda walaupun gerakan pemogokan itu tidak berlandaskan unsur-unsur politik. Sejak itu Belanda berhati-hati terhadap suatu kegiatan organisasi pergerakan bangsa Indonesia. Setiap organisasi dibatasi gerak langkahnya.

Di samping kegiatan partai-partai yang bersifat politik, pada masa penjajahan Belanda tidak ketinggalan pula kegiatan di kalangan pemuda sebagai suatu generasi yang akan meneruskan perjuangan bangsa seperti kependudukan. Pada tahun 1927 lahir *National Padvinderij* atau disingkat dengan *Natipij* di Kota Medan. Pimpinan kepanduan ini ialah M. A. Dasuki dan Pangeran Siregar. Kepanduan ini bercorak nasional dan menanamkan kesadaran bangsa Indonesia sekaligus sebagai wadah pembentukan kader-kader. Perkembangan kegiatan partai politik di Jawa seperti Parindra, setelah tahun tigapuluhan mencapai tingkat kemajuan dan kepanduan ini melebur menjadi "Kepanduan Surya Wirawan". Pusat Kepanduan di Jalan Amplas, yakni di gedung sekolah Taman Siswa. Di kalangan umat Islam juga terbentuk organisasi kepanduan seperti Al Jamiyatull Washliyah dan kepanduan Muhammadiyah yang bernama Hisbul Wathan.

Dari gambaran di atas, pergerakan bangsa Indonesia pada masa penjajahan Belanda memang tidak melakukan suatu konfrontasi fisik menghadapi Belanda, tetapi adanya pergerakan itu sangat menentukan gerak perjuangan bangsa Indonesia kemudian. Keberhasilan yang dapat dicapai dari perjuangan itu antara lain ialah kesadaran berbangsa dan adanya suatu kesatuan dalam menghadapi penjajahan Belanda. Proses pembentukan bangsa dan peleburan unsur-unsur etnis dapat berlangsung dengan cepat di Sumatera Utara karena kepentingan-kepentingan yang sama di antara puak-puak bangsa yang berdomisili di Sumatera Utara.

Walaupun pergerakan nasional pada akhir tahun empat-puluhan nampaknya menurun, tetapi hal ini bukanlah karena ma-

syarakat antipati terhadap perjuangan. Sebab utama ialah tekanan yang sangat keras terjadi terhadap pergerakan ini sendiri dari pihak penjajah. Karena itu pergerakan bangsa Indonesia lebih banyak mengadakan kegiatan secara ilegal.

3.3.2.4 Perlawanan terhadap Jepang

Sebagaimana telah diuraikan, sejak Maret 1942 Sumatera Utara telah dikuasai oleh Jepang. Tentara Jepang dari sebagian pasukan ke-25 yang berinduk di Malaya mendarat di Bogak, Tanjung Tiram dan kemudian bergerak ke Kota Medan, Pematangsiantar terus menguasai wilayah Sumatera Utara.

Sebelum masuk ke Sumatera Utara, Jepang terlebih dahulu mendapat bantuan dari kelompok kaum pergerakan yang bergabung dalam *Fujiwara Kikan*. Kelompok ini merupakan suatu kelompok yang mengharapkan kedatangan Jepang membantu bangsa Indonesia dan memerdekakannya. Karena itu dengan mudah Jepang dapat memasuki wilayah Sumatera Utara tanpa mengalami kesulitan.

Mereka yang bergabung dalam kelompok ini kebanyakan anggota partai Gerindo di bawah pimpinan Yacob Siregar dan Surapati. Setelah Jepang menguasai wilayah Sumatera Utara, partai-partai pergerakan bangsa Indonesia harus dibubarkan. Jepang menganggap pergerakan tidak diperlukan lagi. Indonesia bersama-sama dengan Jepang sebagai saudara tuanya akan memperjuangkan suatu yang lebih besar, yaitu Kemerdekaan Asia Timur Raya di bawah pimpinan Jepang.

Sejak itu perjuangan bangsa Indonesia di Sumatera Utara harus mencari jalan keluar. Sementara itu Jepang terus melakukan pengintipan terhadap gerak-gerik kaum pergerakan, sehingga kaum pergerakan harus hati-hati. Untuk menghadapi Jepang yang keras dan tentara ke-25 Jepang yang terkenal kejam, pemimpin pergerakan terpaksa melakukan suatu siasat yang lain. Sebagaimana juga di Jawa, pergerakan bangsa Indonesia di Sumatera Utara terpaksa bekerjasama dengan Jepang dan sementara itu menyusun kekuatan untuk suatu ketika berhadapan dengan Jepang.

Pada zaman pendudukan Jepang, struktur masyarakat tidak mengalami perubahan dan sama dengan keadaan zaman penjajahan Belanda. Keadaan perekonomian sungguh sangat menyedihkan. Daerah Sumatera Timur terkenal sebagai daerah yang senantiasa mengimpor bahan makanan karena penghasilan utama hanyalah hasil perkebunan. Dengan adanya perang, bahan makanan yang biasanya didatangkan dari luar tidak ada. Untuk menyediakan bahan makanan, maka penduduk diwajibkan menanam bahan makanan. Penduduk kota terpaksa menanam tanah-tanah yang kosong dengan jenis bahan makan seperti ubi, jagung, padi, dan lain-lain. Petani-petani di desa-desa diwajibkan pula untuk menyerahkan sebagian hasil panennya kepada Jepang dengan pembayaran yang sangat rendah atau ditukar dengan kain.

Kehidupan buruh dan pekerja di kantor-kantor lebih buruk lagi. Mereka menerima gaji yang tidak cukup dan sebagian dibayar dengan bahan makanan seperti jagung dan kacang kuning. Bahan-bahan kebutuhan seperti sabun, minyak goreng, dan gula, kalau ada hanya di pasar gelap.

Para pegawai harus bekerja keras dan harus pula berlatih militer yang diadakan Jepang, karena setiap jawatan merupakan suatu kesatuan dalam pertahanan sipil. Pelajar-pelajar juga mendapat latihan militer dan diajarkan disiplin militer. Setiap waktu para pelajar dan pegawai diwajibkan pula melakukan kerja bakti atau *kinkro hosi*.

Keadaan makanan yang kurang baik dan jauh dari syarat-syarat kesehatan menyebabkan banyak penduduk menderita busung lapar, penyakit kulit, disentri, dan malaria berjangkit di kalangan penduduk. Keadaan seperti ini tidak saja terdapat di kota-kota tetapi juga di pedesaan, sebaliknya tentara Jepang hidup serba kecukupan. Padi rakyat yang jatuh ke tangannya lebih dahulu dinikmatinya dan tekstil yang terdapat di toko-toko disita Jepang.

Kebebasan penduduk juga semakin terbatas karena tidak boleh bepergian tanpa dilindungi surat-surat. Bila Jepang memerlukan tenaga kerja, kepala desa harus menyediakannya; syarat-syarat sebagai pekerja tidak pernah dibicarakan. Keadaan ini menyebab-

kan banyak penduduk desa yang dijadikan pekerja paksa atau *romusha*. Pekerjaan-pekerjaan ini dikirim ke proyek-proyek militer untuk membuat jalan dan benteng-benteng pertahanan Jepang. Kehidupan pekerja-pekerja ini sangat menyedihkan. Makanan sangat kurang dan pemeliharaan kesehatan tidak ada. Proyek yang terkenal adalah pembuatan Jalan Raya Blang Kejeran yang menghubungkan daerah Aceh Tenggara dengan Sumatera Utara atau Lagos di Riow.

Seenaknya saja serdadu-serdadu Jepang mendirikan pusat pelacuran di kota-kota. Istilah pelacur pada waktu itu adalah *sanyuru*. Adat istiadat dan norma agama tidak diperdulikan oleh Jepang. Keadaan ini melahirkan perasaan yang tidak menyenangkan bagi bangsa Indonesia, sehingga sejak saat itu perasaan membenci Jepang bersemi dalam sanubari penduduk di Sumatera Utara. Tindakan Jepang itu tidak dapat dibiarkan seterusnya karena, dengan demikian identitas bangsa Indonesia akan lenyap.

Bertitik tolak dari pandangan inilah maka tokoh pergerakan di Sumatera Utara mulai menyusun kekuatan kembali menghadapi Jepang. Strategi menghadapi Jepang mulai diatur dan disusun secara matang melalui segala kegiatan. Untuk itu kaum pergerakan menyusun sistem perjuangan melalui kerja sama dan membentuk kekuatan yang bersendikan seluruh kekuatan rakyat serta mempersiapkan diri menghadapi kekuatan Jepang. Dengan kerjasama maka banyak unsur-unsur pergerakan rakyat berhasil menyusup ke dalam segala sendi-sendi pemerintahan militer Jepang.

Pembentukan organisasi yang bersifat kemiliteran dan semi militer seperti *heiho*, *ciu cun*, *keibodan* dan *fujinkai* memberikan kesempatan bagi unsur-unsur pergerakan di Sumatera Utara menyusup ke dalamnya. Demikian pula segala kegiatan lainnya, baik yang bersifat sosial maupun bersifat kesenian.

Sejak bulan Mei 1943 kedudukan tentara Jepang mulai mengalami kemunduran di segala front sehingga di Sumatera Utara nampak perubahan sikap Jepang terhadap bangsa Indonesia. Mereka mengharapkan bantuan-bantuan dari bangsa Indonesia. Di Sumatera Timur dibentuk BOMPA (Badan Oentoek Membantoe Pertahanan Asia). Pimpinan badan ini mula-mula Mr. Muhammad

Yoesoef, tetapi kemudian diganti oleh Zarim M.S. Di Tapanuli dibentuk pula BAPEN (Badan Pertahanan Negeri) di bawah pimpinan Dr. F.L. Tobing

Tujuan badan yang didirikan dan mendapat restu dari Jepang ini, adalah untuk menghimpun seluruh tenaga rakyat guna membantu Jepang, tetapi kaum pergerakan menjadikan badan ini sebagai tempat berkumpulnya para tokoh terkemuka bangsa Indonesia yang pada waktu itu sangat sulit berkumpul karena senantiasa dicurigai Jepang. Di sinilah disusun rencana-rencana untuk mengatur siasat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam pelaksanaannya BOMPA pada tahun-tahun pertama berhasil menyusun suatu daftar istilah dalam bahasa Indonesia sehingga mulai sejak itu Bahasa Indonesia telah ditingkatkan menjadi bahasa administrasi dan pengetahuan. Ini tidak berarti kelihatannya, tetapi pada pokoknya itu merupakan suatu hasil yang besar bagi suatu dasar pembentukan bangsa. Di samping itu juga melalui badan-badan tersebut di atas dapat pula pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia menanamkan rasa kebangsaan kepada bangsanya.

Pidato-pidato selalu bernapaskan cita-cita Jepang tetapi didalamnya ada pesan-pesan terselubung. Umpamanya, pidato Zarim M.S. di depan prajurit-prajurit *ciu cun* yang isinya antara lain sebagai berikut :

Kita harus menguasai ilmu perang untuk dapat membela diri. Kita berlatih bukan untuk membela Nippon tetapi untuk membela diri kita sendiri. Kita tidak perlu membela Nippon, karena Dai Noppon cukup kuat untuk membela diri sendiri
..... 10.

Pidatonya itu menanamkan kesadaran prajurit-prajurit Indonesia yang bertugas dalam ketentaraan Jepang. Nada pidato itu memuji Jepang tetapi juga memberikan peringatan kepada bangsa Indonesia agar kita bersiap-siap untuk membela diri dan kebulatan tekad (fisik) sangat diperlukan. Banyak lagi pidato-pidato yang nilainya sama disuarakan oleh tokoh politik maupun tokoh agama.

Selain dari kegiatan kaum politik, di masa pendudukan Jepang

itu juga para seniman turut pula menyumbangkan buah pikirannya melalui seni, drama, seni suara, dan lain-lain. Tokoh terkemuka di sini adalah Saleh Umar atau Surapati dan M. Noer Nasution (alm. mantan direktur Antara). Pada zaman Jepang, bioskop praktis tidak berfungsi. Karena itu kemudian tumbuh kelompok-kelompok sandiwara. Saleh Umar pada mulanya membentuk sandiwara Barito. Kemudian sesuai dengan selera Jepang nama sandiwara itu ditukar dengan *Yamato*. M. Noor Nasution membentuk pula *Kinsei Gedidan* dan di bawah pimpinan Ahmad C.B. dibentuk pula Asmara Dhana.

Sandiwara-sandiwara itu sesekali melakonkan cerita-cerita yang bertemakan kepahlawanan dan keperwiraan dari bangsa Indonesia. Misalnya Harimau Jantan dan nyanyian-nyanyian daerah maupun nyanyian Indonesia. Melalui saluran seni drama ini juga berkembang suatu perasaan yang mendalam mengenai nilai-nilai kebangsaan dan patriotisme bangsa.

Peranan sandiwara ini tidak saja di Sumatera Utara, tetapi juga sampai ke Malaya karena sering pula mereka mengadakan anjangan ke sana. Ahmad C.B. dengan sandiwaranya sering berkunjung ke Malaya untuk melakukan pertunjukan-pertunjukan. Dengan demikian hubungan budaya Malaya dengan Indonesia menjadi lebih rapat. Banyak artis-artis yang berasal dari Sumatera seperti Kasmah Doety yang kemudian bermukim di Malaysia akibat hubungan seni drama tersebut. Hubungan ini dimungkinkan karena administrasi pemerintah Sumatera adalah bagian dari administrasi daerah Semenanjung Melayu. Lily Suhairy, seorang komponis terkemuka dari Sumatera Utara, juga banyak menciptakan lagu-lagu yang menyindir kehidupan pada zaman Jepang seperti lagu Makan Sirih, Aras Kabu, dan lain-lain.

Jadi segala kegiatan seniman baik sadar maupun tidak telah melahirkan suatu pernyataan tidak puas. Semuanya dapat dilakukan karena banyak tokoh pergerakan Indonesia pada waktu itu dapat memasuki jawatan kebudayaan yang dibentuk Jepang (*Bunkaka*).

Satu-satunya suara yang didengar hanyalah surat kabar *Sumatera Sinbun* yang berada di bawah Jepang. *Pewarta Deli dan Sinar*

Deli tidak boleh terbit. Walaupun demikian atas inisiatif Mumar S. Hamijoyo lahir mingguan untuk pelajar dan pemuda yang bernama *Melati*. Dalam mingguan berkala itu, dengan cara tersendiri, disemaikan pula perasaan kebangsaan sehingga pengaruh mingguan ini sangat terasa di kalangan pemuda.

Di mana-mana terbentuk persatuan Pemuda Melati karena pengaruh mingguan berkala itu. Pada mulanya pemuda-pemuda yang bergabung dalam Pemuda Melati inilah kemudian memegang peranan yang penting dalam kegiatan sewaktu terjadinya Proklamasi kemerdekaan di Sumatera Utara. Jadi pada zaman Jepang ini segala kesempatan yang diberikan oleh Jepang dijadikan sebagai sarana untuk menghadapi Jepang dan menanamkan perasaan nasional dalam segala kehidupan bangsa.

Selain gerakan yang bersifat keperatif dengan Jepang, juga terjadi gerakan di bawah tanah. Sejak pendaratan Jepang sebenarnya kecurigaan terhadap Jepang telah ada karena tindakan-tindakannya yang kejam dan banyak tokoh nasionalis yang turut pula menjadi korban. Misalnya seorang anggota Gerindo bernama Nukman dan menjadi anggota *Fujiwara Kikan* (yaitu badan yang beranggotakan bangsa Indonesia dan membantu Jepang sewaktu pendaratannya) dibunuh Jepang dengan keji berdasarkan tuduhan merampok perkebunan. Peristiwa ini terjadi pada akhir tahun 1942 di Serbelawan, suatu kota kecil di Simalungan.

Karena kekejaman itu maka lahir suatu usaha dari beberapa tokoh untuk mempersiapkan diri menghadapi Jepang dengan cara kekerasan. Sebelumnya telah diadakan suatu percobaan menghadapi Jepang dengan cara kekerasan. Peristiwa pemberontakan di Pancur Batu, yang terkenal sebagai pemberontakan Aron, merupakan suatu percobaan yang dilakukan oleh pemuka pergerakan. Pemberontakan itu terjadi pada 26 dan 27 Juli 1942, yaitu setelah beberapa bulan Jepang menduduki Sumatera Utara. Sebab pemberontakan itu adalah paksaan Jepang pada penduduk desa sekitar Pancur Batu untuk menyerahkan padinya bagi kepentingan Jepang. Penyerahan yang dilakukan secara paksa itu tidak sesuai dengan kebiasaan rakyat, sedang padi itu adalah sumber kehidupan penduduk di daerah ini. Karena itu petani-petani yang tergabung

dalam kelompok kerja gotong-royong, yang di Tanah Karo dinamakan Aron, melakukan penyerangan terhadap petugas-petugas Jepang. Rakyat di desa-desa sekitarnya turut melakukan penyerangan masal terhadap petugas pengutip padi itu tanpa gentar terhadap pengawal-pengawal Jepang itu. Karena kewalahan, Jepang mengajak para pemimpin petani dan pemuka masyarakat untuk berunding dan musyawarah. Dengan siasat musyawarah ini, Jepang mengambil kesempatan yang baik untuk menangkap pemimpin-pemimpin rakyat sehingga pemberontakan itu dapat dipadamkan.

Peristiwa ini mengakibatkan beberapa pemimpin pergerakan dicurigai Jepang dan ada yang ditangkap karena dianggap menjadi dalang keributan itu. Tetapi dengan berbagai cara beberapa pemimpin rakyat seperti Yacob Siregar dapat keluar dari tahanan *kempetai*. Ia malah dipercaya Jepang untuk turut dalam suatu Badan Pertahanan Rakyat yang dibentuk Jepang di bawah pimpinan Kapten Inouye. Badan itu dalam bahasa Jepang disebut *Tokko Bo Eidan*.

Kegagalan Pemberontakan Aron itu membuat tokoh pergerakan menggunakan siasat untuk bergerak menyokong kegiatan Jepang dalam membentuk barisan-barisan pertahanan rakyat. Tetapi kaum pergerakan membelokkan kepada kepentingan perjuangan bangsa Indonesia selanjutnya.

Jepang bermaksud membentuk suatu pertahanan rakyat sehingga bila Sekutu masuk akan diadakan perang gerilya. Dengan demikian terbentuklah Taman Latihan Pemuda Tani Talapeta) Tora Tai (Pasukan Harimau), *Moku Tai* (Barisan Gajah) dan *Kenyo Jike* (Barisan Pantai).

Pasukan ini merupakan kekuatan rakyat Indonesia yang tinggal di Sumatera Utara dari pantai sampai ke pegunungan. Pimpinan dari pasukan ini adalah Yacob Siregar dan Saleh Umar yang namanya telah tenar. Karena itu mudahlah muncul kader-kader yang terlatih dan dapat diharapkan dalam perjuangan bangsa Indonesia kemudian. Dari kader-kader inilah kemudian lahir barisan-barisan rakyat yang tergabung dalam Lasykar Napindo, Harimau Liar, dan lain-lain di masa Perang Kemerdekaan.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa di zaman Jepang pergerakan bangsa Indonesia menghadapi berbagai macam kesulitan untuk mencapai tujuan perjuangan. Dengan jalan yang berliku-liku, tujuan memang dapat juga tercapai walau dengan jalan yang penuh resiko dan berbahaya. Dengan keadaan tersebut, perjuangan bangsa Indonesia menjadi semakin matang.

BAB IV KESIMPULAN

Perlawanan terhadap kolonialisme di Sumatera Utara pada garis besarnya melalui suatu proses yang sama dengan perjuangan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Memang ada perbedaannya, tetapi perbedaan ini timbul karena pengaruh unsur-unsur sosial geografis serta etnis.

Persamaan yang dapat kelihatan dalam garis besar ialah .

1. Pada tingkat pertama perlawanan bersifat melepaskan diri dari kekuasaan bangsa Eropa, khususnya Belanda yang pada waktu itu ingin menguasai perekonomian. Penguasaan perdagangan oleh Belanda mengakibatkan runtuhnya sendi-sendi kehidupan perekonomian penduduk yang telah tersusun sejak lama. Ini melahirkan kemelaratan penduduk yang mendiami daerah pantai.
2. Perjuangan yang bersifat lokal itu umumnya dipimpin oleh tokoh-tokoh yang dianggap rakyat mempunyai kharisma dan juga dianggap tokoh agama atau adat.
3. Mereka berjuang tanpa suatu organisasi yang teratur atau boleh dikatakan tidak ada organisasi sama sekali. Karena keadaan itu perjuangan tidak dapat berkeselamatan. Bila pemimpin-pemimpin dalam perjuangan tertangkap atau gugur dalam perjuangan, maka usaha itu terhenti untuk sementara.

4. Dalam perjuangan itu tidak ada suatu ideologi yang mengikat sehingga perjuangan mudah rapuh dan patah. Keadaan ini menyebabkan Belanda dapat melakukan politik adu domba antara satu dengan lainnya. Akibatnya Belanda dapat menanamkan pengaruh dari hari ke hari.

Keempat faktor ini boleh dikatakan merupakan suatu ciri-ciri pokok dalam perjuangan menentang Kolonialisme dari abad ke-18 sampai abad ke-19 di seluruh Indonesia. Tetapi dibalik hal-hal yang umum ada pula hal yang khusus untuk Sumatera dalam abad ke-18 dan ke-19, yaitu

1. Sumatera Utara sampai pada masa ke-19 secara budaya tidak bersatu. Penduduk daerah pantai sebagian besar menganut Agama Islam yang dengan sendirinya mempunyai orientasi kebudayaannya bersifat Islam, sedangkan di daerah pedalaman masih banyak penduduk yang belum mengalami sentuhan dengan unsur-unsur kebudayaan asing. Keadaan ini merupakan suatu unsur penghalang yang sangat menentukan karena tidak mungkin tumbuh persatuan di antara penduduk pesisir dan pedalaman.
2. Selain itu Sumatera Utara yang didiami oleh berbagai kelompok atau suku-suku yang masing-masing mempunyai pandangan hidup dan adat. Antara yang satu dengan lainnya tidak ada hubungan, sehingga perlawanan menghadapi Belanda sangat terbatas pada wilayah yang sangat kecil.
3. Pembukaan perkebunan dan sarana di Sumatera Timur merupakan suatu perombakan terhadap kehidupan masyarakat masa-masa sebelumnya. Penduduk di Sumatera Timur bercampur dengan suku-suku lainnya dari Indonesia dan ini melahirkan proses persatuan di antara mereka dan benih untuk pembentukan bangsa Indonesia.

Sesudah abad ke-19 perjuangan menghadapi kolonialisme di Sumatera Utara mengikuti irama yang sama dengan perkembangan yang terjadi di Jawa. Pertumbuhan pergerakan kebangsaan di Sumatera Utara pada abad itu lebih cepat mengalami kematangan.

Kemajuan-kemajuan yang terjadi pada perusahaan-perusahaan Belanda baik dalam perkebunan maupun dalam usaha perdagangannya, melahirkan jurang pemisah yang sangat besar antara penduduk dengan bangsa Belanda. Dalam kehidupan masyarakat kelihatan jelas diskriminasi itu apabila dilihat di perkebunan-perkebunan.

Dengan adanya *Poon ke Sanctie*, pengusaha di daerah perkebunan seakan-akan menjadi raja tanpa mahkota. Sebaliknya buruh-buruh perkebunan hidup dalam suasana perbudakan. Keadan sosial demikian merata di seluruh perkebunan.

Karena keadaan tersebut maka proses pertumbuhan pergerakan kebangsaan di Sumatera Utara sangat cepat sekali. Malahan kondisi demikian menjadi tempat atau wadah lahirnya pemuka-pemuka pergerakan kebangsaan yang bertaraf nasional. Sumatera Utara merupakan tempat pematangan dari kader-kader pergerakan kebangsaan seperti Adinegoro, Syamsudin Sutan Makmur, Adam Malik, dan banyak lagi yang lain.

Hal ini disebabkan mereka dapat melihat sendiri praktek-praktek yang dilakukan oleh Belanda dalam menjalankan kolonialismenya di Indonesia. Sumatera Utara atau khususnya perkebunan-perkebunan, sering menjadi sorotan yang tajam dari kaum pergerakan, malahan juga dibicarakan dalam *Volksraad*. Di masa jaya-jayanya Parindra, pernah Mohammad Hasni Thamrin menentang segala tindakan-tindakan pihak perkebunan di Sumatera Timur yang memperlakukan buruh-buruh itu sebagai budak yang dilegalisasi oleh Pemerintah Belanda. Golongan reaksioner yang berada di *Volksraad* maupun yang ada di Negeri Belanda sering mempertahankan hak-hak mereka setelah melihat betapa besarnya keuntungan yang diperolehnya dari wilayah Sumatera Timur. Dengan gigih mereka mempertahankan diri dari serangan-serangan kaum nasionalis yang ingin merombak tata susunan masyarakat kolonial yang tercermin di Sumatera Timur. Belanda tidak ingin merombak atau mengubah keadaan karena Sumatera Timur merupakan sumber yang utama dalam mengumpulkan devisa pada waktu itu. Untuk melaksanakan kehendaknya itu Belanda tidak segan-segan melakukan kekerasan serta penang-

kapan-penangkapan terhadap tokoh-tokoh yang dicurigai. Pergerakan kebangsaan di Sumatera Utara pada zaman penjajah terpaksa bertindak dengan hati-hati untuk pencegahan kehancurannya. Tidak jarang mereka harus melakukan rapat-rapat tertutup dan jauh dari tempat keramaian untuk menghindari penangkapan dari polisi rahasia Belanda atau PID.

Di zaman pendudukan Jepang, perjuangan bangsa Indonesia di daerah ini terpaksa menempuh cara lain karena kekerasan Jepang. Pemberontakan Aron yang gagal dan membawa akibat tratis bagi para pelaku. Kekejaman *kempeitai* Jepang memaksa tokoh-tokoh pergerakan mendekati Jepang dan melakukan kerjasama. Dalam kerjasama ini kepentingan-kepentingan nasional menjadi pokok utama.

Karena itu zaman pendudukan Jepang memberikan modal yang cukup besar bagi kematangan pergerakan kebangsaan. Tidak mengherankan bahwa setelah Proklamasi, Medan menjadi pusat kegiatan dalam merealisasi kemerdekaan itu.

DAFTAR CATATAN

Bab I

1. Tengku Luckman Sinar, SH *Sari Sejarah Serdang*, hal 234.
2. Paul B. Pedersen, *Darah Batak dan Jiwa Protestan*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1975 hal. 40.
3. Raja Palik Tampubolon, *Pustaka Tombaga Holing*, Stencilan P. Siantar, 1964, hal. 162.
4. H. Muhammad Said, *Koeli Kontrak Tempo Doeloe*, percetakan Waspada, Medan 1977 hal. 8.
5. Ibid, hal. 9 – 10.
6. Ibid, hal. 20.
7. Ibid, hal. 44.
8. Ibid, hal. 76 – 9.
9. W. Hutagalung, *Tinjauan Ringkas Tentang Sejarah Bahasa Daerah Batak*, Medan Bahasa VI, No. 1, Januari 1956 hal 17 – 18.
10. H. Muhammad Said, Op. cit. hal. 8 – 11.
11. Monograpy No. 6 Tahun 1976, Malaysian Brand, Royal Asiatic Society, Kualalumpur, 1976 hal. 8.
12. Loc. cit, hal. 8.
13. Berita Santropologi, tahun VIII No. 27, 1979 hal. 37.
14. Ibid hal. 37.
15. H. Muhammad Said, Op. cit hal. 44.
16. Ibid hal. 75 – 6.

17. Ibid hal. 94.
18. Ibid hal. 156.
19. Ibid ha. 157.
20. Berita Anthropologi tahun XI No. 57 hal. 36.

Bab II

1. Dada Meuraza *Sejarah Kebudayaan Suku-suku di Sumatera Utara* Penerbit Sasterawan. Medan Tahun 1973, hal. 61.
2. DR. H.T. Colenbrandre *Koloniale Geschiedenis, Derde Deel* Penerbit Martinus Nijhoff. S' gravenhage 1925 hal. 26.
3. DR. H.Y. De Graaf, *Genshiedenis van Indonesia*, Penerbit W.V. Hoeve S'Gravenhage/Bandung 1949 hal. 431.
4. DR. H.T. Colenbrander Oopcit, hal. 229.
5. DR. H.T. Colenbrander Ibid, hal. 231.
6. DR. H.T. Colenbrander Locit,
7. Edisaputra *Simalungun Joyany iSumatera*. Penerbit Bina Satria Medan, hal. 38.

Bab III

1. Team Assistensi *Sejarah Perjuangan Kodam II Bukit Barisan*, Dinas Sejarah Kodam II Medan 1977 Hal. 19.
2. M.D. Purba *Mengenai Sang Nawaluh Sebagai Pejuang*, Penerbit Pattimura Medan, 1980 Hal. 16.

3. C.L. Napitupulu, SH *Pedang Batak*, Penerbit Yayasan Pahlawan Nasional Hal. 269.
4. Adniel L. Tobing *Sisingamangaraja*, Medan 1967 Hal. 114.
5. Forum Komunikasi, *Perjuangan Rakyat Semesta*, Jakarta.
6. M.D. Purba Opcit Hl. 20.
7. Ibid Hal. 23.
8. T. Luckman *Sinar Perang Sunggal* Majalah Prisma No. 831980.
9. Biro Sejarah Prima *Medan Area Mengisi Proklamasi*, Medan 1976 Hal. 53.

DAFTAR PUSTAKA

Biro Sejarah Prima. *Perjuangan Kemerdekaan Dalam Wilayah Sumatera Utara Area Mengisi Proklamasi. Jilid I.* Medan: Badan Musyawarah Pejuang Republik Indonesia Medan Area.

Colenbrander, H.T. *Koloniale Geschiedenis.* S'Gravenhage. Martinus Hijhoff, 1925.

De Graaf, H.Y. *Gemahadienis Van Indonesia.* S'Gravenhage Bandung. W.V. Hoeve, 1949.

Edisaputra, *Lintasan dan Cuplikan Perjuangan Kemerdekaan se Sumatera dan Kalimantan Barat,* Medan: UP. Bina Satria "45".

. *Simalungun Jogjanya Sumatera.* Medan. UP Bina Satria.

Kartodirdjo, Sutomo, A. *Sejarah Perlawanan-perlawanan terhadap Kolonialisme.* Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI, 1973.

Lah Husny, H.M. *Biografy Sejarah Perjuangan dan Pahlawan Nasional Amir Hamzah.* Medan: B.P. Husny, Jalan Amaliun No. 24.

Lintasan Sejarah Peradapban Budaya Penduduk Melayu Pesisir Dari Sumatera Timur (1912 – 1950). Medan: B.P. Husny Jalan Amaliun No. 24.

Lumban Tobing, Adaiel, *Sisingamangaraja I – XII*. Cetakan 'IV, tahun 1967 (Telah direvisi).

Maouraxa, Dala, *Sejarah Kebudayaan Suku-suku di Sumatera*. Medan: Sastrawan, 1973.

Nomensen, Y.T. *Omoni Dr. Ingwer Luduig Nomensen*. Jakarta. BPK, Gunung Mulia, 1974.

Napitupulu, O.L. *Perang Batak Perang Sisingamangaraja*. Jakarta Yayasan Pahlawan Nasional Sisingamangaraja. 1972.

Nasution, Abdul Haris, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*. Jilid I, (Proklamasi). Penerbit. Dinas Sejarah Militer TNI Angkatan Darat. 1976.

Nazief Chatib dan Z. Pangaduan Lubis, *Perlawanan Sutan Mangku-tur terhadap Belanda di Mandailing*. Artikel Seniman Sejarah Nasional di Jakarta 1981.

Purba. M.D. *mengenal Kepribadian Rakyat Simalungun*. Medan. M.D. Purba, Jalan Kapitan Pattimura No. 441.

, *Mengenal Sang Nauuluh Damanik sebagai Pejuang*. Medang: M'D. Purba, Jalan Kapitan Pattimura No. 441.

Paul, D. Pedorsen, *Darah Batak dan Jiwa Protestan*. Jakarta. BPK Gunung Mulia, 1975.

Pulungan, Arifin, *Kisah dari Pedalaman*. Cetakan – II. Medan: Dian Corporation, Jalan Brigjen Katamso.

Deid, Anthony, *The Contest For Nort Sumatera, Etjoh. The Hetherland and Britain! 858 – 1898*). Kuala Lumpur, London, New York: Oxfort University – Press, 1969.

Said, Mohammad, *Sejarah Pers di Sumatera Utara dengan Masya-rakat yang dicerminkan 1885 – Maret 1942*). Medan. Percetakan Waspada, 1976.

, *Aceh Sepanjang Adab*, Penerbit, Waspada Medan, tahun.

Sangti, Batara "*Sejarah Batak*" Balige. Karsitex. 19 Balige. 122 – 123.

, *Suatu Zaman Gelap di Deli Koeli Kontrak Tempo Doeloe dengan Berita dan Amarahnya*. Medan: Percetakan Waspada, 1977.

Sinar, Lukman, T. *Sari Sejarah Serdang (dengan adat-istiadat Melayu dan Tarombo Sori Paduka Botjah Pahlawan)* Jilid – I.

Schreiner Lothar, *Telah Kudengar dari Ayahku, Perjuangan Adat dengan Iman Kristen di Tanah Batak*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1978.

Tampubolon, Raja Patik, *Pustaka Tumbaga Holing*. Stensilan) Pematang Siantar, 1964.

Team Asistensi Pangdan – II/Bukit Barisan, *Patah Tumbuh Hilang Berganti Sejarah Perjuangan Kodam – II Bukit Barisan*. Jilid – I. Medan. Dinas Sejarah Kodam – II/Bukit Barisan.

, *Perlawanan Rakyat Semesta Sumatera Utara*. Jilid – I, Medan. Institut Agama Islam Negeri Al Jamiah Sumatera Utara, Medan, 1975.

, *Almanak Sumatera*. Medan: Panitia Almanak Nasional Sumatera Utara. Komando Antar Daerah Sumatera, 1969.

, *45 Tahun Sumpah Pemuda*. Jakarta: Yayasan Gedung-gedung Bersejarah, 20 Mei 1974.

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Anwari Lubis.
Umur : 45 tahun.
Pekerjaan : Kakandep P dan K Kecamatan Tanjung Pura Langkat.
Pendidikan : S.G.G.
Alamat : Tanjung Pura – Langkat
2. Nama : Abdul Azis.
Umur : 55 tahun.
Pekerjaan : Purnawirawan TNI (Kapten).
Pendidikan : Mulo.
Alamat : Pulo Brayan – Medan.
3. Nama : Abdul Sani Gani.
Umur : 50 tahun.
Pekerjaan : Kakandep P dan K Tanjung Tiram – Asahan.
Pendidikan : S.G.A.
Alamat : Tanjung Tiram – Asahan.
4. Nama : Chalil Sulaiman, SH.
Umur : 46 tahun.
Pekerjaan : Kasi Kebudayaan Kandep P dan K Asahan.
Pendidikan : Perguruan Tinggi.
Alamat : Kisaran – Asahan.

5. Nama : Chalik Siregar.
 Umur : 52 tahun.
 Pekerjaan : Ex Penghulu Serbelawan.
 Pendidikan : Mulo.
 Alamat : Jalan Raya Serbelawan – Simalungun.
6. Nama : Drs. E.K. Siagian.
 Umur : 60 tahun.
 Pekerjaan : Pensiunan Guru SPG.
 Pendidikan : Perguruan Tinggi.
 Alamat : Pematang Siantar.
7. Nama : Idrus Lubis.
 Umur : 45 tahun.
 Pekerjaan : Kasi Kebudayaan Kandep P dan K Langkat.
 Pendidikan : S.G.A.
 Alamat : Kotamadya Binjai – Langkat.
8. Nama : Kalang Tambunan.
 Umur : 61 tahun.
 Pekerjaan : Ex Anggota DPR.
 Pendidikan : H.I.S.
 Alamat : Aek Hanopan – Labuhanbatu.
9. Nama : Ki Sugondo Kartoprojo.
 Umur : 65 tahun.
 Pekerjaan : Pimpinan Taman Siswa Medan.
 Pendidikan : S.G.A.
 Alamat : Jalan Bulan – Medan.
10. Nama : Drs. J.L. Sinaga.
 Umur : 50 tahun.
 Pekerjaan : Kakandep P dan K Kabupaten Simalungun.
 Pendidikan : Perguruan Tinggi.
 Alamat : Jalan Merdeka – Pematang Siantar.

11. Nama : Marsuki Lubis.
 Umur : 65 tahun.
 Pekerjaan : Pejuang 45/Anggota DPR, Sumatera Utara.
 Pendidikan : —
 Alamat : Jalan Kemiri 7 — Medan.
12. Nama : Mohammad Said.
 Umur : 65 tahun.
 Pekerjaan : Ex Pimpinan Umum Harian WASPADA
 Medan.
 Pendidikan : H.I.S./MULO.
 Alamat : Kramat III/47 — Jakarta.
13. Nama : Rojam Ginting.
 Umur : 71 tahun.
 Pekerjaan : Pegawai Negeri/Pelaksana pada Kandep.
 P dan K Tanah Karo.
 Pendidikan : Sekolah Dasar.
 Alamat : Ajinembah — Tanah Karo.
14. Nama : T.M. Keloko.
 Umur : 62 tahun.
 Pekerjaan : Pens. Ass, Wed/Wakil Ketua DPR.
 Pendidikan : H.I.S.
 Alamat : Sidikalang Dairi.
15. Nama : Tengku Luckman Sinar, SH.
 Umur : 50 tahun.
 Pekerjaan : Direktur PT. Sulung Laut.
 Pendidikan : Perguruan Tinggi.
 Alamat : Jalan Abdul Lubis 42 — Medan.

